

# APLIKASI TEORI PERENCANAAN: *dari KONSEP ke REALITA*

Buku ini berisi tentang teori perencanaan yang membahas tentang konsep konsep dan implementasi. Tulisan dalam buku ini merupakan kumpulan dari tulisan para mahasiswa S1 PSdK yang mengambil mata kuliah teori perencanaan yang diasuh pada semester I 2019/2020. Seluruh tulisan tersebut dibagi ke dalam dua bagian yaitu teori perencanaan pembangunan dan isu lingkungan dalam teori perencanaan.

Pada bagian pertama, terdapat tulisan-tulisan yang disajikan membahas berbagai kasus perencanaan berdasarkan sudut pandang teori perencanaan. Bagian kedua dari buku ini membahas kasus-kasus perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Orientasi pembangunan global saat ini telah bergeser ke arah pembangunan berwawasan lingkungan. Praktik pembangunan selama ini, yang didorong oleh revolusi industri terbukti banyak menurunkan kualitas lingkungan. Pada gilirannya, hal ini juga menjadi penyebab pemanasan global. Organisasi internasional dan pemimpin dunia kini gencar mempromosikan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan untuk anak cucu di masa depan.



DEPARTEMEN PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

**BG** BUANA Grafika  
PENERBIT

ISBN: 978-623-7358-33-6



9 786237 358336

APLIKASI TEORI PERENCANAAN: DARI KONSEP KE REALITA

# APLIKASI TEORI PERENCANAAN: *dari KONSEP ke REALITA*



Editor:  
Dr. S. Djuni Prihatin, M.Si.  
Drs. Susi Daryanti, M.Sc.  
Rezaldi Alief PRamadha, S.E., M.S.S.

# **APLIKASI TEORI PERENCANAAN: *dari* KONSEP *ke* REALITA**

Editor:

Dr. S. Djuni Prihatin, M.Si.

Drs. Susi Daryanti, M.Sc.

Rezaldi Alief PRamadha, S.E., M.S.S.

**BUANA GRAFIKA**  
PENERBIT

**APLIKASI TEORI PERENCANAAN:  
DARI KONSEP KE REALITA**

**Editor :**

1. Dr. S. Djuni Prihatin, M.Si.
2. Drs. Susi Daryanti, M.Sc.
3. Rezaldi Alief PRamadha, S.E., M.S.S.

**Cover dan Tata Letak:**

Naura A.

vi + 242, hal. 14,8 x 21 cm

ISBN: 978-623-7358-33-6

Cetakan Desember 2019

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

**Penerbit :**

CV. Buana Grafika

Jl. Seturan II No 128, Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta

081804172752

Dilarang mengutip atau memperbanyak  
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

# KATA SAMBUTAN

Program Studi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan menyambut gembira atas terbitnya buku yang berjudul Aplikasi Teori Perencanaan: Dari Konsep ke Realita.

Adapun penerbitan buku ini merupakan bagian dari tahapan proses pembelajaran inovatif yang diinisiasi dan difasilitasi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

Pembelajaran inovatif yang dirancang oleh Fisipol dan diimplementasikan oleh Prodi S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan merupakan ujicoba pengembangan terhadap mata kuliah yang diajarkan. Kegiatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan capaian pembelajaran yang dirumuskan serta menjadi pembelajaran yang menyenangkan.

Mata kuliah Teori Perencanaan adalah salah satu yang mengaplikasikan pembelajaran inovatif dengan serangkaian kegiatan seperti kuliah lapangan di Goa Pindul, Kabupaten Gunung Kidul; Talk Show; dan penerbitan buku dari serangkaian tugas paper yang dipresentasikan di kelas. Studi lapangan yang dilakukan untuk mendekatkan antara teori di kelas dengan praktik yang berlangsung di lapangan, diharapkan dapat semakin memperkaya pengetahuan yang diperoleh. Dilanjutkan dengan kegiatan Talk Show, para mahasiswa mendiskusikan persoalan yang terjadi pada objek kuliah lapangan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dalam tugas paper sebelumnya. Seluruh rangkaian talk show disiapkan oleh para mahasiswa baik pembicara, moderator maupun para pembahasnya. Penerbitan buku ini merupakan tahapan pendokumentasian paper

kelompok yang telah dipresentasikan di kelas untuk menjadi tambahan referensi kuliah teori Perencanaan yang akan datang.

Harapan dengan terbitnya buku ini, akan semakin menambah referensi pembelajaran teori Perencanaan yang diajarkan di Fisipol UGM.

Akhir kata, terima kasih kepada Tim editor yang telah menyusun dan menjadikan buku ini sebagai tambahan referensi mata kuliah Teori Perencanaan. Semoga terbitnya buku ini semakin memotivasi para mahasiswa dalam mendalami kuliah Teori Perencanaan yang diajarkan di PSdK maupun Fisipol UGM pada umumnya.

Ketua Program Studi S1 PSdK

# PENGANTAR EDITOR

Buku ini berisi tentang teori perencanaan yang membahas tentang konsep konsep dan implementasi. Tulisan dalam buku ini merupakan kumpulan dari tulisan para mahasiswa S1 PSdK yang mengambil mata kuliah teori perencanaan yang diasuh pada semester I 2019/2020. Seluruh tulisan tersebut dibagi ke dalam dua bagian yaitu teori perencanaan pembangunan dan isu lingkungan dalam teori perencanaan.

Pada bagian pertama, terdapat tulisan-tulisan yang disajikan membahas berbagai kasus perencanaan berdasarkan sudut pandang teori perencanaan.

Bagian kedua dari buku ini membahas kasus-kasus perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Orientasi pembangunan global saat ini telah bergeser ke arah pembangunan berwawasan lingkungan. Praktik pembangunan selama ini, yang didorong oleh revolusi industri terbukti banyak menurunkan kualitas lingkungan. Pada gilirannya, hal ini juga menjadi penyebab pemanasan global. Organisasi internasional dan pemimpin dunia kini gencar mempromosikan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan untuk anak cucu di masa depan.

Pembangunan berwawasan lingkungan dengan demikian turut berdampak pada aplikasi teori perencanaan. Bagian ini menyajikan karya tulis mahasiswa dari kelas Teori Perencanaan yang menyinggung berbagai isu lingkungan. Terdapat enam tulisan dalam bagian ini. Seluruh tulisan tersebut mempromosikan aplikasi

teori perencanaan dalam mewujudkan pembangunan ramah lingkungan. Substansi dari masing-masing tulisan di setiap bagian disajikan mulai paragraf berikut ini.

Pertama tulisan dari Annisa Nur Alimah dan kawan-kawan yang berjudul teori perencanaan *equity* dalam pembangunan daerah membahas tentang perencanaan pembangunan di Indonesia yang masih berorientasi apda pembangunan fisik, baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah. Melalui teori perencanaan equity diharapkan perencanaan pembangunan dapat memberikan keadilan pada semua pihak sehingga tidak ada yang dirugikan. Dalam teori *equity* menyebutkan bahwa orang dimotivasi untuk mencari ekuitas sosial dalam penghargaan yang mereka harapkan. Dalam perencanaan pembangunan teori equity menghendaki adanya partisipasi dari masyarakat, besarnya partisipasi dari masyarakat ikut andril dalam keberhasilan perencanaan pembangunan yang baik. Prinsip teori equity adalah orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung dari yang dirasakan oleh penerima program pembangunan.

Tulisan yang berikut Adinda Aulia Nur A dan kawan kawan yang berjudul penerapan teori perencanaan pada program “kotaku” menjelaskan bahwa perencanaan ktoa merupakan bagian dari perencanaan spasial yang memiliki empat jenjang pokok yaitu rencana umum tata ruang perkotaan, rencana umum tata ruang kota, rencana detail tata ruang kota, dan rencana teknik tata ruang kota. Perencanaan kota membutuhkan dua pendekatan yang mencakup the unitary approach dan adaptive approach. Penerapan teori perencanaan wilayah dibagi atas komponen komponen seperti eperencanaan fisik, perencanaan ekonomi makro, perencanaan sosial, dan perencanaan pembangunan. Program “Kotaku: (Kota Tanpa Kumuh) yang dilakukan kota semarang, jawa tengah merupakan salah satu bentuk penerapan perencanaan regional. Program kotaku ditujukan untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh, meningkatkan akses terhadap infrastruktur, dan pelayanan dasar

di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Berikutnya, tulisan Muhammad Ainul Yaqin dan kawan-kawan yang berjudul pembangunan desa wisata sebagai bentuk aplikatif dalam teori perencanaan mengungkapkan bahwa pembangunan desa wisata menjadi bentuk aplikatif dalam teori perencanaan. Perencanaan pembangunan yang dilakukan satu daerah pada intinya menyesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat sekitar serta potensi yang ada. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada dasarnya telah diatur dan disyaratkan dalam undang-undang. Melalui perencanaan baik pemerintah desa maupun masyarakat dapat menentukan arah pembangunan desa melalui serangkaian tahapan. Adapun tahapan itu adalah identifikasi permasalahan, kebutuhan, dan sumber daya yang ada di desa, penetapan tujuan bersama, perumusan strategi yang didasarkan pada prioritas kebutuhan dan ketersediaan sumber daya serta melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan melalui berbagai program pembangunan desa.

Tulisan Nandya Erlisa Galis dan kawan-kawan yang berjudul analisis keberhasilan implementasi model perencanaan desa wisata nglanggeran menjelaskan bahwa hardirnya desa wisata nglanggeran sebagai produk dari perencanaan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat sekitar. Perencanaan yang dilakukan secara mandiri melalui system desentralisasi dan model radikal di mana masyarakat dan masyarakat lokal secara mandiri melakukan reformasi terhadap sumber daya desa menghasilkan peningkatan secara signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Model perencanaan yang digunakan dianggap telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap system kelola yang baik.

Tulisan Anggoro Seto P dan kawan-kawan yang berjudul perencanaan: Mahasiswa Berprestasi menjelaskan bahwa aplikasi perencanaan menggunakan aplikasi SMART yang dikenalkan pertama oleh George T. Durrant pada tahun 1981. Pendekatan aplikasi



ini dianggap cocok karena di setiap akronim dari kata smart memiliki makna yang sesuai dengan tujuan. Metode SMART merupakan metode dalam penetapan tujuan agar sebuah objek dianggap valid dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kelebihan dari metode SMART adalah untuk mengkhususkan suatu objek agar lebih valid memberikan arahan yang jelas mengenai suatu tujuan.

Memasuki bagian kedua, terdapat tulisan mengenai Ruang Terbuka Hijau di Surabaya karya Adelia Ishartanti dkk. Perencanaan harus disusun berdasarkan teori perencanaan yang rasional dan komprehensif agar pengambil keputusan dapat mengambil keputusan yang paling baik dari berbagai alternative, sehingga tujuan, nilai, dan target dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya yang mencapai 21 persen telah berhasil menurunkan suhu rata rata dari 31 derajat celcius menjadi 29 derajat celcius. Penyediaan ruang terbuka hijau merupakan bentuk implementasi pembangunan yang berorientasi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Kemudian, proses produksi di sector pertanian yang semakin tergantung pada pupuk kimia membuat Berlian Indah Kusumaningrum dan kawan-kawan tergerak untuk menyusun gagasan pertanian organic di daerah karst Gunung Kidul. Pertanian orgaik yang ramah lingkungan disebut memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Namun demikian, pertanian organic ini masih belum banyak dilirik oleh petani di daerah Gunung Kidul karena kebiasaan menggunakan pupuk kimia. Melalui tulisan ini, Kusumaningrum dan kawan-kawan berdasarkan *Theory of Change* mengusulkan tahapan aplikasi pertanian organic melalui proses penumbuhan kesadaran, penumbuhan ketertarikan, evaluasi, uji coba, dan adopsi.

Tulisan berjudul Program Perencanaan: Revitalisasi Bekas Tambang Kapur Menjadi Daerah Objek Wisata ( Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta) karya Annisa Feli Surahya dan kawan-kawan membahas kolaborasi tenaga ahli dan masyarakat dalam pengembangan objek wisata

bekas tambang. Peran penting ahli geologi dan seniman dalam membentuk lahan bekas tambang menjadi sebuah objek wisata perlu ditindaklanjuti dengan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata secara berkelanjutan.

Tulisan berikutnya adalah Perencanaan Wilayah dengan Skema Forest City untuk Ibu Kota Baru Indonesia hasil pemikiran dari Cahya Mutia P. dan kawan-kawan. Rencana pemindahan ibukota negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur mendesak dilakukan mengingat daya tampung Jakarta pada berbagai aspek sudah tidak mencukupi. Di sisi lain, pemindahan ibukota juga menimbulkan kekhawatiran akan peningkatan deforestasi. Rencana pemerintah untuk menerapkan konsep forest city dalam pembangunan ibukota baru menjadi langkah konkrit pelestarian lingkungan. Cahya Mutia, dkk. membahas perencanaan pembangunan ibukota dengan konsep forest city melalui kaca mata teori perencanaan yang sesuai isu dan perencanaan yang baik. Pembangunan dengan konsep forest city yang modern, beautiful, sustainable, dan smart di Kalimantan Timur merupakan rencana pembangunan yang baik karena sesuai dengan kondisi lingkungan di Kalimantan Timur.

Melalu tulisan berjudul Rencana Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia, Damiana Vania Puspita dkk. menganalisis rencana pemindahan ibukota dan manfaatnya untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Menggunakan teori perencanaan synoptic, Puspita dan kawan-kawan menemukan bahwa rencana pemindahan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur dilakukan dengan melihat masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan. Lebih dalam pada itu, tulisan ini membahas rencana pemindahan ibukota dalam berbagai sudut pandang untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari pemindahan ibukota. Perbandingan kasus perpindahan ibukota yang dilakukan oleh Brazil dan pengembangan Kota Jakarta pada awal pendiriannya juga menjadi referensi pembangunan ibukota baru. Jangan sampai ibukota Republik Indonesia yang baru dikembangkan dengan pola

yang sama seperti Jakarta sehingga hanya akan memindahkan permasalahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Tulisan terakhir membahas aplikasi Teori Perencanaan Wilayah di Kota Yogyakarta melalui analisis terhadap RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) karya Destika Putri Ayushelita dkk. Disebutkan dalam tulisan ini bahwa perencanaan wilayah di Kota Yogyakarta perlu diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan ketimpangan ekonomi, lemahnya pengembangan ekonomi kreatif, kurangnya pembangunan bidang kesehatan, dan kesiapsiagaan bencana. Teori aglomerasi dapat menjadi alternative untuk mengatasi permasalahan tersebut. Integrasi kelompok usaha, sebagaimana disebutkan dalam teori aglomerasi, dapat memunculkan dan menarik usaha-usaha lain sehingga kesempatan usaha semakin luas selain juga memunculkan pusat-pusat layanan masyarakat di titik-titik aglomerasi tersebut.

# DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	iii
PENGANTAR EDITOR .....	v
DAFTAR ISI .....	xi

## TEORI PERENCANAAN EQUITY DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Disusun oleh:

Annisa Nur Alimah

Sintia Wahyu W

Angelica Kintani Sekar Rahina

Anggriani Mahdianingsih

Ilham Damar W .....1

## PENERAPAN TEORI PERENCANAAN PADA PROGRAM “KOTAKU”

Disusun oleh:

Adinda Aulia Nur A

Anisa Cahyaning Tyas

Khalis Nur Hanifah

Laila Rachmatika I

Viola D. Oceanio .....19

PEMBANGUNAN DESA WISATA SEBAGAI BENTUK  
APLIKATIF DALAM TEORI PERENCANAAN

Disusun Oleh :

Muhammad Ainul Yaqin

Fuad Rafif Prasetyo

Bintang Fajar Pamungkas

Ashlihul Hayati M S

Danang Giri Sadewa .....59

ANALISIS KEBERHASILAN IMPLEMENTASI  
MODEL PERENCANAAN DESA WISATA NGLANGGERAN

Disusun oleh:

Nandya Erlisa Galis

Ela Puji Hariani

I Kadek Pras Setiawan

Taufiq Noor Huda .....81

PERENCANAAN : MAHASISWA BERPRESTASI

Disusun oleh:

Anggoro Seto P

Shafry Zuhair Arifin

Lintang Febiana S

Leonardo Manullang

Rizki Vira Suyatmin .....99

RUANG TERBUKA HIJAU DI SURABAYA

Disusun oleh:

Adelia Ishartanti

Arini Meihati Nurismah

Rahmisutar

Khusnul fatimah

R. Fajrien Anastitania .....119

PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK  
DI PEDESAAN KARST, GUNUNG KIDUL, JOGJAKARTA

Disusun oleh :

Berlian Indah Kusumaningrum

Fiki Nafila

Ramadhani Tareq Kemal Pasha

Winda Winarni .....139

PPROGRAM PERENCANAAN: REVITALISASI BEKAS  
TAMBANG KAPUR MENJADI DAERAH OBJEK WISATA  
(DESA BEDOYO, KECAMATAN PONJONG,  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL, D.I YOGYAKARTA)

Disusun Oleh:

Annisa Feli Surahya

Desyana Setyarini

Rayi Nandhini .....157

PERENCANAAN WILAYAH DENGAN SKEMA  
**FOREST CITY** UNTUK IBU KOTA BARU INDONESIA

Disusun oleh:

Cahya Mutia P.

Nabilah Dzakiroh

Nadya Rahmi S.

Erina Virdaus .....181

RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA REPUBLIK INDONESIA

Disusun Oleh:

Damiana Vania Puspita

Safira Ramadhani

Giranda Septa Aji P

Laila Nur Assyifa .....199

TEORI PERENCANAAN WILAYAH KOTA  
YOGYAKARTA MELALUI RPJMD (RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH)

Disusun oleh:

Endah Suryanti

Oktaviana Farrah

Syarief Faizal Bachri .....219

# **BAGIAN I**





# TEORI PERENCANAAN EQUITY DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Disusun oleh:

Annisa Nur Alimah	17/409876/SP/27721
Sintia Wahyu W	17/409891/SP/27736
Angelica Kintani Sekar Rahina	17/414903/SP/28030
Anggriani Mahdianingsih	17/414904/SP/28031
Ilham Damar W	17/414909/SP/28036

## A. LATAR BELAKANG

Perencanaan awalnya, terutama di akhir abad ke-19 dan pasca perang dunia kedua, berfokus pada aspek desain lingkungan fisik dan disebut sebagai tahap *morphological conception of space* (Friedman, 1987). Seiring dengan waktu, perencanaan berkembang karena adanya kebutuhan manusia, sehingga perencanaan dibutuhkan manusia agar potensi kegagalan semakin kecil dalam usaha pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan manusia sangatlah kompleks, sehingga perencanaan menjadi ilmu yang tergolong multi disiplin, hal tersebut menyebabkan kecenderungan perencanaan dikaitkan dengan aspek yang luas seperti sosial-ekonomi-budaya. Pandangan luas mengenai perencanaan ini terjadi pada era tahun 60-an dan digambarkan oleh Taylor sebagai pergeseran besar menuju *sociological conception of space* (Taylor, 1998). Keluasan dari perencanaan yang sifatnya multidimensi ini, sering membuat perencana mengalami kesulitan dalam memutuskan dan memilih perencanaan yang paling efektif. Hal ini disinyalir oleh Friedman (2003) dimana adanya anggapan

bahwa teori perencanaan tidak ada gunanya dalam praktek, karena kurangnya pemahaman tentang teori perencanaan dan aspek multidimensional.

Healey (1997) menguraikan bahwa perencanaan di negara maju berkembang dari tiga tradisi besar, yaitu: perencanaan ekonomi, manajemen pembangunan fisik, dan manajemen administrasi publik dan analisis kebijakan. Dari tiga tradisi besar tersebut memperkuat pendapat bahwa dalam teori perencanaan mempunyai sifat multidisiplin karena menyangkut fokus kajian yang berbeda-beda. Sedangkan menurut Friedman (1987), ia menjelaskan bahwa praktek perencanaan awal pun, yaitu perencanaan aspek fisik lingkungan (Orthogonal Design), tetap berbasiskan pada ilmu kemasyarakatan yang telah berkembang matang dan diterima pada awal abad 19. Pendapat Healey dengan Friedman sangat berbeda dalam menjelaskan tentang sebuah perencanaan, Healey lebih menekankan sebuah multidisiplin dalam menjelaskan suatu perencanaan, sedangkan Friedman lebih kearah bahwa perencanaan menekankan berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan hidup, masyarakat. Terlepas dari penjelasan mereka yang berbeda sudut pandang satu sama lain, sebenarnya mereka sama-sama melihat bahwa perencanaan memiliki sifat multi disiplin.

Conyers et.al (1984) menjelaskan bahwa disiplin perencanaan di negara berkembang bergerak dari 2 tradisi: perencanaan fisik dan perencanaan pembangunan ekonomi, yang berkembang sendiri-sendiri. Menurut Masik (2005), terjadinya perkembangan yang sendiri-sendiri tersebut karena: pertama, negara berkembang mewarisi tradisi perencanaan dari Penjajah, yang pada masa itu memandang perencanaan fisik sebagai hal yang terpisah dari perencanaan pembangunan ekonomi. Kedua, setelah merdeka, kemakmuran ekonomi merupakan impian seluruh negara berkembang, dan pola perencanaan pembangunan sektoral I terpusat model Uni Soviet banyak diadopsi. Pada konteks Indonesia, Munir (2002) menyatakan bahwa fokus perhatian perencanaan masih

pada penyediaan dan penataan prasarana yang bersifat fisik, tetapi aspek sosial dan ekonomi masih kurang mendapatkan perhatian. Sehingga perbedaan perencanaan di negara maju dan berkembang menunjukkan adanya gap yang cukup signifikan, hingga dapat mempengaruhi hasil akhir dari perencanaan cenderung negara maju lebih baik daripada negara berkembang.

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa pada konteks di negara berkembang, sifat multidisiplin dari perencanaan masih hanya pada proses perencanaan pembangunan hanya berorientasi pada perencanaan pembangunan fisik tanpa melihat disiplin lain seperti ekonomi dan lingkungan, yang mengakibatkan hasil akhir di perencanaan tersebut tidak maksimal bermanfaat untuk masyarakat. Sedangkan perencanaan di negara maju, sifat multi disiplinnya sudah lebih tampak daripada negara berkembang, hanya saja karena sifatnya yang multidisiplin terkadang justru menjadi bumerang untuk para perencana dalam mengaplikasikan rencananya. Akhirnya perencana dituntut untuk memahami banyak hal atau harus bekerja sama dengan para perencana yang berbeda-beda fokus kajiannya.

Sedangkan Pembangunan adalah upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Dahuri dan Rokhmin, 2004.) Secara umum tujuan pembangunan adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil makmur (Indra dan Sri, 2017) Pembangunan merupakan proses untuk mewujudkan cita-cita bernegara yakni mewujudkan masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan GNP, tingginya pendapatan perkapita, tersedianya kesempatan kerja, rendahnya angka kemiskinan serta kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan daerah menempati posisi penting dalam pelaksanaan pembangunan yang sistematis. Pembangunan sektoral ditujukan untuk sasaran yang bersifat sektoral.

Pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai segi yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintahan. Dari segi sektoral pembangunan daerah merupakan pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan atau pembangunan sektoral seperti pertanian, industri, dan jasa yang dilaksanakan di daerah disesuaikan dengan potensinya. Dari segi pembangunan wilayah yang meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial-ekonomi dari wilayah tersebut. Desa dan kota saling terkait dan membentuk suatu sistem. Dari segi pemerintahan, pembangunan daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah di Indonesia memiliki dua aspek yaitu; (1) bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang dan (2) untuk lebih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif.

Pembangunan daerah dalam berbagai teori pembangunan disebut sebagai pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan daerah adalah mewujudkan pertumbuhan wilayah. Pandangan teori resource endowment dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumber daya itu (Sumodiningrat, 1999).

## **TEORI KEADILAN (EQUITY THEORY)**

Teori keadilan atau equity theory dikemukakan oleh John Stacey Adams, seorang psikolog kerja dan perilaku pada tahun 1963. Teori ini menunjukkan bagaimana upah dapat memotivasi. Individu dalam dunia kerja akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Apabila terdapat ketidakwajaran akan mempengaruhi tingkat usahanya untuk bekerja dengan baik. Perasaan ketidakadilan

mengakibatkan perubahan kinerja. Teori keadilan mengasumsikan bahwa kita menginginkan keadilan, yakni kita ingin merasa bahwa ketika kita dibandingkan dengan orang lain, kita diperlakukan secara adil dan organisasi tidak berpihak kepada siapapun. Teori ini mengatakan bahwa orang dimotivasi untuk mencari ekuitas sosial dalam penghargaan yang mereka harapkan dalam berkinerja.

Teori keadilan mempunyai empat asumsi dasar sebagai berikut:

1. Orang berusaha menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi keadilan.
2. Jika dirasakan adanya kondisi ketidakadilan, kondisi ini menimbulkan ketegangan yang memotivasi orang untuk menguranginya atau menghilangkannya.
3. Makin besar persepsi ketidakadilannya, makin besar memotivasi-nya untuk bertindak mengurangi kondisi ketegangan itu.
4. Orang akan mempeu/mrsepsikan ketidakadilan yang tidak menyenangkan (misalnya menerima gaji yang terlalu sedikit) lebih cepat daripada ketidakadilan yang menyenangkan (misalnya mendapat gaji yang terlalu besar).

Menurut teori ini elemen-elemen dari teori keadilan adalah sebagai berikut:

1. Input: berbagai hal yang dibawa dalam kerja seperti pendidikan, pengalaman, keterampilan. Input berarti segala sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai sumbangan terhadap pekerjaan.
2. Output: apa yang diperoleh dari kerja seperti gaji, fasilitas, jabatan. Output berarti segala sesuatu yang berharga dan dirasakan karyawan sebagai hasil dari pekerjaannya.
3. Comparison person: orang lain sebagai tempat pembandingan, sebagai contoh, karyawan dengan pendidikan sama, jabatan sama tetapi gaji yang diterima berbeda.

Menurut Howell & Dipboye (dalam Munandar, 2001) jika terjadi persepsi tentang ketidakadilan, menurut teori keadilan orang akan dapat melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. Bertindak mengubah masukannya, menambah atau mengurangi upayanya untuk bekerja.
2. Bertindak untuk mengubah hasil-keluarannya, ditingkatkan atau diturunkan.
3. Menggeliat/merusak secara kognitif masukan dan hasil keluarannya sendiri, mengubah persepsinya tentang perbandingan masukan dan hasil keluarannya sendiri.
4. Bertindak terhadap orang lain untuk mengubah masukan dan/ atau hasil keluarannya.
5. Secara fisik meninggalkan situasi, keluar dari pekerjaan.
6. Berhenti membandingkan masukan dan hasil keluaran dengan orang lain dan mengganti dengan acuan lain atau mencari orang lain untuk dibandingkan.

Perencanaan ekuitas merupakan perencanaan yang bertujuan untuk melakukan redistribusi sumber daya yang ada dengan paradigma pemerataan. Dalam melaksanakan perencanaan ini, perencana ekuitas harus mengikuti paradigma pemerataan dan partisipatori masyarakat. Paradigma perencanaan tidak hanya cukup dengan menggunakan paradigma pertumbuhan, karena permasalahan perencanaan pembangunan tidak hanya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi akan tetapi ada permasalahan lain yang muncul, dimana adanya ketidakmerataan akses sumber daya ekonomi di masyarakat. Dengan latar belakang permasalahan munculnya ketidakmerataan akses sumber daya ekonomi baik antar masyarakat, antara urban dengan rural maupun antar daerah. Di dalam melaksanakan perencanaan, perencanaan ekuitas berpandangan bahwa besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan mampu mengatasi permasalahan ketimpangan di masyarakat. Partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan sehingga permasalahan ketimpangan di masya-

rakat akan lebih mudah diatasi dengan kata lain para perencana ekuitas meyakini bahwa keberhasilan suatu perencanaan ekuitas tidak terlepas dari besar kecilnya partisipasi dari masyarakat.

## **PRINSIP EQUITY**

Prinsip Equity Theory adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung dari yang dirasakan oleh penerima program pembangunan. Kepuasan tersebut dilihat dari rasa adil (equity) atas suatu situasi yang diberikan olehnya. Perasaan equity dan inequity atas suatu situasi, diperoleh orang dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain sekitarnya. Menurut teori ini, terdapat elemen dari equity, yaitu (Kurnia, 2011):

- **Input**, segala sesuatu berharga yang dirasakan oleh penerima program yang turut disumbangkannya dalam perencanaan pembangunan. Seperti pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan waktu partisipasi
- **Outcomes**, sesuatu yang berharga yang didapatkan dari pembangunan yang diberikan kepadanya. Misalnya seperti peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan pembangunan infrastruktur.
- **Comparisons person**, orang-orang yang tergabung dalam pembangunan yang diberikan kepada penerima akan membandingkan dengan orang lain atau dirinya di masa lalu. Hal ini berarti anggota-anggota masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

Menurut teori Equity ini, setiap orang akan membandingkan rasio input-outcomes dirinya dengan rasio input-outcomes orang lain. Bila perbandingan dianggap cukup adil (equity), maka ia akan merasa puas. Bila perbandingan ini tidak seimbang tetapi menguntungkan, bisa menimbulkan kepuasan maupun tidak puas. Tetapi bila perbandingan itu tidak seimbang dan merugikan, akan timbul ketidakpuasan.



## CONTOH APLIKASI PERENCANAAN EQUITY

Berdasarkan pemaparan di atas, Perencanaan Equity sangat diperlukan dalam sebuah proses pembangunan. Dengan konsep keadilannya diharapkan dapat menekan terjadinya ketidakadilan atas pelaksanaan suatu perencanaan yang dilakukan. Dalam sebuah perencanaan pembangunan sering kali ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih sering ditemui adanya pihak yang dirugikan/mendapat ketidakadilan dan justru menimbulkan sebuah permasalahan baru. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya perencanaan pembangunan yang hanya ditujukan pada suatu kelompok tertentu tanpa memperhatikan kelompok lain yang dirugikan dan menggunakan perencanaan yang belum multidimensional. Bila sebuah perencanaan dilakukan tanpa mempertimbangkan salah satu aspek misalnya saja lingkungan, maka tak menutup kemungkinan lingkungan tersebut rusak dan berdampak buruk bagi kehidupan manusia kedepannya. Maka dari itu dalam teori perencanaan equity ini tidak hanya sekedar membahas mengenai pemerataan keadilan ekonomi semata, tetapi juga pada aspek sosial, politik dan lingkungan. Pada aspek ekonomi akan lebih banyak mengarah pada keuntungan dalam bentuk uang yang diperoleh. Sedangkan pada aspek sosial lebih mengarah pada kesejahteraan dari masyarakat tersebut. Pada aspek politik lebih memperhatikan aspirasi masyarakat bisa juga diartikan kesempatan berbicara untuk menyuarakan apa yang mereka butuhkan. Dan pada aspek lingkungan lebih melihat keberlanjutan dari perencanaan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan hakikat dari suatu perencanaan pada negara maju yang multi dimensional. Padahal sebenarnya perencanaan yang multidimensional ini tidak hanya dibutuhkan pada negara maju saja, negara berkembangpun sangat memerlukannya karena tetntunya akan lebih baik daripada hanya berfokus pada beberapa aspek saja. Ketika aspek multidimensional tersebut mengalami keseimbangan maka konsep perencanaan equity

pun akan tercapai, karena tidak hanya memberikan keadilan bagi sesama manusia atau kelompok baik secara sosial politik maupun ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan.

Ketika kita bicara mengenai pembangunan dalam perspektif perencanaan equity pasti tidak akan jauh dari kata ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Pembangunan dan ekonomi merupakan sesuatu yang berjalan bersamaan. Dengan adanya pembangunan diharapkan terjadi peningkatan perekonomian pada daerah tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu, tak jarang ada kelompok masyarakat yang dirugikan secara ekonomi dengan adanya pembangunan. Hal ini banyak terjadi pada kasus-kasus penggusuran yang ditujukan untuk membangun infrastruktur. Mulai dari uang ganti rugi yang tidak sesuai hingga penggusuran paksa yang dilakukan oleh aparat pernah dan mungkin masih terjadi di Indonesia. Masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang secara ekonomi mengalami ketidakadilan dengan adanya pembangunan dan tak jarang mereka melakukan perlawanan untuk menuntut hak-haknya. Situasi yang seperti ini tentunya tidak baik bagi pemerintah karena bisa menghambat proses pembangunan disertai masyarakat yang dirugikan secara materi. Maka dari itu dalam sebuah pembangunan perlu adanya keadilan dalam ekonomi, ini dimaksudkan agar semua kelompok masyarakat benar-benar bisa menerima dampak positif pembangunan dalam bidang ekonomi atau setidaknya mereka tidak dirugikan dengan adanya pembangunan tersebut. Misalnya saja pada pembangunan jalan tol, masyarakat sekitar dapat dilibatkan dalam pembangunannya dengan dia dapat turut serta dalam pembuatan jalan tol ataupun mereka memiliki lapak untuk berjualan di rest area.

Suatu pembangunan yang dilakukan juga diharapkan memberikan dampak pada aspek sosial kepada masyarakat seperti halnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam aspek sosial kesejahteraan tidak melulu membahas tentang ekonomi ataupun uang tetapi lebih mengarah pada kebutuhan dasar seperti akses

terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Akan tetapi karena jalan yang rusak dan terbatasnya infrastruktur tak jarang mereka mengalami kesulitan untuk mengaksesnya, maka dari itu diperlukan adanya pembangunan infrastruktur agar mereka memiliki kemudahan untuk layanan publik dan menghemat waktu dalam melakukan berbagai aktivitas di luar daerah. Dari pembangunan ini diharapkan semua pihak benar-benar bisa memanfaatkan dan menerima dampaknya. Seperti contohnya yang dulunya harus menempuh waktu 2 jam untuk pergi ke rumah sakit sekarang hanya membutuhkan waktu 30 menit saja maupun anak-anak yang dulunya pergi ke sekolah harus melewati sawah dan membutuhkan waktu 30 menit dengan dibangunnya jalan mereka tidak perlu melewati sawah dan perjalanan dapat ditempuh dalam waktu 15 menit saja. Belakangan ini pemerintah juga tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan tol baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa dengan harapan dapat mempermudah akses daerah-daerah pelosok sehingga pendistribusian ataupun aksesibilitas layanan publik dan lainnya menjadi lebih cepat. Jadi pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak hanya di Pulau Jawa mampu memberi gambaran bahwa pembangunan dengan perencanaan equity perlu dilakukan untuk membuat keadilan yang semestinya.

Untuk menciptakan pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak bagi semua kelompok masyarakat tentunya diperlukan informasi apa-apa saja yang dibutuhkan pada setiap daerah. Karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membuat mereka memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Ketika suatu pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh daerah tersebut maka kemungkinan besar pembangunan yang dilakukan tidak akan memberikan dampak yang signifikan dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Dalam pembangunan yang dilakukan dengan perencanaan equity, semuanya sama-sama memiliki tempat dan bisa mengemukakan

apa-apa saja yang daerah mereka butuhkan. Dengan kata lain, semua kelompok masyarakat sama-sama memiliki andil dalam sebuah pembangunan. Hal tersebut dapat dicapai ketika perwakilan setiap kelompok masyarakat pada daerah yang akan dibangun diajak duduk bersama dalam perencanaan pembangunan yang akan dilakukan dan mendengarkan keluhan-keluhan dan kebutuhan yang mereka perlukan, setelah itu barulah sebuah perencanaan pembangunan bisa dibuat. Misalnya saja ada sebuah pembangunan pada Kecamatan X yang terdiri dari Desa A, B dan C. Desa A merupakan desa yang terkenal sebagai desa wisata, sedangkan desa B merupakan desa yang paling miskin dan potensinya belum tergali dan desa C merupakan desa penghasil perkebunan terbaik di kecamatan tersebut. Dari kondisi tersebut menunjukkan bila perlu adanya perwakilan dari setiap desa agar pemerintah tahu apa yang mereka butuhkan sehingga mereka sama-sama bisa merasakan manfaat pembangunan yang dilakukan. Akan tetapi ketika pembangunan yang dilakukan tidak *equity* dalam politik maka tidak menutup kemungkinan terjadi pembangunan yang pukul rata pada semua desa tersebut dan mungkin hanya beberapa desa atau kelompok masyarakat saja yang akan merasakan manfaatnya, sedangkan sisanya tidak.

Lebih dari itu semua dan yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah pembangunan aspek lingkungan juga sangat perlu diperhatikan. Alasannya seringkali pembangunan yang dilakukan hanya berfokus pada manfaat yang akan diterima oleh masyarakat saja tanpa memperhatikan apakah hal tersebut akan merusak maupun merugikan lingkungan sekitar atau tidak. Tak jarang dalam pembangunan kelestarian lingkungan dikorbankan demi memberikan manfaat terhadap masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bila tidak adanya *equity* atau keadilan antara manusia dan lingkungan. Padahal ketika lingkungan secara terus menerus tidak mendapatkan keadilan, maka kedepannya akan berdampak buruk yang diterima baik bagi masyarakat di daerah tersebut ataupun masyarakat luas. Hal seperti ini banyak terjadi di daerah

perkotaan, contohnya saja alih guna lahan tanah resapan ataupun pertanian yang digunakan sebagai kawasan industri maupun perumahan menyebabkan rendahnya resapan air hujan yang akan menyebabkan banjir seperti yang hingga sekarang ini masih terjadi di Jakarta. Maka dari itu dalam pembangunan lingkungan juga sangat perlu untuk diperhatikan. Dalam hal ini bisa saja dilakukan tata kelola lahan dengan cara pemetaan, ada daerah-daerah tertentu yang bisa dibangun menjadi gedung-gedung dan ada daerah-daerah tertentu yang dijadikan sebagai ruang terbuka hijau untuk daerah resapan ataupun taman kota. Bila hal tersebut diterapkan maka akan tercapai equity bagi manusia maupun lingkungan dan masyarakat pun akan menerima manfaat lebih ketika kelestarian lingkungan terus terjaga.

Akan tetapi pada kenyataannya belum semua atau bahkan hanya beberapa saja perencanaan pembangunan yang dilakukan di Indonesia menggunakan perencanaan *equity*. Pada bulan Januari 2015 terjadi penggusuran Eks-Perumahan Batalyon Perhubungan di Gambir, Jakarta pusat. Dalam penggusuran tersebut untuk anggota yang masih aktif dipindahkan ke rumah dinas di lokasi lain sedangkan purnawirawan ataupun istrinya akan dipindahkan ke rumah saudaranya. Untuk uang kerohiman yang diberikan pun tidak sesuai dengan harapan, hanya 10 juta sampai 35 juta. Lokasi bekas penggusuran tersebut rencananya akan dibangun barak untuk prajurit. Dari kasus tersebut terlihat bila perencanaan yang dilakukan oleh pihak TNI merupakan perencanaan yang belum menerapkan perencanaan yang *equity*. Penggusuran yang dilakukan hanya akan mempercepat proses pembuatan barak untuk prajurit yang telah direncanakan. Sedangkan warga yang tergusur tidak mendapatkan tempat tinggal baru sebagai pengganti dan uang kerohiman sedikit yang bahkan tidak bisa digunakan untuk membeli tempat tinggal baru. Walaupun beberapa ada yang dipindahkan ke lokasi lain karena masih terhitung anggota aktif, akan tetapi sebagian besar merupakan non anggota aktif yang dipulangkan ke rumah

saudaranya. Bagi anggota aktif tentunya hal tersebut tidak menjadi masalah besar karena selain dipindahkan mereka juga mendapat ganti rugi. Akan tetapi untuk purnawirawan maupun istrinya dengan uang ganti rugi yang sedikit dan sudah tidak lagi memiliki saudara ataupun saudaranya tidak mau menerimanya tentunya akan menjadi sebuah masalah. Para purnawirawan maupun istrinya yang terkena penggusuran ini usianya rata-rata sudah di atas 65 tahun, hal tersebut membuat mereka tergolong kedalam kelompok lansia (> 65 tahun). Terlebih lagi ada beberapa rumah yang hanya ditinggali oleh istri dari purnawirawan. Pada usia lansia apalagi seorang wanita termasuk kedalam kelompok rentan, karena mereka berkemungkinan mengalami kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar maupun layanan publik. Ketika digusur dan tidak ada tujuan (tidak memiliki saudara ataupun tidak diterima saudara) tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi gelandangan karena mengingat sedikitnya uang kerohiman yang diberikan dan tidak adanya rumah pengganti. Kondisi ini pun dapat menyumbang angka kemiskinan yang ada di Jakarta dan pada kondisi yang mendesak tidak menutup kemungkinan orang tersebut menjadi target kejahatan ataupun gangguan kesehatan karena tidak adanya tempat tinggal yang memadai.

Berbeda halnya dengan penggusuran yang disebut sebagai relokasi selama masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada masa pemerintahannya ia beberapa kali telah melakukan relokasi warga yang tinggal di pemukiman kumuh ke rusun-rusun yang telah disediakan, salah contohnya adalah penggusuran di Kampung Pulo. Tahun 2015 yang lalu Pemprov DKI melakukan relokasi warga Kampung Pulo untuk menertibkan bantaran sungai guna mengembalikan keberfungsian dan mempercantik kawasan tersebut. Sedangkan para warga yang tergusur dipindahkan ke rusun yang berjarak 1 km dari lokasi tersebut. Warga yang terkena relokasi tidak hanya mendapatkan rusun yang layak sebagai tempat tinggal, tetapi rusun tersebut telah dilengkapi dengan

fasilitas-fasilitas yang memadai. Mereka juga mendapatkan tunjangan sosial, transportasi berupa bus Transjakarta gratis, pendidikan dengan diberikannya KJP, kesehatan, dan ekonomi berupa pemberian modal dan lapak dagangan. Dapat kita lihat bila perencanaan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian bagi kelompok atau individu manapun karena dilakukan dengan berdasarkan asumsi dasar *equity* yaitu orang berusaha menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi keadilan. Dalam kasus ini Pemprov DKI Jakarta berusaha menciptakan keadilan dengan memberikan tempat relokasi dan fasilitas-fasilitas pendukung untuk pemenuhan kebutuhan dasar para warga yang tergusur, di samping itu mereka juga melakukan pembenahan atas lahan bekas gusuran menjadi fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas.

## KESIMPULAN

Perencanaan suatu negara yang baik adalah bersifat multidisiplin mencakup perencanaan ekonomi, manajemen pembangunan fisik, dan manajemen administrasi publik dan analisis kebijakan. Terdapat perbedaan perencanaan antara negara maju dengan negara berkembang, proses perencanaan pembangunan berkembang hanya berorientasi pada perencanaan pembangunan fisik tanpa melihat dimensi lain sedangkan pada negara maju sifat multi disiplinnya sudah lebih tampak dari negara berkembang. Akan tetapi sifatnya yang multidisiplin terkadang menjadi boomerang untuk para perencana dalam mengaplikasikan rencananya. Hal yang kita ketahui secara umum ketika ada sebuah perencanaan maka akan menimbulkan terjadinya sebuah pembangunan, tak terkecuali dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah menempati posisi penting dalam pelaksanaan pembangunan yang sistematis. Pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai segi yaitu pembangunan sektoral, pembangunan wilayah, dan pembangunan pemerintahan. Pembangunan merupakan proses untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang sejahtera adil dan merata.

Dalam Teori Keadilan (*Equity*) mengatakan bahwa orang dimotivasi untuk mencari ekuitas sosial dalam penghargaan yang mereka harapkan dalam berkinerja. Dalam perencanaan pembangunan teori keadilan menghendaki adanya partisipasi dari masyarakat, besarnya partisipasi dari masyarakat ikut andil dalam keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan yang baik. Prinsip Equity Theory adalah bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung dari yang dirasakan oleh penerima program pembangunan. Kepuasan tersebut dilihat dari rasa adil suatu program yang diberikan olehnya. Perencanaan pembangunan di Indonesia masih banyak yang belum bersifat equity salah satu contohnya terjadi pada tahun 2015 dalam penggusuran Eks-Perumahan Batalyon Perhubungan di Gambir, Jakarta pusat. Namun demikian sudah terdapat beberapa perencanaan pembangunan yang bersifat equity seperti yang terjadi pada pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pada relokasi warga bekas gusuran yang benar-benar diperhatikan dan dipenuhi kebutuhan dasarnya mulai dari hunian, tunjangan sosial, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagai negara berkembang perencanaan pembangunan di Indonesia masih berorientasi pada pembangunan fisik saja. Baik pembangunan pada tingkat nasional maupun pada pembangunan tingkat daerah. Melalui Teori Perencanaan Keadilan (*Equity*) diharapkan sebuah perencanaan pembangunan dapat memberi keadilan pada semua pihak sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Akan tetapi belum semua perencanaan pembangunan di Indonesia bersifat equity, hanya beberapa atau sebagian kecil saja yang bersifat equity.

## **SARAN**

Perencanaan pembangunan suatu negara baik taraf nasional dan daerah harus menerapkan prinsip Equity (keadilan) sehingga perencanaan pembangunan dapat bersifat multidisiplin yang



berorientasi dalam segala aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan agar berjalan secara maksimal dapat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam pengambilan keputusan perlu perencanaan yang matang dan mendalam dalam menetapkan Rencana Jangka Panjang dan Menengah Nasional serta Daerah, sehingga kasus seperti terlantarnya korban penggusuran Eks-Perumahan Batalyon Perhubungan di Gambir, Jakarta pusat pada tahun 2015 tidak terjadi lagi di lain waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. S. (1963). Toward An Understanding of Inequity. *Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(5), 422-436.
- Adams, J.S. (1965). Inequity in Social Exchange. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2, 267-299.
- Dahuri, Iwan Nugroho dan Rokhmin. 2004. *PEMBANGUNAN WILAYAH PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN*. Jakarta: LP3S.
- Dariyanto, E., 2015. Relokasi Kampung Pulo: Digagas Jokowi, 'Dieksekusi' Ahok. [Online] Available at: <https://news.detik.com/berita/2999480/relokasi-kampung-pulo-digagas-jokowi-dieksekusi-ahok> [Accessed 27 Oktober 2019].
- Fauzi, G., 2015. Menteri Ferry Sebut Relokasi Kampung Pulo untuk Tata Jakarta. [Online] Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150821170652-20-73648/menteri-ferry-sebut-relokasi-kampung-pulo-untuk-tata-jakarta> [Accessed 27 Oktober 2019].
- Friedman John, 2003, *Why Do Planning Theory?*, *Planning Theory* vol. 2(1): 7-10, Sage Publications, London.
- Friedman, John, 1987, *Planning in The Public Domain*, Princeton University Press, Oxford.
- Indra, Ali Kabul Mahi dan Sri. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Karisma Putra Utama.

- Januardy, Alldo Fellix dan Nadya Demadeviana. 2016. "Atas Nama Pembangunan Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015". Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Kurnia, Andiny P. 2011. Hubungan Kepuasan Kerja terhadap Disiplin Kerja pada PD. Neo Expo Promosindo. Skripsi, Universitas Widyatama.
- Liputan6, 2017. Ahok Lakukan Relokasi, Bukan Penggusuran. [Online] Available at: <https://www.liputan6.com/news/read/2879565/ahok-lakukan-relokasi-bukan-penggusuran> [Accessed 27 Oktober 2019].
- Masik, Agustomi. 2005. Hubungan Modal Sosial dan Perencanaan. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* Vol.16 No, 3 1-23.
- Munandar, A. S. 2001. Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta: UI Press.
- Munir, Risfan, 2002, Merencana di Tengah Jerat Hutang, dalam Winarso, 2002, Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam Era Transformasi di Indonesia, Departemen Teknik Planologi, ITB, Bandung.
- Patsy Healey, 1997, Collaborative Planning Shaping Places in Fragmented Societies, Macmillan Press Ltd, London.
- Ridwansyah, 2015. TNI Gusur Lahan Miliknya di Gambir. [Online] Available at: <https://metro.sindonews.com/read/946960/31/tni-gusur-lahan-miliknya-di-gambir-1420556683> [Accessed 27 Oktober 2019].
- Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi Struktur, Desain & Aplikasi. Jakarta: Arcen.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. "Pembangunan Daerah Dan Pengembangan Kecamatan (Dalam Prespektif Teori dan Implementasi)." *Jurnal PWK* Vol 10 No, 3 146-148.
- Taylor, Nigel, 1998, Urban Planning Theory Since 1945, Sage Publications, London.



# PENERAPAN TEORI PERENCANAAN PADA PROGRAM “KOTAKU”

Disusun oleh:

Adinda Aulia Nur A	17/409873/SP/27718
Anisa Cahyaning Tyas	17/413183/SP/27900
Khalis Nur Hanifah	17/414911/SP/28038
Laila Rachmatika I	17/413195/SP/27912
Viola D. Oceanio	17/414921/SP/28048

## **Pendahuluan**

### **Latar Belakang**

Dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pasti memerlukan sebuah perencanaan. Perencanaan merupakan aspek terpenting dalam melakukan setiap kegiatan karena adanya perencanaan menunjukkan hal apa saja yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Perencanaan menurut Suandy (2001) adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi, taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Perencanaan dilakukan agar sebuah pembangunan memiliki arah dan berada pada jalurnya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, perencanaan juga menjadi alat pengukur seberapa jauh implementasi perencanaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Setiap perencanaan perlu dibuat dengan baik dan detail serta memperhatikan seluruh aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan lingkungan. Dengan memperhatikan

aspek-aspek kehidupan diharapkan agar perencanaan disusun tidak tumpang tindih dengan perencanaan lainnya.

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam suatu pembangunan. Tahapan perencanaan pembangunan merupakan hal yang terkait dengan aspek ruang dan waktu. Keterkaitan waktu dilihat dari jadwal perencanaan, kesinambungan dan jangka waktu rencana baik itu pendek, menengah dan panjang. Dalam melakukan pembangunan terdapat tiga pendekatan utama yaitu pembangunan makro, pembangunan sektor dan regional. Hal ini mencakup aspek cakupan ruang yang masuk dalam ranah pembangunan. Dalam rangka merencanakan penataan wilayah dibutuhkan perencanaan spasial yang mengatur mengenai perumahan, transportasi dan pelayanan sosial yang berkeadilan sosial dan inklusif. Pembangunan wilayah membutuhkan perencanaan spasial dalam menentukan bagaimana penataan sebuah wilayah agar proporsional dan akses wilayah yang terjangkau dengan mempertimbangkan tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Perencanaan spasial merupakan visi nasional, tujuan, program, kebijakan mengenai penempatan manusia dalam berbagai skala spasial (Acheampong, 2018). Perencanaan spasial mengacu pada aktivitas, proses yang mencakup tentang *land use planning*, *physical planning*, *urban planning*, *town and country planning*, dan *regional planning*.

Salah satu perencanaan spasial adalah perencanaan wilayah yang merupakan perencanaan yang mencakup aspek ruang dengan mempertajam fokus daerah pembangunan dalam kota atau provinsi. Perencanaan wilayah dapat tercermin salah satunya dari perencanaan tata ruang sebagai wujud struktur dan pola ruang lingkungan fisik yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung. Salah satu penerapan perencanaan wilayah adalah program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah, dimana program ini mengatur tata ruang kota agar terlihat menarik terutama di daerah pinggir kota.

Program KOTAKU merupakan program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemukiman kumuh dan pencegahan timbulnya kumuh baru yang mulai di inisiasi pada tahun 2016. Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 menfokuskan pada pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penangangan kualitas pemukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya pemukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017). Dalam membentuk program ini, pemerintah membutuhkan perencanaan yang mendukung tujuan yang akan dicapai seperti yang tertera diatas. Program yang dibuat secara Top Down ini menysasar pada kota yang memiliki tingkat kekumuhan yang masih tinggi. Sehingga dengan mengambil program ini dapat menggambarkan perencanaan aplikatif dari perencanaan wilayah melalui penataan tata ruang kota.

## **Pembahasan**

### **Teori Perencanaan Wilayah**

Teori perencanaan telah berkembang sejak lama dan mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu. Sedangkan untuk perencanaan sendiri, sejak Patrick Geddes dikutip dalam Rafita (2016) mencetuskannya untuk pertama kali hingga saat ini telah mengalami banyak perubahan. Teori perencanaan mulai berkembang pesat setelah revolusi industri yang mengakibatkan adanya kemunduran kota. Adanya revolusi industri tersebut yang membuat kebutuhan buruh di perkotaan semakin meningkat, dengan begitu akan terjadi degradasi lingkungan yang membuat pakar kota menginginkan suatu reformasi. Revolusi industri sendiri telah menciptakan perubahan yaitu dengan adanya kota-kota industri yang mengakibatkan perpindahan penduduk dari daerah pertanian ke daerah industri. Berpindahnya penduduk dari desa ke kota yang tidak memiliki pengetahuan tentang kehidupan kota inilah

yang akan menyebabkan perubahan tatanan kota. Untuk itu, mulai muncul gagasan dari Patrick Geddes tentang analisa terperinci dari pola pemukiman dan lingkungan ekonomi lokal yang merupakan awal dari berkembangnya teori perencanaan.

Teori-teori perencanaan yang menjadi dasar bagi perencana untuk menyusun sebuah perencanaan adalah:

a. *Functional Theories*

Teori yang dikembangkan berdasarkan pemikiran si perencana, dengan lebih mengarah pada target oriented planning berdasarkan dugaan-dugaan, sehingga produk yang dihasilkan dari teori ini bersifat top-down.

b. *Behavioural Theories*

Teori yang dikembangkan berdasarkan fenomena kebiasaan melalui gejala empiris yang lebih mengarah pada trend oriented planning, sehingga produk yang dihasilkan dari teori ini bersifat bottom-up.

Di Indonesia, saat ini sedang digencarkan mengenai perencanaan wilayah dan kota yang diwujudkan dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota, yang seharusnya memenuhi beberapa hal berikut:

- a. Perencanaan tata ruang merupakan proses terpadu (bukan produk akhir berhaga mati)
- b. Perencanaan tata ruang yang menyeluruh dan terpadu mencakup: perencanaan fisik-spasial, perencanaan komunitas, perencanaan sumber daya.
- c. Perencanaan tata ruang dilakukan berdasarkan kepentingan masyarakat.
- d. Perencanaan tata ruang dilakukan dengan berlandaskan pertimbangan sumber daya yang tersedia.
- e. Rencana tata ruang yang akan disusun merupakan rencana yang diperkirakan dapat diwujudkan.

Dari berbagai teori perencanaan yang ada, terdapat salah satu teori yang erat kaitannya dengan penataan wilayah dan kota yaitu teori Archibugi yang memaparkan mengenai penerapan komponen perencanaan wilayah. Menurut Archibugi dalam Oktovaney (2014) penerapan teori perencanaan wilayah dibagi atas 3 komponen, yaitu:

a. Perencanaan fisik

Perencanaan fisik adalah yang pertama kali dilahirkan sebagai bidang kegiatan. Hal tersebut muncul dari kebutuhan untuk merencanakan pembangunan fisik kota. Dahulu, perencanaan kota dikenal dengan seni membangun kota. Sulit dibayangkan alasan lain yang dikembangkan perencanaan kota pada dekade awal abad tersebut sebagai bentuk arsitektur.

Perencanaan fisik diperluas untuk mencakup daerah-daerah non perkotaan dengan maksud melihat perkembangan kota dan desa secara keseluruhan. Saat ini, area perencanaan fisik telah menyebar untuk memasuki lingkungan secara umum, sehingga menimbulkan hal yang sering disebut yaitu perencanaan lingkungan.

Perencanaan yang perlu dilakukan untuk merencanakan secara fisik pengembangan wilayah. Perencanaan ini mengarah pada pengaturan bentuk fisik kota dengan jaringan infrastruktur kota menghubungkan antara beberapa titik simpul aktivitas. Dalam perkembangannya teori ini memasukan kajian mengenai lingkungan. Produk yang dihasilkan dapat berbentuk master plan yang terdiri dari tata ruang, lokasi tempat tinggal, aglomerasi, dan penggunaan lahan

b. Perencanaan ekonomi makro

Perencanaan ini erat kaitannya dengan perencanaan ekonomi wilayah. Beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam ekonomi wilayah adalah pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan, distribusi pendapatan, tenaga kerja, produktivitas, perdagangan, konsumsi dan



investasi. Produk yang dihasilkan dari Perencanaan ini adalah kebijakan bidang aksesibilitas lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan tabungan.

c. Perencanaan sosial

Perencanaan sosial membahas mengenai pendidikan, kesehatan, integritas sosia, kondisi tempat tinggal dan tempat kerja, wanita, anak-anak, dan masalah kriminal. Perencanaan sosial mengarah pada pembuatan perencanaan yang menjadi dasar program pembangunan sosial di daerah. Produk yang dihasilkan dari perencanaan ini adalah kebijakan demografis.

d. Perencanaan pembangunan

Perencanaan ini erat kaitannya dengan perencanaan program pembangunan secara komprehensif guna mencapai tujuan pengembangan wilayah.

Jika dilihat dari program KOTAKU, perencanaan fisik diimplementasikan melalui pembenahan kawasan kumuh yang diubahmenjadikawasan yang lebih bersih. Program yang dicanangkan oleh pemerintah ini diberikan dalam bentuk perencanaan fisik yang dapat dilihat dari bagaimana pemerintah menghilangkan julukan sebagai kawasan kumuh menjadi lingkungan yang tertata yang dibuat menjadi kawasan wisata sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berjalan.

Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan ekonomi makro, dengan menjadikan program KOTAKU ini yang mengubah menjadi kawasan wisata akan membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran bagi masyarakat sekitar dan dapat menambah pendapatan. Dengan menjadikan sebagai kawasan wisata, banyak peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya sebagai wirausaha seperti membuka toko kelontong, menjadi tukang parkir, dapat pula menjadi tour guide. Namun, dengan perubahan kawasan kumuh menjadi kawasan wisata dengan program KOTAKU ini perlu adanya inovasi-inovasi yang harus

dikembangkan sehingga para wisatawan akan terus berkunjung ke kawasan tersebut.

Dilihat dari pandangan perencanaan sosial, pembahasan mengenai persoalan kesehatan. Jika terdapat perubahan yang semula kawasan kumuh yang diubah melalui program KOTAKU, akan menurunkan persoalan kesehatan di kawasan tersebut. Dengan diubah menjadi kawasan yang memiliki lingkungan tertata dan bersih, masyarakat akan memiliki rasa kepemilikan terhadap lingkungannya sehingga akan turut menjaga, dengan begitu akan mengurangi penyakit atau persoalan kesehatan di lingkungan tersebut. Dapat dicontohkan seperti, perubahan pola hidup sehat dalam masyarakat yang sudah membuang sampah pada tempatnya tidak lagi di aliran sungai. Selain itu berubahnya kawasan kumuh juga menjadikan kawasan tersebut lebih ramah anak, sehingga anak-anak memiliki kebebasan untuk bermain. Dengan melihat dari berbagai persepektif tersebut, pemerintah juga dapat melihat adanya perubahan di kawasan tersebut sehingga memiliki arsip yang dibuat dalam bentuk demografi terhadap daerah tersebut.

Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, program KOTAKU ini dibuat dengan salah satu tujuan yaitu pengembangan wilayah, tidak hanya disatu kawasan kumuh saja namun juga akan berkembang di kawasan kumuh lainnya. Sehingga dengan perencanaan pembangunan, kawasan kota yang terlihat kumuh akan berubah menjadi lebih nyaman untuk dipandang, serta akan merubah pula pola kehidupan dalam masyarakat.

## **Teori Perencanaan Aplikatif**

Proses pembangunan tidak terlepas dari suatu perencanaan. Dalam melakukan pembangunan, perencanaan menjadi tahap krusial untuk mencapai tujuan dari pembangunan. Perencanaan yang dilakukan dapat berangkat pada permasalahan atau kebutuhan yang ada.

Salah satu perencanaan pembangunan berdasarkan jangkauannya adalah perencanaan spasial atau tata ruang. Dengan mengacu

teori perencanaan spasial, perencanaan tata ruang wilayah dan kota yang meliputi perencanaan kota menjadi relevan untuk dibahas.

Penerapan perencanaan wilayah di Indonesia salah satunya adalah program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh). Program ini mengatur tata ruang kota agar terlihat menarik terutama di daerah pinggir kota. KOTAKU merupakan program untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Salah satunya diterapkan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Secara umum program KOTAKU ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Berangkat dari kenaikan laju pertumbuhan penduduk yang memiliki dampak tinggi pada kebutuhan primer seperti kebutuhan tempat tinggal. Sehingga dapat menimbulkan permukiman kumuh. Maka, kehadiran program KOTAKU dapat menghadirkan pemukiman kota yang layak huni.

Tujuan program KOTAKU dicapai dengan tercapainya tujuan berikut:

- a. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha.
- b. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan baik
- c. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- d. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
- e. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Perencanaan penanganan daerah kumuh melalui KOTAKU dilakukan dengan beberapa tahapan. Perencanaan ini dimulai dengan persiapan dari pemerintah pusat. Persiapan ini terdiri dari advokasi dan sosialisasi program/kegiatan, penentuan kabupaten/kota sasaran, dan pengembangan kebijakan dan penguatan kelembagaan. Selanjutnya di tingkat kabupaten/kota dilakukan persiapan yaitu dengan penyepakatan MoU antara pemerintah pusat dengan daerah, lokakarya sosialisasi kabupaten/kota, penggalangan komitmen para pemangku kepentingan, pembentukan atau penguatan Pokja Penanganan Pemukiman Kumuh, dan komitmen penyusunan dokumen RP2KP-KP.

Langkah yang dilakukan setelah persiapan adalah perencanaan. Perencanaan ini meliputi persiapan perencanaan, penyusunan RP2KP-KP & RPLP, dan penyusunan rencana detail atau teknis.

Ketiga, penganggaran di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota, penyusunan DED, pelelangan, konstruksi, dan supervise kegiatan, dan sosialisasi, edukasi, pelatihan terkait pemberlakuan aturan bersama atau aturan lainnya untuk pencegahan kumuh dan rencana O & P.

Terakhir, upaya keberlanjutan dilakukan dengan penyusunan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan untuk penganggaran dan operasional dan pemeliharaan, pengelolaan *database* dan mekanisme pemantauan pelaksanaan program, serta kegiatan *monitoring* yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi dan GIS yang berbasis *website*. Dalam melakukan tahap evaluasi mengacu pada *baseline* data, hasil *monitoring* dan survei khusus untuk studi evaluasi agar memberikan gambaran pencapaian serta rekomendasi sebelum masuk ke siklus selanjutnya. Semua tahapan dalam proses perencanaan KOTAKU dilakukan secara terpadu.

Semua proses perencanaan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang menjamin warga negaranya untuk dapat tinggal di sebuah hunian dengan lingkungan yang layak. Hal ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat.

Aplikasi program KOTAKU di Kota Semarang, Jawa Tengah dapat dilihat dari salah satu daerah yang menjadi lokasi pilihan yaitu di Semarang Timur. Pengaplikasian program ke daerah tersebut mengaplikasikan prinsip-prinsip KOTAKU yaitu:

- a. Pemerintah daerah sebagai Nahkoda. Pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh.
- b. Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program). Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/ kota.
- c. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Rencana penanganan kumuh merupakan produk Pemda sehingga mengacu pada visi kabupaten/ kota dalam RPJMD.
- d. Partisipatif. Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*).
- e. Kreatif dan inovatif. Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kumuh.
- f. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*).
- g. Investasi penanganan kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.

Proses perencanaan KOTAKU dalam perumusan program telah memenuhi hal yang harus dipenuhi dalam perencanaan wilayah dan kota antara lain adalah sebuah proses perencanaan secara terpadu,

menyeluruh dan terpadu meliputi aspek perencanaan fisik-spasial, perencanaan komunitas, dan perencanaan sumber daya. Dalam proses ini juga didasarkan pada kepentingan masyarakat dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Selain itu, KOTAKU merupakan sebuah perencanaan tata ruang wilayah dan kota yang dapat diwujudkan. Terbukti dengan keberhasilan daerah-daerah yang mengaplikasikan konsep KOTAKU.

### **Perencanaan Topik yang Dipilih**

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari sebuah perencanaan. Setiap aktivitas yang dilakukan diawali dengan langkah perencanaan terlebih dahulu. Dengan begitu, perencanaan adalah penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (M.Nur, 2009). Diana Conyers dan Peter Hills dalam Harahap (2005) menyatakan juga bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, atau pilihan-pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang. Oleh karena itu, definisi perencanaan mencakup segitiga sistem nilai, ruang, aktivitas, dan norma yang dikaitkan dengan *monotony* dan *chaotic* (Harahap, 2005) (Gambar 1.1).

Perencanaan pada dasarnya mengacu prinsip pengalokasian sumber daya yang tersedia bagi kebutuhan beragam dengan wilayah cakupan (*scope*), kewenangan, dan areal sebagai faktor utama dalam perencanaan (Prawiranegara, 2014). Dengan demikian, istilah perencanaan memiliki jenis yang berbeda-beda salah satunya berdasarkan jangkauan dan hierarki spasial, mencakup perencanaan nasional (berskala nasional), perencanaan regional/wilayah (berskala daerah), perencanaan kota, dan perencanaan tata ruang/tata tanah (pemanfaatan fungsi kawasan tertentu) (Prawiranegara, 2014). Keempat jenis di atas, merupakan ragam perencanaan yang masuk dalam ruang lingkup perencanaan spasial (tata ruang)

(Harahap, 2005). Dalam ruang lingkup tersebut, disimpulkan bahwa perencanaan spasial terdiri dari perencanaan (tata ruang) kota/RUTRK dan perencanaan (tata ruang) wilayah/RTRWN.

Mengacu pemaparan sebelumnya, tulisan ini berfokus pada topik perencanaan tata ruang wilayah dan kota dalam konteks perencanaan wilayah dan perencanaan kota. Perencanaan wilayah merupakan penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk wilayah tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (M.Nur, 2009). Sehingga ruang lingkup perencanaan wilayah terdiri dari unsur formulasi wilayah dan tujuan umum, teknik-teknik desain (pemetaan), formulasi rencana, dan teknik pengambilan keputusan (Harahap, 2005) (Tabel 1.1). Guna mengetahui perencanaan wilayah secara menyeluruh dibutuhkan pendekatan yang meliputi : Pendekatan sektoral (Pendekatan berdasarkan sektor-sektor kegiatan di wilayah) dan Pendekatan regional (Pendekatan yang melihat pemanfaatan ruang dan interaksi berbagai kegiatan di wilayah) (M.Nur, 2009).

Secara faktual, perencanaan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi baik mikro (berkaitan dengan pembangunan proyek) maupun makro (berkaitan dengan proyek dan induk program). Salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi adalah urbanisasi (bentuk masalah makro). Urbanisasi merupakan masalah wilayah yang berhubungan dengan konteks spasial dalam hal ini desa-kota. Keterkaitan permasalahan tersebut, menyimpulkan adanya hubungan antara wilayah dan kota. Kota merupakan wilayah yang secara administratif dibatasi oleh batas administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan (Daluarti, 2009). Sedangkan wilayah merupakan bagian terbesar daerah yang ditempati kota (Gambar 1.2 dan 1.3). Oleh karenanya, terdapat hubungan antara wilayah dengan kota yang tergambar dalam sistem kota-kota dan wilayah. Sistem kota-kota merupakan hubungan antar kota dalam wilayah yang terbentuk dari mobilitas input dan output dari elemen-elemen penyusun aktivitas (Harahap, 2005) (Gambar 1.4). Mobilitas input bergerak menuju ke kota-kota

berskala tinggi sedangkan mobilitas output bergerak keluar karena kota-kota berskala tinggi tidak mampu lagi mendukung seluruh aktivitas yang muncul dalam bentuk *spread effects* (Harahap, 2005).

Maka dari itu, pembahasan perencanaan wilayah akan terkait dengan perencanaan kota. Perencanaan kota merupakan perencanaan fisik yang terpadu, artinya mencakup aspek-aspek kompleks seperti sosial-budaya, ekonomi, dan politik dalam satu kesatuan wilayah fisik (ruang kota) (Wikantiyoso, 2004). Dalam melakukan perencanaan kota, dibutuhkan dua pendekatan yang mencakup : *The Unitary Approach*, membuat gambaran pola lingkungan fisik yang ada atau untuk masa depan dan *Adaptive Approach*, jalinan kompleks dari berbagai macam bagian yang saling bergantung secara fungsional (Wikantiyoso, 2004).

Berkaitan dengan ragam perencanaan, perencanaan kota merupakan bagian dari perencanaan spasial yang memiliki empat jenjang pokok yaitu : (Wikantiyoso, 2004)

1. RUTRP (Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan), meliputi kebijaksanaan umum strategi pembangunan.
2. RUTRK (Rencana Umum Tata Ruang Kota), meliputi pembentukan usulan pembangunan menyeluruh untuk program jangka panjang.
3. RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota), berkaitan dengan pembentukan rencana *zoning* (kawasan fungsional).
4. RTTRK (Rencana Teknik Tata Ruang Kota), berkaitan dengan pengaturan tata letak bangunan, sarana prasarana, dan kawasan spesifik.

Basis teori aplikatif yang mengarah pada perencanaan tata ruang wilayah dan kota, menghasilkan pembahasan utama dalam *scope* perencanaan kota. Dimana basis aplikatif didasarkan pada pemahaman bentuk dan struktur kota sebagai landasan pengaplikasian teori. Bentuk kota merupakan pola atau wujud yang terbangun dari sebaran kawasan non pertanian atau perkotaan



(kawasan terbangun) (Daluarti, 2009). Jenis bentuk kota sendiri terdiri dari : (Gambar 1.5 s/d 1.10).

1. Linier : berbentuk jalur dengan sistem yang berdiri sendiri.
2. Spreadsheet/Grid : berbentuk hierarki dengan sistem yang saling terhubung.
3. Star : gabungan linier dan spreadsheet yang menggambarkan ruang terbuka.
4. Finger Sheep : berbentuk menjalar dengan satu pusat.
5. Sparadis : bentuk kota menyebar.
6. Ring : bentuk kota melingkar.

Sedangkan struktur kota adalah pola (wujud) yang terbangun dari sebaran kegiatan perkotaan (komponen pembentuk kota) (Daluarti, 2009). Jenis struktur kota meliputi : (Gambar 1.11 s/d 1.13).

1. Konsentris (pola melingkar) : Perkembangan kota dimulai dari pusat kota menuju daerah pinggiran seiring bertambahnya penduduk.
2. Sektoral (pola sektor) : Perkembangan kota terjadi beragam karena faktor geografis.
3. Multi-nuclei (pola pusat kota) : Pusat kota berada pada tengah sel lain, sehingga pertumbuhan kota bermula dari pusat kota dan terjadi dalam bentuk kompleks.

Sehingga, perencanaan tata ruang wilayah dan kota sudah seharusnya memenuhi hal-hal sebagai berikut : (Prawiranegara, 2014)

1. Perencanaan tata ruang merupakan proses terpadu bukan produk harga mati.
2. Perencanaan tata ruang terpadu mencakup : perencanaan fisik-spasial, kemitraan, dan sumber daya.
3. Dilakukan atas dasar kepentingan masyarakat.
4. Dilakukan berdasarkan pertimbangan sumber daya yang tersedia.
5. Merupakan rencana yang diperkirakan dapat diwujudkan.

## **Analisis Teori Perencanaan dalam Program Kotaku**

### **1. Implementasi Teori Perencanaan**

Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai bentuk perencanaan aplikatif memunculkan bentuk analisis terhadap konteks perencanaan secara umum (Lihat tabel 1.2). Seperti penjelasan sebelumnya bahwa perencanaan merupakan penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu (M.Nur, 2009). Dimana dalam konteks program KOTAKU ini, penentuan arah program yang ditujukan untuk peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan menjadi sebuah bentuk implementasi perencanaan berupa penetapan langkah-langkah. Sedangkan beberapa tujuan program KOTAKU seperti terbentuknya Pokja PKP adalah implementasi perencanaan dalam bentuk tujuan tertentu. Sehingga program KOTAKU dapat dikategorikan sebagai perencanaan dalam arti secara umum.

Berdasarkan pandangan lain, program KOTAKU juga dapat disebut sebagai perencanaan dalam arti luas. Seperti disampaikan Diana Conyers dan Peter Hills dalam Harahap (2005) yang menyatakan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, atau pilihan-pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang. Beberapa tahapan dalam penanganan daerah kumuh dalam program KOTAKU menjadi bentuk implementasi perencanaan dalam arti luas (Lihat tabel 1.3). Adanya tahap persiapan, perencanaan, penganggaran, dan upaya keberlanjutan menjadi salah satu wujud pilihan-pilihan mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber daya. Sedangkan indikator-indikator pada setiap tahapan yang dilakukan menjadi sasaran-sasaran spesifik yang dihasilkan untuk waktu mendatang. Misalnya dalam tahap persiapan, indikator seperti advokasi, sosialisasi, penentuan sasaran, dan pengembangan kebijakan menjadi sasaran spesifik yang dihasilkan selama waktu persiapan program KOTAKU.

Oleh karena itu, atas dasar konteks perencanaan umum maupun arti luas, program KOTAKU adalah bentuk perencanaan aplikatif yang menitikberatkan pada implementasi segitiga perencanaan yaitu sistem nilai, ruang, aktivitas, dan norma (Lihat gambar 1.14). Sistem nilai, pelaksanaan program KOTAKU berdasarkan visi program pada masing-masing kabupaten/kota menjadi wujud sistem nilai dari perencanaan yang dilakukan. Ruang, melihat dari sistem nilai tersebut, pelaksanaan program KOTAKU di berbagai daerah khususnya tingkat kabupaten/kota menjadi implementasi segitiga keruangan dari perencanaan. Atas dasar daerah operasional program yang dikehendaki pada tingkat daerah, memunculkan lahirnya peraturan pemerintah daerah sebagai bentuk norma pada level segitiga perencanaan. Kemudian, pelaksanaan program KOTAKU dengan skema top-down dan bottom-up adalah langkah nyata aktivitas yang dilakukan berupa pembangunan partisipatif sebagai perwujudan segitiga perencanaan. Gambaran pelaksanaan program KOTAKU yang memungkinkan adanya beberapa penolakan maupun tantangan dan hambatan dari masyarakat sekitar, menjadi penggambaran kondisi monoton dan chaotic dalam segitiga perencanaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program KOTAKU merupakan salah satu dari implementasi perencanaan.

Prinsip perencanaan yang berdasar pada pengalokasian sumber daya bagi kebutuhan beragam dengan wilayah cakupan (scope), kewenangan, dan areal sebagai faktor utama dalam perencanaan juga menjadi sarana implementasi perencanaan dari program KOTAKU. Pengaplikasian prinsip tersebut terlihat dari implementasi prinsip-prinsip program KOTAKU salah satunya di wilayah Semarang Timur. Penataan permukiman dengan menggunakan pola pikir komprehensif dan cara-cara atau ide-ide baru guna mencapai terwujudnya permukiman layak huni dan pengembangan kreativitas dan inovasi masyarakat menjadi bentuk pengalokasian sumber daya yang ditunjukkan untuk kebutuhan beragam. Sedangkan melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran rencana penanganan

lingkungan kumuh sebagai produk pemerintah daerah menjadi implementasi wilayah cakupan (scope) yaitu di tingkat kabupaten/kota. Untuk prinsip kewenangan sendiri terwujud dengan prinsip pemerintah sebagai nahkoda, dimana pemerintah menjadi pemimpin dalam kegiatan. Prinsip areal dalam prinsip KOTAKU terlihat dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dimana areal perencanaan melibatkan tingkat pemerintah daerah, tingkat desa/kelurahan hingga masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sarana implementasi prinsip program KOTAKU telah sesuai atau mewakili sebagai besar prinsip perencanaan yang semestinya.

Penerapan perencanaan program KOTAKU sebagai program yang mengatur tata ruang kota merupakan implementasi jenis perencanaan regional dengan fokus pada perencanaan tata ruang dan perencanaan kota. Pelaksanaan program KOTAKU yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia salah satunya wilayah Semarang, Jawa Tengah menjadi bentuk perencanaan regional yang memiliki skala pelaksanaan di tingkat daerah. Berfokus pada perbaikan permukiman kumuh di beberapa tempat menjadi implementasi jenis perencanaan tata ruang. Karena dalam konteks tata ruang yang menjadi pokok bahasan adalah bagaimana perbaikan dalam konteks spasial. Sedangkan fokus perbaikan yang dilakukan dalam skala kota menjadi implementasi perencanaan kota sebagai scope kewilayahan dari perencanaan. Dengan demikian, program KOTAKU menjadi salah satu sarana implementasi ragam perencanaan tata ruang kota yang berfokus pada RUTRK yaitu pembentukan pembangunan menyeluruh dalam jangka waktu panjang.

## **2. Implementasi Keruangan dan Perkotaan**

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sebagai bentuk perencanaan aplikatif yang merupakan perencanaan regional atau kewilayahan. Implementasi program KOTAKU di Kota Semarang pada proses perencanaannya dilakukan dengan mengacu pada aturan mengenai tata ruang kota. Aturan yang mengatur adalah

Perda No 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.

Berdasarkan aturan tersebut, yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Pengaturan RTRW Kota Semarang ditujukan untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penataan ruang dilakukan dengan mengembangkan struktur ruang, mengembangkan pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis.

Perencanaan struktur ruang di Kota Semarang meliputi rencana pengembangan sistem pusat pelayanan dan pengembangan sistem jaringan. Dalam pengembangan sistem dilakukan pembagian wilayah kota (BWK) dan penetapan pusat pelayanan. Sementara dalam pengembangan sistem jaringan dilakukan pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, prasarana sumber daya air, infrastruktur perkotaan, dan prasarana dan sarana perkotaan lainnya. Dari peta rencana struktur ruang (lihat gambar 1) terlihat bahwa pusat pelayanan kota berada di Semarang Tengah. Sementara pelayanan kota berada pada daerah pinggir seperti Tembalang, Banyumanik, Gunung Pati, Mijen, Tugu, Semarang Barat, dan Genula, dan pelayanan lingkungan tersebar di seluruh daerah Semarang.

Perencanaan pola ruang di Kota Semarang (lihat gambar 2) terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budaya. Berdasarkan tabel 1 dan gambar 2 dapat dilihat bahwa kawasan kumuh banyak terdapat di daerah Semarang Utara yang tersebar di 5 kelurahan dimana daerah tersebut adalah daerah yang diperuntukkan untuk perumahan, perdagangan dan jasa dan daerah yang diperuntukkan untuk kawasan transportasi. Ruang yang diperuntukkan untuk

perumahan tersebar merata di banyak kelurahan di Kota Semarang. Untuk ruang yang diperuntukkan untuk perdagangan dan jasa banyak terdapat di Semarang Timur dan Semarang Selatan serta sebagian di Genuk, Pedurungan, Banyumanik, Gunung Pati, dan Ngaliyan.

Perencanaan kawasan strategis di Kota Semarang terbagi menjadi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis sosial budaya. Kawasan pertumbuhan ekonomi berada di kawasan peterongan-Tawang-Siliwangi yang berada di daerah Semarang Utara, Semarang Timur, Semarang Tengah, Gayamsari, dan Semarang Selatan. Selain itu juga terdapat di daerah Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang Utara. Kawasan daya dukung lingkungan hidup berada di sekitar Bendungan Jatibarang, Gunung Pati, dan kawasan reklamasi pantai di Semarang Utara, Semarang Barat, dan Tugu. Sementara kawasan strategis sosial budaya berada di Kota Lama kec Semarang Utara, Masjid Agung Jawa Tengah kec Gayamsari, Masjid Agung Semarang kec Semarang Tengah, Gedong Batu kec Semarang Barat, dan kawasan pendidikan di Tembalang dan Gunungpati.

Dari pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis tersebut, sesuai penentuan wilayah BWK kawasan BWK I, II, dan III berada di kawasan sangat strategis karena berada pada jalan nasional atau provinsi sehingga banyak aktivitas. Pembangunan pusat-pusat dan fasilitas pelayanan cukup tinggi. Kawasan ini juga memiliki peran pelayanan yang cukup tinggi dibanding daerah lainnya. Kawasan ini menjadi sangat vital karena menjadi pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi. Kawasan industri yaitu BWK IV dan X juga tidak kalah menarik dengan kawasan tersebut. Meskipun cukup jauh dari pusat pelayanan, namun kawasan ini memiliki daya tarik berupa peluang kerja. Sehingga adanya kawasan-kawasan ini mendorong masyarakat baik kota maupun desa untuk datang ke kawasan ini. Perpindahan penduduk yang terjadi dapat memunculkan permasalahan baru

seperti kebutuhan lahan tempat tinggal. Hal ini memicu terjadinya kawasan padat penduduk atau pemukiman kumuh.

Hubungan yang terjadi antara kota dengan wilayah terbentuk dari aktivitas yang timbul. Seperti yang dikatakan Harahap (2005), sistem kota-kota dan wilayah terbentuk melalui mobilitas input dan output dari elemen-elemen penyusun aktivitas. Input ke kota berupa kegiatan ekonomi yang cukup tinggi dari sektor industri, perdagangan, dan jasa serta perkembangan kawasan transportasi yang menciptakan peluang pekerjaan. Pembangunan di kawasan tersebut berkembang pesat. Pembangunan tersebut akan memberikan efek pada daerah di sekitarnya.

Mobilitas input bergerak menuju ke kota-kota berskala tinggi sedangkan mobilitas output bergerak keluar karena kota-kota berskala tinggi tidak mampu lagi mendukung seluruh aktivitas yang muncul dalam bentuk *spread effects* (Harahap, 2005). Seperti pendapat Harahap tersebut, daerah di sekitar wilayah yang pembangunannya cukup pesat akan menerima efek penyebaran pembangunan. Karena pusat pembangunan tidak lagi mampu mendukung aktivitas yang muncul.

Kawasan pembangunan BWK I, II, II, IV dan X yang dikembangkan dapat memunculkan permasalahan pemukiman kumuh. Dengan adanya *spread effects* maka kawasan lain dalam perkembangannya juga dapat memicu permasalahan pemukiman kumuh. Oleh sebab itu, pengembangan wilayah tata ruang kota harus mampu menjawab permasalahan ini. Dengan adanya Program KOTAKU pengelolaan tata ruang akan dapat mengatasi pemukiman kumuh dan pencegahan timbulnya pemukiman kumuh. Penerapan Program KOTAKU di Kota Semarang dilakukan di 15 kecamatan yang tersebar di 62 desa.

## **Kesimpulan**

Perencanaan menjadi tahapan yang harus dilakukan dalam pembangunan. Pembangunan wilayah membutuhkan perencanaan spasial yang salah satunya adalah perencanaan regional yang

mencakup aspek ruang dengan mempertajam fokus daerah pembangunan dalam kota atau provinsi. Dasar bagi perencana untuk menyusun sebuah perencanaan berupa teori-teori perencanaan seperti *Functional Theories* dan *Behavioural Theories*.

Perencanaan kota merupakan bagian dari perencanaan spasial yang memiliki empat jenjang pokok yaitu Rencana Umum Tata Ruang Perkotaan, Rencana Umum Tata Ruang Kota, Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Teknik Tata Ruang Kota. Perencanaan kota dibutuhkan dua pendekatan yang mencakup *The Unitary Approach* dan *Adaptive Approach*. Penerapan teori perencanaan wilayah dibagi atas komponen-komponen seperti perencanaan fisik, perencanaan ekonomi makro, perencanaan sosial dan perencanaan pembangunan.

Perencanaan wilayah dan kota yang diwujudkan dalam perencanaan tata ruang perlu perlu dipandang sebagai proses terpadu dan menyeluruh mencakup perencanaan fisik-spasial, perencanaan komunitas, perencanaan sumber daya yang dilakukan berdasarkan kepentingan masyarakat yang juga disertai pertimbangan sumber daya yang tersedia dan yang paling utama adalah rencana tata ruang yang akan disusun merupakan rencana yang dapat diwujudkan.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah merupakan salah satu bentuk penerapan perencanaan regional. Program KOTAKU ditujukan untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh, meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Perencanaan penangan daerah kumuh melalui KOTAKU dilakukan dengan beberapa tahapan yang dimulai dengan persiapan, dilakukan penyepakatan antara pemerintah pusat dengan daerah. Langkah selanjutnya adalah perencanaan yang meliputi persiapan perencanaan, penyusunan RP2KP-KP & RPLP, dan penyusunan rencana detail atau teknis. Upaya keberlanjutan dilakukan dengan penyusunan kerangka regulasi, penguatan kelembagaan dan



mekanisme *monitoring* pelaksanaan program yang hasilnya untuk studi evaluasi. Semua tahapan dalam proses perencanaan KOTAKU dilakukan secara terpadu, menyeluruh meliputi aspek perencanaan fisik-spasial, perencanaan komunitas, dan perencanaan sumber daya.

Implementasi Program KOTAKU memunculkan bentuk analisis perencanaan. Alasan program ini dikategorikan sebagai perencanaan karena bahwa arah program ditujukan sebagai upaya peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, implementasi perencanaan berupa penetapan langkah-langkah, dimana tujuan program KOTAKU merupakan implementasi perencanaan dalam bentuk tujuan.

Bentuk implementasi perencanaan berupa tahapan dalam penanganan daerah kumuh dalam program KOTAKU merujuk pada perencanaan sebagai suatu proses yang menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, atau pilihan-pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya, dengan tujuan menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang.

Program KOTAKU merupakan bentuk perencanaan aplikatif dengan implementasi segitiga perencanaan yaitu sistem nilai, ruang, aktivitas, dan norma sebagai titik berat. Sistem nilai berdasarkan visi program menjadi wujud sistem nilai perencanaan. Pelaksanaan program KOTAKU melihat dari sistem nilai tersebut menjadi implementasi segitiga keruangan dari perencanaan. Kemudian, berdasarkan daerah operasional program yang dikehendaki memunculkan peraturan pemerintah daerah sebagai bentuk norma. Skema top-down dan bottom-up pelaksanaan program KOTAKU berupa pembangunan partisipatif. Pelaksanaan program yang memungkinkan penolakan maupun hambatan menjadi monoton dan chaotic dalam segitiga perencanaan, maka program KOTAKU merupakan implementasi perencanaan.

Penataan permukiman dengan menggunakan pola pikir komprehensif menjadi bentuk pengalokasian sumber daya yang

ditunjukkan untuk kebutuhan. Melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran menjadi implementasi wilayah cakupan (scope) yaitu di tingkat kabupaten/kota. Prinsip kewenangan terwujud dimana pemerintah menjadi pemimpin dalam kegiatan. Prinsip areal terlihat dari prinsip tata kelola pemerintahan yang melibatkan tingkat pemerintah daerah, tingkat desa/kelurahan hingga masyarakat, maka sarana implementasi prinsip program KOTAKU mewakili prinsip perencanaan.

Pelaksanaan program KOTAKU yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia menjadi bentuk perencanaan regional dengan skala pelaksanaan di tingkat daerah. Fokus pada perbaikan permukiman kumuh menjadi implementasi jenis perencanaan tata ruang. Dalam konteks tata ruang yang menjadi pokok bahasan perbaikan dalam konteks spasial. Fokus perbaikan dalam skala kota menjadi implementasi perencanaan kota sebagai scope kewilayahan dari perencanaan. Dengan demikian, program KOTAKU menjadi sarana implementasi perencanaan tata ruang kota pembentukan pembangunan menyeluruh dalam jangka waktu panjang.

Pelaksanaan Program KOTAKU mengacu pada aturan mengenai tata ruang kota Perda No 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan sistem berdasarkan aspek administratif. Penataan ruang dilakukan dengan mengembangkan struktur ruang, mengembangkan pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis.

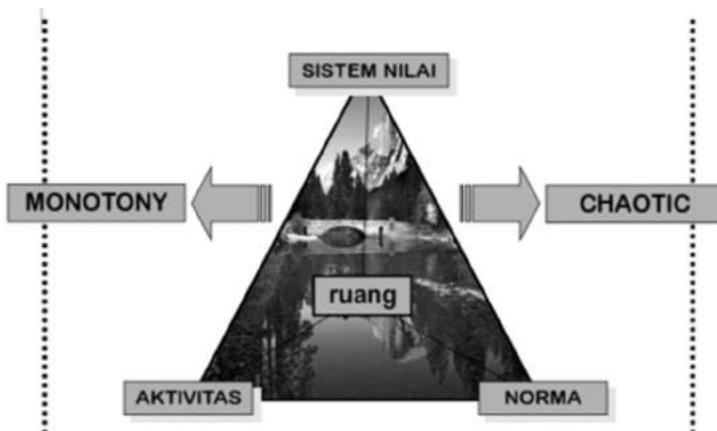
Perencanaan struktur ruang di Kota Semarang meliputi pengembangan sistem pusat pelayanan dilakukan pembagian wilayah kota (BWK) dan penetapan pusat pelayanan dan pengembangan sistem jaringan dilakukan pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, infrastruktur perkotaan, dan lain-lain. Perencanaan pola ruang di Kota Semarang

terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budaya. Perencanaan kawasan strategis di Kota Semarang terbagi menjadi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup, dan kawasan strategis sosial budaya.

Hubungan yang terjadi antara kota dengan wilayah terbentuk melalui mobilitas input dan output dari elemen-elemen penyusun aktivitas. Pembangunan di kawasan yang berkembang pesat akan memberikan efek pada daerah di sekitar. Daerah di sekitar wilayah dengan pembangunannya pesat akan menerima efek penyebaran pembangunan.

Kawasan pembangunan BWK dapat memunculkan permasalahan pemukiman kumuh. Maka, pengembangan wilayah tata ruang kota harus mampu menjawab permasalahan ini. Dengan adanya Program KOTAKU pengelolaan tata ruang akan dapat mengatasi pemukiman kumuh dan pencegahan timbulnya pemukiman kumuh.

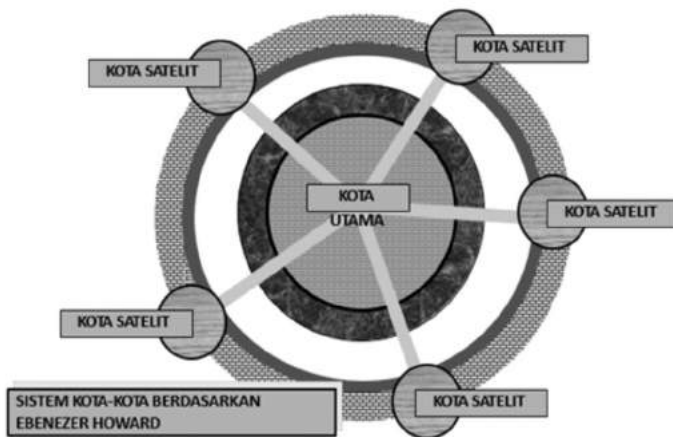
## Lampiran



**Gambar 1.1** Segitiga Definisi Perencanaan

Sumber : (Harahap, 2005)

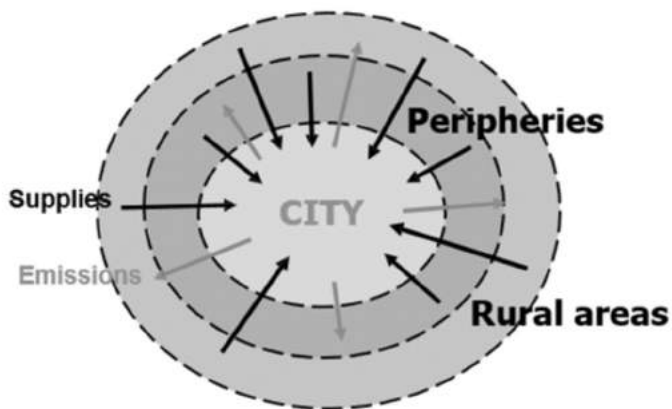
[https://www.academia.edu/35418723/PERENCANAAN\\_DAN\\_PENGEMBANGAN\\_WILAYAH](https://www.academia.edu/35418723/PERENCANAAN_DAN_PENGEMBANGAN_WILAYAH)



**Gambar 1.2** Hubungan Wilayah dan Kota

Sumber : (Harahap, 2005)

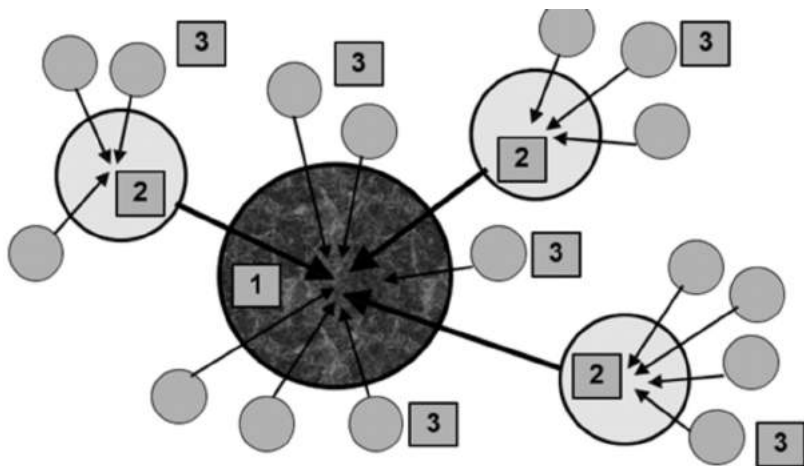
[https://www.academia.edu/35418723/PERENCANAAN\\_DAN\\_PENGEMBANGAN\\_WILAYAH](https://www.academia.edu/35418723/PERENCANAAN_DAN_PENGEMBANGAN_WILAYAH)



**Gambar 1.3** Hubungan Wilayah dan Kota

Sumber : (Harahap, 2005)

[https://www.academia.edu/35418723/PERENCANAAN\\_DAN\\_PENGEMBANGAN\\_WILAYAH](https://www.academia.edu/35418723/PERENCANAAN_DAN_PENGEMBANGAN_WILAYAH)



**Gambar 1.4** Sistem Kota-Kota dan Wilayah

Sumber : (Harahap, 2005)

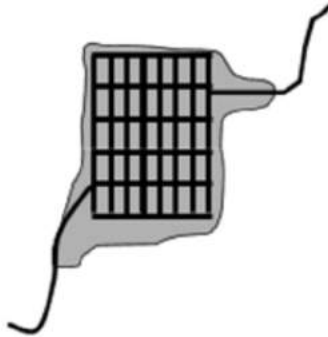
[https://www.academia.edu/35418723/PERENCANAAN\\_DAN\\_PENGEMBANGAN\\_WILAYAH](https://www.academia.edu/35418723/PERENCANAAN_DAN_PENGEMBANGAN_WILAYAH)



**Gambar 1.5** Bentuk Kota Linier

Sumber : (Daluarti, 2009)

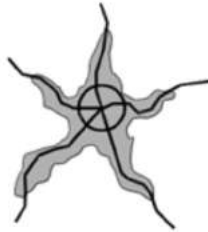
<https://id.scribd.com/document/378411040/9-10-Perencanaan-Kota-pdf>



**Gambar 1.6** Bentuk Kota Spreadsheet/Grid

Sumber : (Daluarti, 2009)

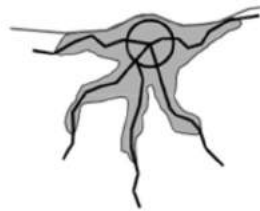
<https://id.scribd.com/document/378411040/9-10-Perencanaan-Kota-pdf>



**Gambar 1.7** Bentuk Kota Star

Sumber : (Daluarti, 2009)

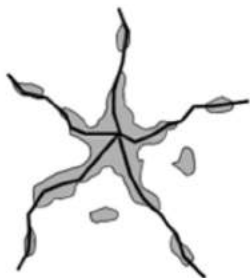
<https://id.scribd.com/document/378411040/9-10-Perencanaan-Kota-pdf>



**Gambar 1.8** Bentuk Kota Finger Sheep

Sumber : (Daluarti, 2009)

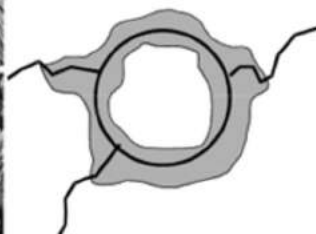
<https://id.scribd.com/document/378411040/9-10-Perencanaan-Kota-pdf>



**Gambar 1.9** Bentuk Kota Sparadis

Sumber : (Daluarti, 2009)

<https://id.scribd.com/document/378411040/9-10-Perencanaan-Kota-pdf>

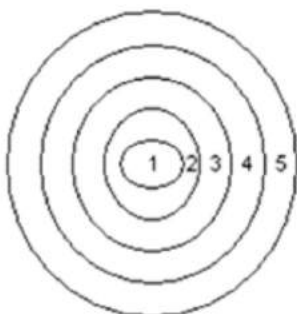


**Gambar 1.10** Bentuk Kota Ring

Sumber : (Daluarti, 2009)

<https://id.scribd.com/document/378411040/9-10-Perencanaan-Kota-pdf>





**Keterangan:**

1. Kawasan Pusat Bisnis
2. Perdagangan dan Manufaktur Ringan
3. Pemukiman Kelas Rendah
4. Pemukiman Kelas Menengah
5. Pemukiman Kelas Atas

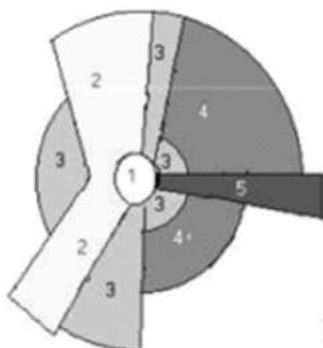
**Struktur Kota Model Burgess (1924)**

(dari Waugh, 1990)

**Gambar 1.11** Struktur Kota Konsentris

Sumber : (Daluarti, 2009)

<https://id.scribd.com/document/378411040/9-10-Perencanaan-Kota-pdf>



**Keterangan:**

1. Kawasan Pusat Bisnis
2. Perdagangan dan Manufaktur Ringan
3. Pemukiman Kelas Rendah
4. Pemukiman Kelas Menengah
5. Pemukiman Kelas Atas

**Struktur Kota Model Hoyt (1939)**

(dari Waugh, 1990)

**Gambar 1.12** Struktur Kota Sektoral

Sumber : (Daluarti, 2009)

<https://id.scribd.com/document/378411040/9-10-Perencanaan-Kota-pdf>



**Gambar 1.5** Struktur Kota Konsentris

Sumber : (Daluarti, 2009)

<https://id.scribd.com/document/378411040/9-10-Perencanaan-Kota-pdf>

Dimensi	Tools/Unsur	Bidang Ilmu	
Pemahaman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori-teori dasar</li> <li>2. Teknik-teknik analisis</li> <li>3. Model-model sistem</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Regional Science</i></li> <li>• Teori Lokasi</li> <li>• Geobiofisik</li> <li>• Geografi</li> <li>• Sosiologi</li> <li>• Ekonomi</li> </ul>	Teori
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Formulasi wilayah dan tujuan (visi) umum</li> <li>5. Teknik-teknik desain/ pemetaan</li> <li>6. Formulasi rencana</li> <li>7. Teknik pengambilan keputusan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regional Planning</li> <li>• Politik Lokal/ Wilayah</li> <li>• <i>Public Policy</i></li> <li>• Administrasi Pemerintah</li> <li>• <i>Community Planning</i></li> <li>• <i>Community Development</i></li> <li>• Manajemen</li> <li>• Seni/ Art</li> </ul>	Terapan
Kebijakan dan Proses Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Evaluasi</li> <li>9. Target jangka pendek</li> <li>10. Pelaksanaan</li> </ol>		

**Tabel 1.1** Ruang Lingkup Perencanaan Wilayah

Sumber : (Harahap, 2005)

[https://www.academia.edu/35418723/PERENCANAAN\\_DAN\\_PENGEMBANGAN\\_WILAYAH](https://www.academia.edu/35418723/PERENCANAAN_DAN_PENGEMBANGAN_WILAYAH)

Unsur	Implementasi
Penetapan langkah-langkah	Peningkatan akses terhadap infrastuktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan.
Mencapai tujuan tertentu	Untuk mendukung terwujudnya permukiman kumuh perkotaan yang layak huni, produktif dan keberlanjutan, melalui pelaksanaan tujuan program KOTAKU sebagai berikut : 1.

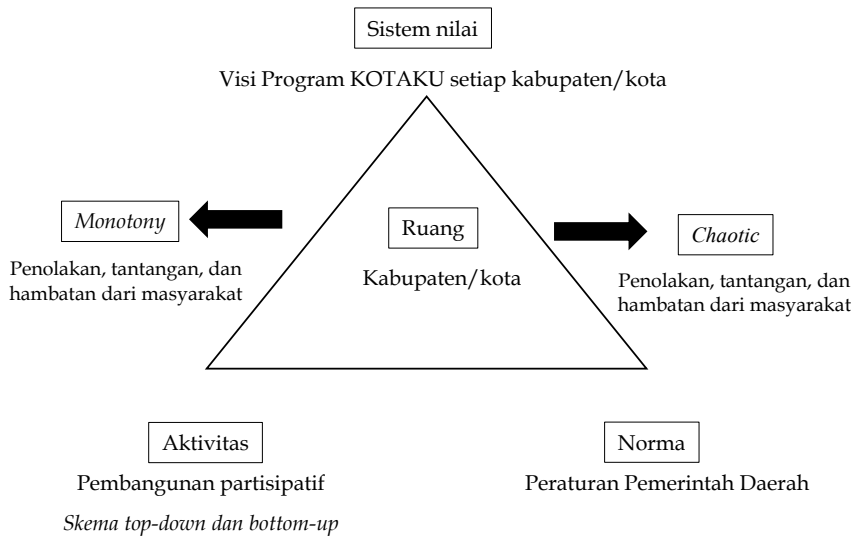
**Tabel 1.2** *Implementasi Arti Umum Perencanaan dalam Program KOTAKU*

Sumber : Diolah dari data (M.Nur, 2009)

Unsur	Implementasi
Proses yang menerus yang melibatkan keputusan-keputusan, atau pilihan-pilihan, mengenai cara-cara alternatif penggunaan sumber-sumber daya	Tahapan program KOTAKU yang terdiri dari : 1. Persiapan (Pusat dan kabupaten/kota). 2. Perencanaan 3. Penganggaran (Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota). 4. Upaya keberlanjutan

<p>Menghasilkan sasaran-sasaran spesifik untuk waktu yang akan datang</p>	<p>Indikator pelaksanaan tiap tahapan program KOTAKU yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan <ul style="list-style-type: none"> <li>Pusat terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>o Advokasi dan sosialisasi program/kegiatan.</li> <li>o Penentuan sasaran kabupaten/kota</li> <li>o Pengembangan kebijakan</li> <li>o Penguatan kelembagaan</li> </ul> </li> <li>Kabupaten/kota terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>o Penyepakatan MoU</li> <li>o Lokakarya sosialisasi</li> <li>o Penggalangan komitmen pemangku kepentingan</li> <li>o Pembentukan atau penguatan Pokja</li> <li>o Komitmen penyusunan dokumen RP2KP-KP</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2. Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> <li>o Persiapan perencanaan</li> <li>o Penyusunan RP2KP-KP &amp; RPLP</li> <li>o Penyusunan rencana detail/teknis</li> </ul> </li> <li>3. Penganggaran <ul style="list-style-type: none"> <li>o Penyusunan DED</li> <li>o Pelelangan</li> <li>o Konstruksi</li> <li>o Supervise kegiatan</li> <li>o Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan pemberlakukan peraturan bersamaan.</li> </ul> </li> <li>4. Upaya keberlanjutan <ul style="list-style-type: none"> <li>o Penyusunan kerangka regulasi</li> <li>o Penguatan kelembagaan</li> <li>o Pengelolaan <i>database</i></li> </ul> </li> </ol>
---	--

**Tabel 1.3** *Implementasi Arti Luas Perencanaan dalam Program OTAKU*  
Sumber : Diolah dari data (Harahap, 2005)



**Gambar 1.14** Implementasi Segitiga Definisi Perencanaan dalam Program KOTAKU

Sumber : Diolah dari data (Harahap, 2005.)

[https://www.academia.edu/35418723/PERENCANAAN\\_DAN\\_PENGEMBANGAN\\_WILAYAH](https://www.academia.edu/35418723/PERENCANAAN_DAN_PENGEMBANGAN_WILAYAH)



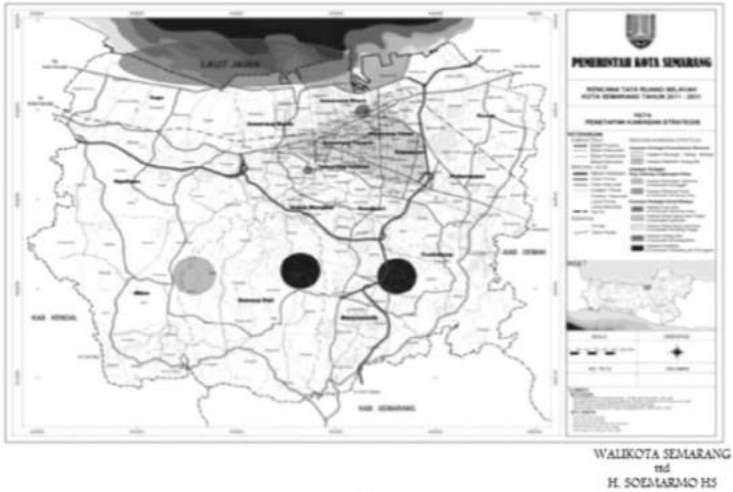
WALIKOTA SEMARANG  
td  
H. SOEMARMO HS

Gambar 1. Peta Rencana Struktur Tata Ruang



WALIKOTA SEMARANG  
td  
H. SOEMARMO HS

Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang



**Gambar 3. Peta Penetapan Kawasan Strategis**

**Tabel 1 Pembagian Wilayah Kota (BWK)**

No	Kawasan	Kecamatan	Luas
1	BWK I	Semarang Tengah, Semarang Timur, Semarang Selatan	2.223 hektar
2	BWK II	Candisari, Gajahmungkur	1.320 hektar
3	BWK III	Semarang Barat, Semarang Utara	3.522 hektar
4	BWK IV	Genuk	2738 hektar
5	BWK V	Gayamsari, Pedurungan	2622 hektar
6	BWK VI	Tembalang	4420 hektar
7	BWK VII	Banyumanik	2509 hektar
8	BWK VIII	Gunungpati	5399 hektar
9	BWK IX	Mijen	6213 hektar
10	BWK X	Ngaliyan, Tugu	6393 hektar



**Tabel 2 Rencana Pengembangan Fungsi Utama BWK**

No	Fungsi	Kawasan
1	Perkantoran, perdagangan dan jasa	BWK I, II, III
2	Pendidikan kepolisian dan olah raga	BWK II
3	Transportasi udara dan transportasi laut	BWK III
4	Industri	BWK IV, X
5	Pendidikan	BWK VI, VIII
6	Perkantoran militer	BWK VII
7	Kantor pelayanan publik	BWK IX

**Tabel 3**

Sumber : Peraturan Daerah Kota Semarang No 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

### Daftar Pustaka

- Acheampong, Ransford A. 2018. *The Concept of Spatial Planning and The Planning Systems* [In The Book Spatial Planning In Ghana, Chapter 2] [online] <http://www.researchgate.net/publication/328492212> diakses pada 18 Oktober 2019.
- Archibugi, Franco. 1996. *Towards a New Discipline of Planning*. Postgraduate School of Public Administration and Planning Study Centre. [http://www.francoarchibugi.it/pdf/9211\(E\)%20Towards%20a%20new%20discipline%20of%20planning.pdf](http://www.francoarchibugi.it/pdf/9211(E)%20Towards%20a%20new%20discipline%20of%20planning.pdf) diakses pada 18 Oktober 2019.
- Christianingrum, S. I., Titik Djumiarti, 2019. *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kecamatan Semarang Timur*. *Jurnal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 88-105
- Daluarti, M. H, 2009 *Perencanaan Kota*. Scribd.com, [online] <https://id.scribd.com/document/378411040/9-10-Perencanaan-Kota-pdf> diakses pada 25 Oktober 2019
- Harahap, T, 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Academia.edu, [online] <https://www.academia.edu/35418723/>

PERENCANAAN\_DAN\_PENGEMBANGAN\_WILAYAH  
diakses pada 25 Oktober 2019

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, t.thn. *Bersama Program KOTAKU "Kita Tuntaskan Kumuh"*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017. *Sekilas Informasi Program Tanpa Kumuh (KOTAKU)*, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2019. *Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- M.Nur, N. d. 2009. *Pengantar Perencanaan Wilayah*. Scribd.com [online] <https://id.scribd.com/doc/293626975/PERENCANAAN-WILAYAH-pdf-Bahan-ajar-Perencanaan-Wilayah-pdf> diakses pada 25 Oktober 2019
- Oktovianey, Fransiskus. 2014. *Jenis Jenis Teori Perencanaan*. Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Bosowa 45 Makassar. [online] [https://www.academia.edu/9175805/jenis\\_-\\_jenis\\_teor\\_i\\_perencanaan](https://www.academia.edu/9175805/jenis_-_jenis_teor_i_perencanaan) diakses pada 25 Oktober 2019
- Prawiranegara, M. 2014. *Pemahaman Dasar tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota: Konsep, Konteks, dan Komponen Pokok*. Hukum dan Administrasi Perencanaan, hal. pp.1.2-1.72.
- Rafita, Afi, 2016. *Resume Perkuliahan Teori Perencanaan*. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. [online] [https://www.academia.edu/29537060/Resume\\_Teor\\_i\\_Perencanaan](https://www.academia.edu/29537060/Resume_Teor_i_Perencanaan) diakses pada 22 Oktober 2019
- Siswapeda, 2015. *Teori tentang Struktur Ruang Kota*. Siswapeda [online] <https://www.siswapeda.com/teori-tentang-struktur-ruang-kota/> diakses pada 25 Oktober 2019
- Suandy, Erly, 2001. *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat

Wikantiyoso, R. 2004. *Paradigma Perencanaan dan Perancangan Kota*.  
Malang: Group Konservasi Arsitektur & Kota.  
[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28086/  
Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28086/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

# PEMBANGUNAN DESA WISATA SEBAGAI BENTUK APLIKATIF DALAM TEORI PERENCANAAN

Disusun Oleh :

Muhammad Ainul Yaqin	(17/409889/SP/27734)
Fuad Rafif Prasetyo	(17/411354/SP/27787)
Bintang Fajar Pamungkas	(17/413187/SP/27904)
Ashlihul Hayati M S	(17/414905/SP/28032)
Danang Giri Sadewa	(17/414906/SP/28033)

## **Pendahuluan**

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, pembangunan menjadi sebuah instrumen penting yang secara masif dilakukan oleh pemerintah. Salah satu yang kemudian menjadi fokus dari pembangunan tersebut adalah pembangunan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pembangunan desa menjadi salah satu agenda penting yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan tersebut dilakukan dengan tujuan mengurangi jumlah desa tertinggal sebanyak 5.000 desa serta meningkatkan jumlah desa mandiri sebanyak 2.000 desa pada tahun 2019. Pembangunan desa dipandang penting mengingat posisi serta potensi desa sebagai salah satu komponen dalam meningkatkan ekonomi sekaligus mendukung ketahanan nasional. Dalam perkembangan pelaksanaannya, pembangunan desa yang dilakukan pemerintah telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertama adalah jumlah desa mandiri yang meningkat menjadi 5.559 desa pada tahun 2018 dari yang sebelumnya 2.894

desa pada tahun 2014. Kedua adalah jumlah desa tertinggal yang mengalami penurunan menjadi 13.232 desa pada tahun 2018 dimana sebelumnya adalah 19.750 desa pada tahun 2014 (BPS 2019).

Berbeda halnya dengan periode-periode sebelumnya, pembangunan desa yang dilakukan akhir-akhir ini lebih mengedepankan pada peran serta desa sebagai agen pembangunan. Artinya desa tidak lagi hanya diposisikan sebagai objek pembangunan yang menerima intervensi program dari pemerintah pusat, melainkan turut serta sebagai penggerak atau subjek dari pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya otonomi desa yang didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui peraturan tersebut, desa kemudian diberi kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa. Dalam penerapannya, salah satu implementasi yang kemudian dilakukan adalah melalui pengelolaan dana desa. Dana desa merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap desa sebagai bagian dari APBN, yang kemudian berfungsi sebagai sumber pendapatan desa selain berasal dari pendapatan asli desa dan pendapatan lain. Dalam pelaksanaannya dana tersebut kemudian dikelola dan dialokasikan melalui berbagai kegiatan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi desa, dan program-program pembangunan yang lain.

Pada era saat ini, salah satu model pembangunan desa yang melibatkan pengelolaan dana desa dan sedang gencar-gencarnya dilakukan adalah pembangunan atau pengembangan desa wisata. Menurut BPS (dikutip oleh Hamdani 2018), pada tahun 2018 ada sebanyak 1.734 desa yang telah mengembangkan desa berbasis pariwisata. Jumlah tersebut meningkat dari yang sebelumnya sebanyak 1.302 desa pada tahun 2014. Pembangunan atau pengembangan desa berbasis pariwisata selama ini telah banyak menuai respon positif, baik dari masyarakat maupun pemerintah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. Pertama, proses pembangunan menggunakan model tersebut telah

berhasil mengangkat potensi desa yang beraneka ragam, mulai dari kebudayaan hingga objek wisata alam. Kedua, program tersebut telah dianggap cukup berhasil dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Ketiga dan yang utama, implementasi program tersebut dianggap telah melibatkan partisipasi masyarakat, dari mulai perencanaan, implementasi serta penerimaan keuntungan ekonomi sehingga mendukung aspek kemandirian dan keberlanjutan.

Adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya telah diatur dan disyaratkan dalam undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap desa kemudian diharuskan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Lebih lanjut, dalam pasal 80 disebutkan bahwa perencanaan pembangunan tersebut harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa. Adanya hal tersebut mengandung konsekuensi bahwa perencanaan merupakan hal yang fundamental dalam melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan. Melalui perencanaan, baik pemerintah desa maupun masyarakat dapat menentukan bagaimana arah pembangunan desa melalui serangkaian tahapan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain adalah bagaimana mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, dan sumber daya yang ada di desa, penetapan tujuan bersama, perumusan strategi berdasarkan prioritas kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, serta bagaimana melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan tersebut melalui berbagai program pembangunan desa.

Dalam tulisan ini, akan dipaparkan mengenai bagaimana salah satu contoh pembangunan desa menggunakan model pariwisata, bagaimana penerapan perencanaan dalam pembangunan, serta bagaimana kaitan antara praktik dan teori dalam perencanaan pembangunan tersebut.

## Konsep Perencanaan

Menurut Terry (dikutip oleh Sarinah 2017) perencanaan merupakan proses pemilihan fakta-fakta serta usaha untuk menghubungkan antara fakta yang satu dengan yang lain, yang mana selanjutnya dibuat perkiraan dan peramalan mengenai keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hasil yang diinginkan. Sementara itu, menurut Sarinah (2017) perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menetapkan, merumuskan, dan mengatur pendayagunaan manusia, material, metode, dan waktu secara efektif dalam rangka pencapaian tujuan. Menurut Widjojo (dikutip oleh Sarinah 2017) perencanaan setidaknya berfokus pada dua hal. Pertama adalah pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam waktu tertentu, yang didasari oleh nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Kedua adalah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam pemilihan cara-cara tersebut diperlukan juga ukuran atau kriteria tertentu yang harus dipilih terlebih dahulu. Menurut Sarinah (2017) perencanaan memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan titik tolak dan tujuan usaha
2. Sebagai pedoman dalam melakukan tindakan atau aktivitas
3. Mencegah terjadinya pemborosan waktu atau inefisiensi
4. Memudahkan kontrol atau pengawasan
5. Sebagai sarana evaluasi yang teratur
6. Sebagai alat koordinasi

Menurut Syam (2014) ada setidaknya lima unsur yang menjadi cakupan dalam perencanaan. Pertama adalah tujuan, dalam hal ini perencanaan harus memuat tujuan yang akan dicapai secara jelas dan terperinci. Kedua adalah policy yang di dalamnya memuat metode atau cara mencapai tujuan. Ketiga adalah prosedur, yang meliputi pembagian tugas secara terperinci. Keempat adalah

unsur progress dimana dalam perencanaan harus ada standar atau kriteria tertentu untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai, baik itu dari kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dikeluarkan. Terakhir adalah unsur program dalam bentuk rancangan kerja yang terstruktur dan terperinci.

Menurut Harold Kootz (dikutip oleh Syam 2014) ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam sebuah proses perencanaan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan yang hendak dicapai. Kedua adalah menetapkan premis-premis, dalam hal ini adalah menetapkan prediksi tentang keadaan-keadaan serta kebijakan-kebijakan yang mungkin untuk dilakukan di masa mendatang. Premis-premis tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu premis *non controllable*, *semi controllable* dan *controllable*. Premis *non controllable* merupakan premis yang tidak dapat dikendalikan seperti halnya situasi politik. Premis *semi controllable* merupakan premis yang sebagian dapat dikendalikan seperti halnya harga. Sedangkan premis *controllable* merupakan premis yang dapat dikendalikan sepenuhnya seperti halnya program yang telah ditetapkan suatu organisasi. Langkah Ketiga adalah mempelajari berbagai kemungkinan atas serangkaian tindakan yang akan diambil. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko untuk selanjutnya diambil sebuah keputusan. Selain langkah tersebut, ada beberapa syarat atau unsur yang harus diperhatikan sekaligus sebagai standar perencanaan yang baik. Unsur-unsur tersebut yaitu realistis, logis, sistematis, ilmiah, sederhana, objektif, fleksibel, manfaat, dan efisiensi (Sarinah 2017).

## **Teori Perencanaan Pembangunan**

Definisi pembangunan menurut (Siagian 1983) adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation buildings*). Dalam hal ini Siagian menganggap bahwa



pembangunan harus dilakukan secara terencana dan sadar. Proses perencanaan pembangunan dibutuhkan supaya pembangunan bergerak ke arah positif dan sesuai dengan harapan.

Menurut Todaro (1986) perencanaan pembangunan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta mengendalikan perubahan variabel-variabel pembangunan dari suatu negara atau wilayah dalam kurun waktu yang sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Warpani (1984) menjelaskan bahwa berkaitan dengan proses pembangunan, perencanaan merupakan sebuah usaha untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang terdapat pada suatu wilayah atau negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjelaskan perencanaan, Warpani menggunakan dua aspek perencanaan untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut.

1. Aspek pertama adalah aspek skala perencanaan. Aspek ini berkaitan dengan luas lingkup wilayah perencanaan. Semakin luas lingkup wilayah, sifat perencanaan akan semakin makro. Sebaliknya, semakin sempit luas wilayah maka sifat perencanaan akan semakin mikro.
2. Aspek berikutnya adalah aspek proses perencanaan. Aspek ini berkaitan dengan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Warpani berpendapat bahwa perubahan-perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam kehidupan masyarakat di suatu kota, wilayah, atau negara akan memberikan pengaruh terhadap proses perencanaan. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan pendekatan dan metode perencanaan yang berbeda-beda pula. Pada masyarakat yang masih didominasi oleh tradisi-tradisi lokal, akan cocok menggunakan perencanaan yang paternalistik. Sedangkan pada masyarakat yang peran tradisi lokalnya sudah berkurang, maka pendekatan perencanaan yang tepat haruslah menggunakan perencanaan dengan cara-cara ilmiah yang lebih

dapat diterima. Sehingga perencanaan pun akan berlangsung menurut proses yang berbeda-beda.

## **Perencanaan Desa Wisata**

Berkaitan dengan pembangunan desa wisata, pendekatan yang digunakan dalam perencanaannya adalah bottom up planning. Kunarjo (dikutip oleh Kuncoro 2004) berpendapat bahwa tahap yang paling bawah dalam rapat koordinasi pembangunan daerah akan diusulkan pada tingkat yang lebih tinggi dimulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Rakorbang Kota dan Rakorbang provinsi. Pada dasarnya prinsip pengembangan desa wisata merupakan salah satu produk wisata alternatif yang memberikan dorongan bagi pembangunan desa yang berkelanjutan (Sastrayuda 2010). Sastrayuda juga menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan desa wisata meliputi: (1) memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat, (2) menguntungkan masyarakat setempat, (3) berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat, (4) melibatkan masyarakat setempat, (5) menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

## **Contoh Perencanaan Pembangunan Desa Wisata**

Contoh kasus perencanaan pembangunan desa wisata ialah Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Desa ini merupakan salah satu daerah pedesaan yang menjadi unggulan daya tarik wisata di Jawa Timur. Desa Bumiaji memiliki luas wilayah 807,019 Ha dan memiliki perkebunan apel terluas di Kota Batu dengan luas 900 Ha. Desa Tulungrejo memiliki cukup banyak obyek wisata seperti taman rekreasi dan bermain Selecta, edukasi lutung jawa, ternak sapi dan kelinci, petik apel, air terjun, kampoeng indian. Potensi alam, budaya, dan kehidupan di Desa Tulungrejo menjadi daya tarik wisata pedesaan dan mampu mendatangkan wisatawan untuk berkunjung. Kehidupan desa sebagai tujuan wisata menjadi obyek sekaligus subyek kepariwisataan. Kegiatan pariwisata di

Desa Tulungrejo telah mengalami banyak perkembangan dari berbagai atraksi, produk, dan kelembagaan. Dalam perencanaan dan pengembangan Desa Wisata Tulungrejo pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat.

### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk partisipasi dan keikutsertaan pada kegiatan sosialisasi pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan diadakannya sosialisasi ini harapannya masyarakat akan lebih memahami tentang kepariwisataan dan mampu menyambut baik kedatangan wisatawan ke Desa Wisata Tulungrejo.

### 2. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan masyarakat bersama pemerintah desa mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki Desa Tulungrejo. Setelah itu masyarakat bersama pemerintah desa membangun, mengelola, dan mengembangkan desa wisata. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan yang berdampak pada ketidakmandirian masyarakat, namun masyarakat diajak menjadi subyek pembangunan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang berkelanjutan.

### 3. Tahap Operasional

Pada tahap ini pemerintah desa berpartisipasi fisik sedangkan masyarakat terdapat masyarakat yang berpartisipasi fisik dan berpartisipasi non fisik. Berpartisipasi fisik adalah berpartisipasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata, khususnya yang terlihat wujud pembangunan dan pengembangan secara fisiknya. Berpartisipasi non fisik adalah bentuk partisipasi masyarakat yang tidak berwujud, tetapi hasil dari partisipasi tersebut dapat dirasakan dan berdampak bagi pembangunan dan pengembangan Desa Wisata Tulungrejo. Partisipasi ini meliputi dana, tenaga, pikiran, dan waktu yang disumbangkan.

#### 4. Tahap Pengembangan

Pada tahap ini, pemerintah desa bersama masyarakat berfokus pada pengembangan produk-produk wisata yang ada di desa wisata Tulungrejo yaitu buah apel. Mengingat buah apel merupakan produk unggulan di Desa Tulungrejo. Pemerintah bersama aktivis pariwisata juga membantu serta mengembangkan masyarakat sebagai pelaku dan pengusaha pariwisata. Produk buah apel diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dengan berbagai varian olahan.

#### 5. Tahap Pengawasan

Pada tahap terakhir ini pemerintah desa dan masyarakat desa bersama-sama sebagai penerima pariwisata, pelaku wisata, dan pendukung pariwisata. Pemerintah desa dan masyarakat desa bersama-sama terlibat dalam pengawasan pembangunan, evaluasi pembangunan hingga perbaikan dan pengembangan Desa Wisata Tulungrejo.

Terdapat potensi daya tarik wisata yaitu atraksi wisata yang terdiri dari (*Something to see, something to do, something to buy*), promosi wisata, pasar, kuantitas dan kualitas transportasi, fasilitas umum dan pelayanan.

##### 1. Atraksi wisata

###### a. *Something to see* (dilihat)

Potensi daya tarik wisata yang dapat dilihat merupakan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Desa wisata Tulungrejo. Hal ini karena Desa Tulungrejo menyajikan beberapa daya tarik wisata yang dapat dilihat keindahan alamnya serta sejuknya hawa pegunungan seperti banyaknya jenis bunga di Taman Selecta, pemandangan alam hijau dan segar dari Coban Talun, serta hijaunya daun di kebun apel.

b. *Something to do* (dilakukan)

Potensi daya tarik wisata selain ada yang dapat dilihat oleh wisatawan juga harus ada yang dapat dikerjakan/ dilakukan oleh wisatawan. Salah satu hal penting dalam *something to do* ini adalah sesuatu yang dikerjakan wisatawan merupakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatannya sehari-hari. Selain itu kegiatan yang dilakukan wisatawan tentunya dapat menjadi pengalaman baru dan menjadi kenangan tersendiri bagi wisatawan, sehingga wisatawan akan merasa puas dan akan kembali berkunjung di lain waktu. Salah satu strategi dari desa wisata untuk menarik minat wisatawan ialah membuat paket wisata petik apel, paket wisata motor *trill* dan *outbound*.

c. *Something to buy* (dibeli)

Aspek terakhir ini merupakan sesuatu yang dapat dibeli oleh wisatawan. Hal ini dapat berupa makanan, souvenir khas, maupun benda-benda yang khas dari daerah tersebut. Desa wisata Tulungrejo memiliki buah apel sebagai oleh-oleh khas. Beberapa produk olahan dari aneka Buah ini diolah lagi menjadi keripik buah, jenang dodol apel, minuman sari apel, wine apel, cuka apel, sambal apel, selai apel.

2. Promosi

Promosi merupakan langkah penting untuk mendatangkan calon wisatawan dan promosi juga mempengaruhi keputusan wisatawan untuk berkunjung ke destinasi wisata. Promosi yang dilakukan untuk mengenalkan produk dan potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Tulungrejo, yaitu melalui media massa dan mengikuti kegiatan pameran daerah serta memanfaatkan website agar wisatawan lebih mudah mengakses informasi tentang Desa Wisata Tulungrejo

### 3. Wisatawan

Wisatawan adalah sasaran utama bagi pemilik usaha pariwisata, baik itu pemilik usaha swasta maupun pemerintah. Wisatawan pada umumnya digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu wisatawan domestik dan mancanegara.

### 4. Transportasi

Transportasi merupakan unsur penting dalam dunia pariwisata, transportasi dapat memudahkan wisatawan untuk menuju ke daerah tujuan wisata. Transportasi di Desa Wisata Tulungrejo sudah cukup memudahkan wisatawan untuk berkunjung dan menikmati atraksi ke Desa Wisata Tulungrejo. Untuk menuju desa wisata Tulungrejo, wisatawan dapat menggunakan kendaraan berukuran besar atau kecil seperti sepeda motor, mobil pribadi, mini bus dan bus besar.

### 5. Fasilitas dan Pelayanan

Fasilitas pelayanan yang memadai akan memudahkan wisatawan dalam memenuhi kebutuhan mereka ketika berkunjung ke destinasi wisata. Di Desa Wisata Tulungrejo fasilitas dan pelayanan sudah cukup memadai seperti adanya hotel, homestay, kantor pos, restoran, bank, jaringan internet, telepon, dll. Semua fasilitas dan pelayanan yang tersedia ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan wisatawan supaya berkunjung ke Desa wisata Tulungrejo dan tinggal lebih lama lagi.

## **Analisis Perencanaan**

Dalam kaitannya perencanaan pembangunan desa wisata di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Peran serta pemerintah desa sekaligus pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan potensi alam, budaya, dan kehidupan di Desa Tulungrejo menjadi daya tarik wisata pedesaan dan mampu mendatangkan wisatawan untuk berkunjung. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Warpani (1984) yang menjelaskan bahwa proses pembangunan serta perencanaan merupakan sebuah

usaha untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang terdapat pada suatu wilayah atau negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kondisi wilayah desa dengan luas 807,019 Ha serta posisi desa sebagai areal yang memiliki perkebunan apel terluas di Kota Batu dengan luas 900 Ha merupakan sebuah potensi yang kemudian perlu untuk dikelola dan dikembangkan. Salah satu bentuk pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memetakan kembali potensi-potensi yang bersifat lebih mikro untuk selanjutnya dikembangkan menjadi objek atau atraksi wisata. Adanya berbagai obyek wisata seperti taman rekreasi dan bermain Selecta, edukasi lutung jawa, ternak sapi dan kelinci, petik apel, air terjun, dan kampoeng indian merupakan bukti bahwa perencanaan dalam pembangunan desa wisata telah dilakukan dengan upaya memaksimalkan potensi sumber daya yang ada.

Warpani menggunakan dua aspek perencanaan untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut. Aspek pertama adalah aspek skala perencanaan. Aspek ini berkaitan dengan luas lingkup wilayah perencanaan. Secara garis besar lingkup wilayah perencanaan meliputi luas wilayah desa yaitu 807,019 Ha yang mencakup juga areal dengan luas 900 Ha. Hal tersebut menjadikan banyak lahan yang bisa dimanfaatkan dengan baik sebagai objek atau atraksi wisata. Adanya berbagai atraksi pariwisata yang ada di Desa Tulungrejo menjadi salah satu bukti keberhasilan suatu perencanaan. Dalam hal ini berbagai persiapan dan tahapan perencanaan seperti persiapan atraksi apa saja yang akan disajikan memperhatikan berbagai aspek seperti ketertarikan wisatawan untuk melihat atraksi wisata dan ketertarikan wisatawan untuk datang mengunjungi serta membeli produk-produk yang ada di desa tersebut. Hal tersebut juga harus disertai dengan promosi yang baik serta transportasi dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Aspek berikutnya adalah aspek proses perencanaan. Aspek ini berkaitan dengan dinamika yang terjadi di dalam kehidupan

masyarakat. Dalam upaya merencanakan, masyarakat bisa melalui berbagai tahapan perencanaan seperti tahap persiapan dimana partisipasi masyarakat diwujudkan pada bentuk partisipasi dan keikutsertaan sosialisasi pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Selanjutnya tahap perencanaan, dalam hal ini masyarakat bersama pemerintah mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, dan potensi Desa Tulungrejo. Kemudian dilanjutkan dengan tahap operasional berupa pembuatan sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik serta partisipasi masyarakat untuk dapat mewujudkan desa wisata. Ketika desa wisata sudah terbentuk dengan baik maka tahap selanjutnya adalah pengembangan dan pengawasan, dalam hal ini pengembangan dan pengawasan merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan agar keberlangsungan desa wisata Tulungrejo bisa terus berjalan.

Aspek perencanaan desa wisata menggunakan pendekatan *bottom-up planning*. Dalam hal ini pendekatan *bottom-up planning* merupakan pendekatan yang dinilai efektif dalam mengupayakan tingginya partisipasi masyarakat setempat. Melalui musyawarah tingkat desa hingga ke tingkat provinsi, berbagai permasalahan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dapat dihimpun dan kemudian dirumuskan solusinya. Pada musyawarah tingkat dasar (desa) peran masyarakat merupakan faktor terpenting untuk perencanaan desa wisata yang akan dikembangkan. Selain itu, pendekatan *bottom-up planning* juga merupakan strategi yang tepat untuk mengidentifikasi potensi yang ada.

Prinsip utama pengembangan desa wisata adalah untuk memberikan produk wisata alternatif melalui dengan mengupayakan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sastrayuda menyebutkan bahwa terdapat 5 prinsip dalam mengelola desa wisata. Pertama, pengelolaan desa wisata haruslah memanfaatkan sarana dan prasarana masyarakat setempat. Dalam hal ini, sarana dan prasarana masyarakat setempat dapat dimaknai sebagai potensi yang telah dimiliki masyarakat. Potensi yang ada di masyarakat



meliputi kebudayaan, adat-istiadat, sumber daya alam, kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengemas segala keunikan menjadi sebuah identitas, dan modal sosial, Modal sosial yang dimiliki masyarakat setempat dapat memunculkan potensi-potensi baru di dalam masyarakat. Melalui upaya harmonisasi antara kebutuhan dan sumber daya yang ada, maka potensi tersebut dapat menjadi alat pemenuh kebutuhan masyarakat.

Prinsip yang kedua adalah menguntungkan masyarakat setempat. Salah satu keutamaan dikembangkannya desa wisata adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Dalam pengembangan desa wisata, motivasi yang mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya adalah karena kebutuhan ekonomi masyarakat. Sehingga, apabila pengembangan desa wisata tidak memberikan keuntungan terhadap masyarakat, maka dapat dipastikan desa wisata tersebut tidak akan bertahan lama. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui teori pertukaran, yang mana pada dasarnya manusia mau menjalankan suatu tugas apabila mendapatkan *reward* dari apa yang dijalankannya.

Prinsip yang ketiga adalah berskala kecil untuk memudahkan terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat. Hubungan timbal balik dengan masyarakat merupakan bagian utama dalam kegiatan pembangunan. Hubungan timbal balik ini meliputi kontak dan komunikasi yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah. Proses kontak dan komunikasi terdapat pada PP Nomor 43 Tahun 2014 bab VII tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan dimana perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. Selaras dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa khususnya perencanaan pembangunan desa perlu diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.

Prinsip yang keempat adalah melibatkan masyarakat setempat. Dalam mengembangkan desa wisata, pelibatan masyarakat menjadi prasyarat yang utama. Dalam hal ini masyarakat tidak hanya menjadi objek sebuah program pembangunan namun juga menjadi subyek yang kedepannya akan berdampak kepada keberlanjutan perekonomian di desa wisata tersebut dan masyarakat memiliki keahlian serta mampu mandiri. Untuk melibatkan masyarakat harus melakukan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat. Karena tidak mudah untuk melibatkan masyarakat karena masyarakat memiliki karakteristik masing-masing dan cenderung mempertahankan nilai-nilai yang sudah ada. Oleh karena itu diperlukan penyadaran dan pemahaman akan permasalahan dan potensi yang ada di masyarakat agar masyarakat mampu berkembang dan berdaya. Mengingat pemberdayaan muncul secara partisipatif sebagai salah satu pendekatan pembangunan serta sentralisasi yang bersifat *bottom up*. Keterlibatan masyarakat ini meliputi pemilihan, perancangan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Prinsip yang kelima adalah menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan. Pengembangan produk wisata pedesaan berdasarkan potensi-potensi yang telah ada. Potensi ini baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal sosial, sarana dan prasarana. Dengan adanya penerapan pengembangan produk wisata pedesaan potensi desa akan semakin lestari dan disisi lain juga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Rekomendasi strategi pengembangan Desa Wisata Tulungrejo berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas yaitu:

1. Melibatkan masyarakat di dalam pengembangan desa wisata mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan hingga pengembangan.
  - a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan dan manajemen  
Dalam tahap ini pemerintah tidak hanya berperan sebagai fasilitator, namun masyarakat dan pemerintah bersama-

sama merancang, merencanakan, dan membuat keputusan akan pengembangan desa wisata.

- b. Partisipasi dalam pelaksanaan dan evaluasi.
  - 1). Penduduk Desa Tulungrejo menyediakan *homestay* agar wisatawan dapat menginap yang tentu akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
  - 2). Penyediaan lahan parkir kendaraan yang nyaman dan aman untuk wisatawan.
  - 3). Masyarakat ikut berpartisipasi dalam penjualan berbagai olahan makanan dan minuman dari apel dan makanan dan minuman lainnya bagi para pengunjung, cinderamata, serta sebagai pekerja di wisata tersebut.

Di dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang berjalan masyarakat dapat dibantu oleh Pemerintah. Partisipasi masyarakat.

- 2. Mengembangkan program desa wisata yang khas sesuai potensi alam dan budaya masyarakat dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan keunggulan yang ada dan dimiliki oleh Desa Tulungrejo. Keunggulan tersebut merupakan peluang sebagai paket wisata yang menarik sehingga menarik minat pengunjung untuk datang dan menikmati.
- 3. Membentuk lembaga atau organisasi masyarakat untuk mengelola desa wisata berbasis masyarakat. Pembentukan kelompok sadar wisata didasari oleh kebutuhan akan lembaga/kelompok masyarakat sebagai pengelola wisata agar manajemen Desa Wisata Tulungrejo dapat berjalan sesuai perencanaan dan peraturan.

Melakukan promosi Desa Wisata Tulungrejo berbasis masyarakat.

  - a. Promosi melalui media cetak. Promosi ini bekerjasama dengan pemerintah daerah dan perusahaan sekitar dengan cara membuat spanduk, banner, iklan di koran, majalah,

buku, stiker, pamflet, flyer dan lain sebagainya. Mengingat pasar tidak hanya anak muda namun juga orang berumur maka juga dibutuhkan promosi secara *offline*.

- b. Promosi melalui media elektronik. Media elektronik merupakan salah satu cara untuk mempromosikan Desa Wisata Tulungrejo yaitu dengan menggunakan televisi dan juga radio. Promosi ini tentu tidak menggunakan dana masyarakat namun bekerjasama dengan pemerintah dan perusahaan televisi dan radio lokal.
  - c. Promosi melalui media internet. Media internet yang digunakan adalah dengan membuat *website*, *instagram*, *twitter*, dan *line*. Strategi promosi ini untuk menyentuh pasar dari berbagai kalangan. Mengingat di era teknologi ini individu mengalami ketergantungan terhadap gadget dimana gadget pasti terkoneksi dengan internet. Apalagi teknologi internet ini membuat yang jauh menjadi dekat dan informasi juga tersebar dalam waktu yang sebentar. Jadi promosi melalui media ini dirasa efektif dan efisien.
  - d. Promosi melalui media lain. Promosi ini dilakukan dengan menyelenggarakan acara atau pagelaran seni secara rutin dengan tujuan sebagai daya pikat kepada masyarakat untuk datang. Wisatawan lokal maupun asing selain menikmati keindahan alam juga ingin menyaksikan dan mengetahui adat-istiadat, budaya, *the way of life*, peninggalan sejarah, serta bangunan kuno. Mengingat budaya merupakan atraksi yang paling disukai oleh para turis.
4. Membangun koordinasi antara pemerintah dan juga kelompok masyarakat dengan meningkatkan kapasitas lembaga Desa Wisata Tulungrejo. Peningkatan kapasitas kelembagaan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu tujuan secara efektif, efisien, dan responsif.

5. Pendampingan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki mental sadar wisata. Pendampingan ini bertujuan untuk memulai jalannya proses, karena didalam penerapan desa wisata yang berbasis masyarakat tidak dilakukan secara instan namun bertahap. Pendampingan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pendampingan ini untuk memfasilitasi masyarakat agar kedepannya masyarakat dapat mandiri.
6. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia masyarakat Desa Tulungrejo dengan mengadakan pelatihan rutin terutama pada bidang pariwisata Diperlukan program pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia masyarakat Desa Tulungrejo seperti:
  - a. Program pelayanan prima usaha pariwisata.
  - b. Program pelatihan dan peningkatan seni budaya lokal.
  - c. Program pengelolaan wisata apel dan olahan apel.
  - d. Program pelatihan pengembangan usaha desa wisata.
  - e. Program pelatihan pengelolaan desa wisata.
  - f. Program pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat dan bencana alam
7. Memberikan penyuluhan, pengarahan serta penjelasan kepada masyarakat akan pentingnya pariwisata dan manfaat pembangunan pariwisata yang berdampak pada peningkatan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dengan penyuluhan ini masyarakat akan lebih semangat dan memiliki inovasi dalam perbaikan dan pengembangan Desa Wisata Tulungrejo yang memiliki karakteristik unik dan memiliki pasar tidak hanya wisatawan lokal namun juga wisatawan asing.

## Penutup

Pembangunan Desa Wisata menjadi bentuk aplikatif dalam teori perencanaan, perencanaan pembangunan yang dilakukan suatu daerah menyesuaikan permasalahan kebutuhan masyarakat sekitar, serta potensi yang ada. Adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam perencanaan penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya telah diatur dan disyaratkan dalam undang-undang. Melalui perencanaan, baik pemerintah desa maupun masyarakat dapat menentukan bagaimana arah pembangunan desa melalui serangkaian tahapan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain adalah bagaimana mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan, dan sumber daya yang ada di desa, penetapan tujuan bersama, perumusan strategi berdasarkan prioritas kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, serta bagaimana melaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan tersebut melalui berbagai program pembangunan desa.

Dalam perencanaan suatu pembangunan diperlukan penyesuaian terhadap kehidupan masyarakat sekitar yang akan menjadi objek serta subjek suatu pembangunan. Pembangunan desa wisata yang telah dilaksanakan sejumlah wilayah menjadi salah satu bentuk pembangunan desa yang membutuhkan perencanaan yang baik dan tepat sasaran. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan dampak positif pada suatu wilayah dalam membangun lingkungan masyarakat khususnya pemberdayaan masyarakat. Pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat ini tidak bersifat ekonomis semata namun juga bersifat sosial dan budaya. Desa wisata sendiri merupakan kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di desa wisata ini penduduk masih memiliki tradisi dan budaya yang masih lestari. Faktor terpenting adanya desa wisata ini adalah terjaganya alam dan lingkungan. Pembangunan desa telah menjadi agenda penting pemerintah dalam mewujudkan negara Indonesia yang maju. Pembangunan desa mandiri yang telah mencapai 5.559 desa pada tahun 2018 menjadi bukti bahwa pembangunan desa menjadi agenda penting bagi pemerintah.

Dana desa yang diberikan kepada setiap desa dapat dikelola oleh pemerintah setempat guna merencanakan serta mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pemanfaatan dana desa yang baik diiringi dengan adanya pemberdayaan masyarakat akan memberikan efek yang baik di masa yang akan datang. Sehingga bentuk pembangunan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan yang berada dalam masyarakat tersebut.

Perencanaan dalam pembangunan Desa Wisata Tulungrejo yang menyesuaikan dengan potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia, menghasilkan sistem pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Pemanfaatan lahan yang luas serta pembentukan sistem yang dimiliki desa wisata tersebut, memudahkan dalam proses pemanfaatan desa wisata bagi perekonomian masyarakat setempat. Perencanaan yang dilakukan dalam menuju sebuah pembangunan desa wisata tentunya menjadi aspek penting dalam berdirinya Desa Wisata Tulungrejo tersebut. Pelaksanaan suatu rencana yang baik dan benar dapat menciptakan suatu sistem yang tepat sehingga desa wisata tersebut dapat berkembang dan menarik banyak minat pengunjung untuk menghabiskan waktu liburannya di desa wisata tersebut. Selain itu adanya desa wisata ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2019, *Indeks Pembangunan Desa 2018*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Eva Kurniawati, Djahur Hamid, Luchman Hakim, 2018, Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 54, No. 1.
- Hamdani, Trio, 2018, *Ada 1.700 Desa Wisata yang Bisa Genjot Ekonomi RI*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4336859/ada->

- 1700-desa-wisata-yang-bisa-genjot-ekonomi-ri, diakses tanggal 24 Oktober 2019.
- PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Sarinah, 2017, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Deepublish.
- Sastrayuda, G. S, 2010, *Handout Mata Kuliah Konsep Resort and Leisure*, [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR\\_S/SEMINAR/PENGEMBANGAN\\_DAN\\_PENGELOLAAN\\_RESORT\\_WISATA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR_S/SEMINAR/PENGEMBANGAN_DAN_PENGELOLAAN_RESORT_WISATA.pdf), diakses tanggal 16 November 2019.
- Siagian, S. P, 1983, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung.
- Syam, Nina Winangsih, 2014, *Perencanaan Pesan dan Media*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Todaro, Michael. P, 1986, *Perencanaan Pembangunan: Model dan Metode*, Jakarta: Intermedia.
- Warpani, Suwardjoko, 1984, *Analisis Kota dan Daerah*, Bandung: Penerbit ITB.





# ANALISIS KEBERHASILAN IMPLEMENTASI MODEL PERENCANAAN DESA WISATA NGLANGGERAN

Disusun oleh:

Nandya Erlisa Galis

17/409890/SP/27735

Ela Puji Hariani

17/413191/SP/27908

I Kadek Pras Setiawan

17/413194/SP/27911

Taufiq Noor Huda

17/414920/SP/28047

## Latar Belakang

Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen dimana perencanaan adalah suatu hal yang wajib dalam meramu suatu program atau kebijakan. Bahkan, pengimplementasian suatu program atau kebijakan merupakan sebuah produk dari perencanaan. Perencanaan dapat dikatakan sebagai proses pembuatan dasar tindak dari sebuah kebijakan yang mana di kemudian hari akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu program atau kebijakan. Dapat dikatakan, perencanaan yang baik akan menghasilkan program yang baik pula, demikian sebaliknya perencanaan yang buruk akan menghasilkan program yang buruk. Namun, hal ini tidak selamanya menjadi patokan, ada *ability* dan *willingness* terhadap penyelenggaraan program tersebut yang juga mempengaruhi implementasinya. *Ability* mengarah pada kekuatan atau kemampuan atas sumberdaya dalam mengolah, mengelola, dan memanfaatkannya untuk mendukung kinerja program. Sedangkan, *willingness* mengacu pada kemauan baik oleh aktor penyelenggara

program maupun masyarakat sebagai penerima program tersebut dalam melakukan proses implementasinya.

Desa wisata menjadi program *bottom up* yang pada masa ini menjadi program favorit bagi desa-desa di Indonesia yang memiliki potensi-potensi unik. Kekhasan wilayah desa menjadi senjata dalam menawarkan potensi desa. Sejauh ini, program desa wisata telah menjadi program *mainstream* dalam ranah pengembangan potensi desa. Namun, seringkali pengadaan program ini cenderung tidak memperhatikan konsep desa wisata itu sendiri. Masyarakat kadang menyamakan bahwa dalam membentuk desa wisata sama halnya dengan membentuk objek wisata. Objek wisata yang dimaksud masuk sebagai bagian dari konsep wisata desa. Padahal, kedua hal ini jelas berbeda. Pada umumnya, konteks desa wisata mengacu pada setiap komponen desa yang dapat dijual, dikemas, dan dipasarkan sebagai produk atau atraksi wisata. Dalam segi keterlibatan, desa wisata membutuhkan kontribusi dari setiap elemen desa baik itu sumber daya manusia, birokrasi desa, dan lainnya. Suwanto dalam Febri di Kumparan.com (2018) menyebutkan bahwa desa wisata mengeksplor kultur budaya yang ada di masyarakat untuk mendukung penyelenggaraannya. Sedangkan, wisata desa adalah objek wisata yang ada di suatu desa.

Terlepas dari miskonsepsi tentang konsep desa wisata tersebut, program ini kalau dilakukan dengan tepat akan menghasilkan hasil yang baik. Seperti yang terjadi di Desa Wisata Nglanggeran, pelaksanaannya dapat dikategorikan sebagai *best practice* dari program ini. Desa Nglanggeran terletak di Kecamatan Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D. I. Yogyakarta. Secara bentuk topografi, Desa Nglanggeran adalah daratan tinggi yang berada di ketinggian 200 - 700 meter diatas permukaan laut dan wilayahnya berupa bukit, lembah, dan pantai. Luas Desa Nglanggeran adalah 762.790 Ha (Data Monografi desa 2017). Dalam segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Desa Nglanggeran sebagian besar berpendidikan rendah sampai sedang. Maksudnya ialah penduduk

di desa ini lebih banyak mengenyam pendidikan sampai SMP dan SMA.

Desa Wisata Nglanggeran adalah salah satu *best practice* program desa wisata. Hal ini, tidak terlepas dari bagaimana para aktor dan *stakeholder* dalam meramu program ini dan menyesuaikannya dengan kondisi dan potensi yang ada di Nglanggeran. Sehingga, apa yang telah dihasilkan melalui perencanaan tersebut dapat menjadi sebuah inspirasi untuk wilayah lain dalam mengembangkan potensi wisata melalui program desa wisata ini. Maka, melalui tulisan ini, akan dianalisis model dari perencanaan yang dilakukan pada program Desa Wisata Nglanggeran. Model perencanaan yang digunakan sebagai referensi adalah model perencanaan dari Barclay M. Hudson yang terdiri dari lima model perencanaan, yaitu perencanaan sinoptik, inkremental, transaktif, advokasi, dan radikal.

Seperti yang ditulis sebelumnya, perencanaan merupakan proses penting dalam pengadaan program kebijakan. Keberhasilan terhadap program akan sangat dipengaruhi oleh adanya perencanaan yang baik. Untuk itu, penting sekali untuk mempelajari proses perencanaan dari pelaksanaan program yang telah berhasil dilaksanakan. Untuk itu, Desa Wisata Nglanggeran sebagai wujud keberhasilan implementasi program desa wisata dapat menjadi suatu rujukan bagi daerah lain dalam proses perumusan maupun implementasi program desa wisata. Hal yang perlu dilihat dalam mengidentifikasi pelaksanaan program yaitu model dan teori perencanaan, langkah-langkah perencanaan dan implementasi, monitoring dan evaluasi, pengelolaan, dan lain sebagainya. Tulisan ini, akan fokus untuk membahas atau menganalisis model dan teori perencanaan yang digunakan dalam merencanakan program desa wisata di Nglanggeran melalui teori perencanaan Barclay M. Hudson yang telah sedikit disinggung di atas. Selain itu penulis akan menganalisis implementasi dari program tersebut selama beberapa tahun telah dijalankan serta dampak yang ditimbulkan oleh program ini kepada masyarakat setempat.

## Kriteria Perencanaan Desa Wisata Nglanggeran

Hudson (1979) mengemukakan lima teori dalam perencanaan, diantaranya adalah teori sinoptik, teori inkremental, teori transaktif, teori advokasi, dan teori radikal yang kemudian dalam perkembangannya di kembangkan oleh Tanner (1981) dengan sebutan SITAR teori. Teori radikal sendiri adalah sebuah teori yang menekankan mengenai pentingnya kebebasan organisasi atau lembaga lokal yang ada di masyarakat untuk melaksanakan perencanaannya sendiri secara mandiri, dengan maksud agar dapat dengan cepat mengubah keadaan atau kondisi dari lembaga itu sendiri sesuai dengan apa yang dibutuhkannya.

Perencanaan yang menggunakan teori radikal ini cenderung bersifat desentralistis yang melibatkan partisipasi maksimum dari individu dan mengurangi atau meminimalkan peran pemerintah maupun pusat. Kami mengambil kriteria perencanaan dari Desa wisata Nglanggeran untuk menilai penggunaan teori Radikal, dimana dalam teori perencanaannya menekankan pentingnya kebebasan lembaga atau organisasi lokal untuk melakukan perencanaan sendiri dengan maksud agar dapat dengan cepat mengubah keadaan lembaga supaya tepat dengan merespon kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakatnya .

Perencanaan ini bersifat desentralisasi dengan partisipasi maksimum dari individu dan partisipasi yang minimum dari pemerintah pusat atau manajer tertinggi, jadi dalam perencanaan yang menggunakan teori radikal sebagai pendekatannya cenderung akan mengurangi keterlibatan pemerintah pusat maupun *top manager*. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat disini adalah mengacu kepada pentingnya kerja sama antar personalia.

Penerapan teori perencanaan radikal, dalam penerapan rancangan perencanaan desa wisata Nglanggeran terjadi pada awal-awal inisiasi itu dibuat, yakni pada tahun 1999-2011. Karena pada tahapan tersebut benar-benar mengawali keterlibatan masyarakat desa Nglanggeran sendiri untuk mengenali kebutuhan-kebutuhan

apa yang harus dipenuhi kemudian sadar akan potensi-potensi yang mereka miliki di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam awal-awal tahapan ini bisa dibilang mandiri, karena keterlibatan pemerintah sangat kecil, dan masyarakat didorong untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan benar-benar sadar dan sepenuhnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

## Pendekatan Model Teori Perencanaan terhadap Proses Pengembangan Desa Wisata

Budiman, Arief. Novia, Aziza et al. (2016) Kritik, “Krisis dan Tantangan Teori Perencanaan terhadap Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran”

Inisiasi Awal dibuatnya perencanaan desa wisata Nglanggeran (1999-2006)	Pengembangan desa pariwisata (2007-2011) Pasca gempa terjadi	Peningkatan kapasitas (2011-2013)	Desa mandiri (2014-sekarang)
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adanya upaya pelestarian lingkungan dari hasil kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tempat mereka tinggal</li> <li>● Menemukan <i>discovery</i> potensi-potensi yang ada di desa Nglanggeran</li> <li>● Rancangan perencanaan kegiatan berbasis eko wisata</li> <li>● Pendanaan kegiatan bersifat swadaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembentukan lembaga BPDW (Badan Pengelola Desa Wisata) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat</li> <li>● Mulai muncul pendampingan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)</li> <li>● Bantuan dari pemerintah melalui dana stimulan PNPMM mandiri pariwisata (pelatihan)</li> <li>● Peran serta Pemkab Gunungkidul dalam mempromosikan desa wisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa</li> <li>● Perubahan sosial masyarakat yang tadinya lebih banyak pada sektor agraris menjadi jasa pariwisata</li> </ul>

Dalam Pendekatan model teori perencanaan di atas dapat dengan jelas terlihat bahwasannya di tahun 1999-2011, masyarakat sepenuhnya terlibat dengan mandiri dan tanpa bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya. Di akhir tahun 2011, ada intervensi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul yang memberikan program pendampingan. Kemudian pada tahun-tahun setelahnya pemerintah giat terlibat dalam pengembangan perencanaan desa wisata Nglanggeran. Pendekatan Radikal memang cocok dilakukan sebagai tahapan awal untuk sebuah perencanaan. Karena dalam mengembangkannya, teori ini bersifat spontan dan dimulai oleh masyarakat itu sendiri. Jika bukan dari kesadaran akan memahami kebutuhan masyarakat itu sendiri maka akan sulit perencanaan itu tepat sasaran.

Selanjutnya, dalam proses membuat perencanaan yang baik maka akan selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, untuk itu pasti akan selalu terjadi yang namanya pertentangan, dalam menggali kekuatan integrasi masyarakat, maka perlu untuk mengatasi pertentangan atau permasalahan-permasalahan dalam masyarakat dengan melalui tahapan penyelesaian masalah yaitu:

1. Merumuskan pertentangan yang terjadi  
Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat pasti selalu terjadi yang namanya pertentangan maka dari itu perlu adanya identifikasi permasalahan-permasalahan apa yang sedang terjadi di masyarakat.
2. Menyelidiki sebab musabab terjadinya pertentangan  
Ketika sudah melakukan identifikasi masalah, kemudian kita melakukan analisis mengenai apa sebenarnya penyebab permasalahan itu terjadi, harus dilakukan dari akarnya agar mengetahui secara konkret.
3. Mendengarkan semua pihak yang terlibat  
Dalam usaha memecahkan masalah, kita harus mendengarkan semua pihak yang terlibat dan tidak berpihak kepada satu



- kelompok saja, dalam hal ini berusahalah menjadi pihak yang netral.
4. Menimbang secara obyektif pro dan kontranya semua pendapat, mencurahkan perhatian pada ide dan bukan pada orangnya, bedakan fakta dan fiksi, bedakan kebenaran dan propaganda, bedakan itikad baik dan prasangka. Obyektifitas dalam usaha menyelesaikan masalah merupakan hal yang pokok, baik dalam meimbang kelompok yang pro maupun yang kontra. Melihat segala sesuatu sesuai dengan kebenarannya atau fakta di lapangan dengan mengesampingkan segala prasangka maupun hal-hal yang negatif.
  5. Buatlah putusan dengan menyetujui pendapat yang lebih banyak segi baiknya  
Ketika sudah diperoleh pendapat dari hasil *hearing* semua elemen masyarakat, maka tetapkanlah keputusan yang lebih banyak segi positifnya dengan mempertimbangkan segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan.

Sehingga selanjutnya diharapkan pembuatan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.

### **Implementasi Perencanaan Desa Wisata Nglanggeran (Perencanaan Aplikatif)**

Keberhasilan implementasi perencanaan desa wisata Nglanggeran tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang ingin menciptakan kondisi yang lebih baik lagi. Pada awalnya, perhatian pemerintah pada desa ini sangat minim. Hal itulah yang menjadi salah satu dorongan bagi masyarakat untuk berubah dan memberdayakan diri sendiri. Dengan minimnya intervensi dari pemerintah, masyarakat justru memiliki otonomi penuh dalam proses perencanaan terkait tujuan dan arah gerak sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Hal ini menunjukkan adanya desentralisasi

dimana setiap daerah bebas menentukan kebijakan yang cocok untuk diri sendiri. Melalui inisiatif dari *local hero* desa Nglanggeran, masyarakat merencanakan pemanfaatan potensi yang dimiliki guna mengatasi berbagai masalah yang ada disana.

Adanya potensi gunung api purba yang merupakan satu-satunya gunung purba di Yogyakarta dan keadaan alam yang indah menjadi daya tarik utama dalam desa wisata Nglanggeran. Konsep desa wisata disana benar-benar menjual kultur budaya desa yang unik. Keunikan sebuah desa wisata menjadi penentu daya jual di dunia pariwisata. Semakin khas suatu daerah maka daya tarik dan potensinya semakin besar. Namun potensi tersebut tidak akan berguna apabila tidak memiliki pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang baik tentu dilakukan oleh sumber daya manusia yang baik. Dengan dipelopori pemuda setempat, desa wisata mulai dirintis. Pengelolaan desa wisata ini melibatkan peran serta masyarakat secara luas. Berbagai elemen masyarakat memberikan dukungan dan bekerja sama dalam merintis desa wisata.

Selain keunikan dan keterlibatan masyarakat luas dalam perencanaan, salah satu yang menjadi daya dukung keberhasilan implementasi perencanaan Desa Wisata Nglanggeran adalah karena masyarakat yang mau belajar. Kegiatan yang dilakukan secara bertahun-tahun tidak tergantung dengan peran pemerintah. Masyarakat mengorganisasi diri untuk melakukan pemberdayaan. Melalui proses belajar sosial, masyarakat dituntut untuk terus mencoba dan pantang menyerah dalam mengembangkan potensi yang ada. Pembelajaran masyarakat dilakukan dengan pengalaman. Pengelolaan dilakukan dengan sistem *trial and error* sembari mencari pengalaman dari keberhasilan pengelolaan desa wisata lain. Studi banding dilakukan sebagai awal kegiatan mitra antar desa wisata. Kemitraan yang baik dengan berbagai pihak tentu akan menjadi pendukung dalam pengelolaan desa wisata.

Salah satu tujuan dari pemanfaatan potensi Desa Nglanggeran menjadi Desa Wisata adalah untuk mengatasi masalah

kemiskinan. Sehingga pengelolaannya sebisa mungkin memiliki dampak luas dan merata bagi seluruh masyarakat. Perencanaan Desa Wisata Nglanggeran sangat baik yakni membagi rata peran dalam pengelolaan desa wisata yang berbasis masyarakat. Implementasi dari perencanaan ini berupa pengelolaan yang murni dilakukan oleh masyarakat setempat, kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat setempat membuka toko di objek wisata desa. Selain itu *homestay* dan penyediaan catering tamu dikoordinasi secara terpadu. Sehingga terjadi pemerataan pendapatan bagi masyarakat yang menyewakan rumahnya menjadi *homestay* dan menyediakan catering bagi tamu.

Pengelolaan seperti ini akan meminimalisir terjadinya konflik kepentingan dalam masyarakat. Sehingga tidak ada ketimpangan dalam merasakan dampak desa wisata yang ada. Ketika terjadi sebuah masalah, masyarakat akan mengadakan musyawarah dan berdiskusi untuk mengambil keputusan penyelesaiannya. Tentu keputusan diambil dengan mempertimbangkan penyebab dan kemungkinan dampak sehingga dapat meminimalisir dampak negatif. Pengambilan keputusan lewat musyawarah juga dimaksudkan untuk memberikan transparansi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan tersingkirkan.

## **Analisis**

### **a.) Dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat**

Pariwisata merupakan konsumsi masyarakat yang tidak ada habisnya. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (Undang-

undang Kepariwisata No. 10 Tahun 2009 pasal 1). Dalam Undang-Undang Kepariwisata juga menjelaskan asas, manfaat, dan tujuan dari sebuah kepariwisataan. Fungsi dari kepariwisataan adalah sebagai pemenuh kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (Undang-undang Kepariwisata pasal No. 10 Tahun 2009 Pasal 3). Pasal 4

Dalam pasal 4 UU Kepariwisata No 10 Tahun 2009 menyebutkan tujuan dari kepariwisataan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. menghapus kemiskinan.
- d. mengatasi pengangguran.
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
- f. memajukan kebudayaan.
- g. mengangkat citra bangsa.
- h. memupuk rasa cinta tanah air.
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangs.
- j. mempererat persahabatan antarbangsa.

Pada tulisan ini menjelaskan dampak adanya desa wisata terhadap perekonomian masyarakat. Pembangunan dan pengembangan daerah pariwisata secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi dan melibatkan masyarakat. Sehingga akan menimbulkan dampak di masyarakat, dampak tersebut bisa positif atau negatif. Seperti yang sudah kita pahami bahwa potensi alam adalah modal besar dalam menjadikan sebuah tempat menjadi daerah pariwisata. Pengembangan daerah wisata akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat apabila dalam pengelolaannya melibatkan masyarakat sekitar, namun juga dapat menimbulkan kerugian apabila pengelolaannya yang dilakukan tidak tepat.

Pitana dan Diarta (2009) menyebutkan bahwa ada 8 kategori dampak pariwisata terhadap kondisi ekonomi seperti berikut :

- a. Dampak terhadap penerimaan devisa.
- b. Dampak terhadap pendapatan masyarakat.
- c. Dampak terhadap kesempatan kerja.
- d. Dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan.
- e. Dampak terhadap kepemilikan dan kontrol (ekonomi) masyarakat.
- f. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya.
- g. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Desa Nglanggeran terletak di Kecamatan Pathuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D. I. Yogyakarta. Topografi Desa Nglanggeran adalah daratan tinggi 200 - 700 meter diatas permukaan laut dan wilayahnya berupa bukit, lembah, dan pantai. Luas Desa Nglanggeran 762.790 Ha (Data Monografi Desa 2017).

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Nglanggeran masih dalam rentang rendah sampai sedang. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memanfaatkan potensi alam yang ada di Desa Nglanggeran tersebut. Dari data pendidikan tersebut dapat dikaitkan dengan mata pencaharian masyarakat lokal di Desa Nglanggeran, dimana dengan tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat cukup rendah maka 36% masyarakat bermata pencaharian di sektor pertanian yang dikelola secara perorangan. Mata pencaharian lainnya yang ada seperti peternak, perkebunan, industri kerajinan topeng, industri makanan olahan. Pertanian di Desa Nglanggeran terdiri dari pertanian padi. Kemudian perkebunan yang dikelola terdiri dari perkebunan buah, cocoa, dan sebagainya. Selain itu masyarakat juga berternak kambing etawa.

Namun pengelola Desa Wisata Nglanggeran dapat dikatakan cukup berhasil dengan menjadikan tantangan tersebut menjadi potensi. Mereka menjadikan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai salah satu atraksi wisata yang disuguhkan kepada wisatawan dengan harga yang cukup tinggi. Masyarakat mendapatkan pengetahuan dan dapat praktik secara langsung

tentang cara bertani, beternak dan juga mengolah hasil perkebunan. Kultur asli dari desa ini menjadi sangat menarik bagi wisatawan dan dapat menjadi wisata edukasi.

**Tabel Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2012-2015**

No	Tahun	Kunjungan Wisatawan		Total
		Domestik	Mancanegara	
1	2012	27675	200	27875
2	2013	85424	234	85658
3	2014	324827	476	325303
4	2015	255388	529	255917

*Sumber: Pengelola Desa Wisata Nglanggeran*

Implementasi perencanaan desa wisata di Desa Nglanggeran bisa dikatakan berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Banyaknya kunjungan wisatawan menandakan bahwa desa wisata tersebut berhasil menarik pengunjung yang kemudian akan berdampak pada perekonomian Desa Nglanggeran.

Berdasarkan data statistik pemerintah Desa Nglanggeran tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Nglanggeran diketahui 29,5% masuk dalam kategori miskin, sedang sisanya 59,5% dalam kategori sedang dan kategori kaya sebanyak 11%. Jumlah masyarakat lokal yang belum memiliki pekerjaan formal tetap sekitar 31 %, disusul 35,63 % masyarakat dengan berbagai macam profesi lainya (Profil Desa Nglanggeran, 2015).

Dari penelitian - penelitian yang sudah banyak dilakukan di Desa Nglanggeran tentang dampak desa wisata terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Dapat diambil garis besarnya bahwa adanya desa wisata di Nglanggeran yang termasuk upaya pengembangan potensi desa dapat dikatakan berhasil hal tersebut diketahui dari peningkatan pendapatan yang terjadi di berbagai bidang mata pencaharian seperti pedagang, pekerja jasa pariwisata, dan sebagainya. Peningkatan juga terjadi pada harga tanah yang

sebelumnya masih rendah setelah ada desa wisata menjadi melonjak naik. Selain berdampak langsung pada peningkatan ekonomi, adanya Desa Wisata Nglanggeran juga memunculkan lapangan kerja baru yang mampu menyerap warga sekitar sebagai pengelola daerah wisata. Dengan adanya Desa Wisata Nglanggeran juga memicu pertumbuhan infrastruktur di daerah tersebut menjadi pesat, juga karena alasan penunjang pariwisata.

**Tabel Data Omset Desa Wisata Nglanggeran**

No	Tahun	Omset Pengelolaan
1	2012	Rp 81.225.000, -
2	2013	Rp 424.690.000, -
3	2014	Rp 1.422.915.000, -
4	2015	Rp 1.541.990.000, -

*Sumber: Pengelola Desa Wisata Nglanggeran*

Dari tabel data di atas digunakan untuk melihat keberhasilan dalam implementasi perencanaan pengembangan potensi alam. Salah satu hasil dari Desa Wisata Nglanggeran adalah omset, dimana dalam setiap tahunnya omset dari Desa Wiasata Nglanggeran mengalami peningkatan.

Meski Desa Nglanggeran menjadi desa wisata yang sukses namun kepemilikan dan kontrol masih dipegang oleh masyarakat. Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* (CBT). Oleh karena itu sampai saat kepemilikan dan kontrol dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran sepenuhnya masih milik masyarakat lokal. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan data personil pengelola yang 100 persen adalah masyarakat lokal. Masuknya investor asing, selain dari pemerintah juga tidak ada.

## **b.) Dampak terhadap sosial budaya masyarakat**

Dilansir dalam laman resmi desa Nglanggeran, profil sosial masyarakat desa dalam aktivitas kesehariannya sangat taat dalam menjalankan ibadah keagamaan. Setiap Rukun Tetangga (RT) dan Padukuhan memiliki kelompok-kelompok pengajian, di Padukuhan Gunung Butak ada yasinan keliling tingkat RT tiap malam jum'at. Pada peringatan hari besar Islam, penduduk Desa Nglanggeran kerap menggelar acara peringatan dengan Kenduri, dan dalam agenda Bersih Dusun/Desa ada kirab budaya dengan tema yang disesuaikan dengan tema yang disepakati bersama. Sebagian besar warga Desa Nglanggeran memeluk Agama Islam. Gelar perayaan lain selalu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap pedukuhan akan turut serta dan semangat menampilkan berbagai kegiatan Karang Taruna ( lomba-lomba).

Karang Taruna di Desa Nglanggeran yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna Bukit Putra Mandiri tingkat Desa, menjadi aktor utama dalam banyak kegiatan desa. Kelompok ini aktif menggelar program kegiatan untuk isu demokrasi kepada warga, penguatan ekonomi produktif, pelatihan penanggulangan bencana, dan Pengelolaan Wisata yang tergabung dalam wadah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Ada sebagian penduduk Desa Nglanggeran bekerja merantau di daerah di luar Yogyakarta. Namun, ikatan sosial mereka terhadap tanah kelahiran tetap tinggi.

Dari sisi lainnya, desa Nglanggeran kini mengembangkan usaha-usaha untuk melestarikan kebudayaan. Desa Nglanggeran saat ini memiliki beberapa sanggar kesenian serta kelompok-kelompok seni budaya yang masih aktif dalam melestarikan seni dan budaya lokal, misalnya kelompok karawitan anak dan dewasa, kelompok jatilan, kelompok seni ketek ogleng, reog, kelompok kesenian gejlak lesung, solawatan, sanggar tari, kelompok kesenian dangdut, calung dan organt tunggal.



## Kesimpulan

Merujuk pada bahasan di atas, hadirnya Desa Wisata Nglanggeran sebagai produk dari perencanaan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat setempat. Perencanaan yang dilakukan secara mandiri melalui sistem desentralisasi dan model radikal dimana masyarakat dan lembaga lokal secara mandiri melakukan reformasi terhadap pengelolaan sumber daya desa menghasilkan peningkatan secara radikal bagi kesejahteraan masyarakat. Model perencanaan yang digunakan dianggap telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem kelola yang baik. Di samping itu, implementasi program yang dilakukan dengan konsep *do and learning* juga dinilai efektif. Masyarakat mengelola desa wisata sembari belajar dan terus mengupgrade kemampuannya untuk praktik pengelolaan yang lebih baik lagi. Beberapa tahun perjalanan program ini, telah membawa berbagai peningkatan terhadap masyarakat. Hal ini diketahui dari peningkatan pendapatan yang terjadi di berbagai bidang mata pencaharian seperti pedagang, pekerja jasa pariwisata, dan sebagainya. Peningkatan juga terjadi pada harga tanah yang sebelumnya masih rendah setelah ada desa wisata menjadi melonjak naik. Selain berdampak langsung pada peningkatan ekonomi, adanya Desa Wisata Nglanggeran juga memunculkan lapangan kerja baru yang mampu menyerap warga sekitar sebagai pengelola daerah wisata. Selain itu, adanya pengembangan desa wisata ini telah mendorong peningkatan infrastruktur desa ke arah yang lebih baik.

Hasil tersebut tentu buah dari kerja keras masyarakat selama beberapa tahun penyelenggaraan program ini. Hal ini, sekaligus menunjukkan bahwa dengan adanya perencanaan yang baik yang diimbangi dengan *ability* dan *willingness* yang baik pula dari aktor dan masyarakat luas dalam pengimplementasian program sekiranya akan dapat menghasilkan hasil yang baik. Kemudian pula, dengan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang disebabkan oleh adanya program ini, kemudian ini dapat menjadi inspirasi sekaligus

menjadi pelecut semangat bagi daerah lain untuk berkembang pula. Di sisi lain, keberhasilan ini juga harusnya menjadi pelecut bagi Desa Nglanggeran sendiri untuk terus mengembangkan masyarakatnya sesuai dengan kearifan lokalnya.

## Daftar Pustaka

- Aruan, Daniel. Makalah Teori Perencanaan.  
[https://www.academia.edu/25739041/Teori\\_Perencanaan](https://www.academia.edu/25739041/Teori_Perencanaan) diakses pada 25 Oktober 2019
- Budiman, Arief. Novia, Aziza et al. 2016. Kritik. Krisis dan Tantangan Teori Perencanaan terhadap Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran.
- Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul, 2013, Profil Wilayah Desa, diakses dari <https://www.nglanggeran-patuk.desa.id/first/artikel/705> diakses pada 25 Oktober 2019.
- Febri, M Anang. 2018. Begini Perbedaan antara Desa Wisata dengan WisataDesa. Diakses dari Kumparan.com: <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/bloktuban/begini-perbedaan-desa-wisata-dan-wisata-desa-1537154062364493344> (Diakses pada 25 Oktober 2019)
- Hermawan, Hary, 2016, DAMPAK PENGEMBANGAN DESA WISATA NGLANGGERAN TERHADAP EKONOMI MASYARAKAT LOKAL, diakses dari Researchgate 2 september 2016. [https://www.researchgate.net/publication/319876333\\_DAMPAK\\_PENGEMBANGAN\\_DESA\\_WISATA\\_NGLANGGERAN\\_TERHADAP\\_EKONOMI\\_MASYARAKAT\\_LOKAL?enrichId=](https://www.researchgate.net/publication/319876333_DAMPAK_PENGEMBANGAN_DESA_WISATA_NGLANGGERAN_TERHADAP_EKONOMI_MASYARAKAT_LOKAL?enrichId=) diakses pada 25 Oktober 2019.
- Hudson, M Barclay. Galloway, D Thomas et.al. Comparison of Current Planning Theories: Counterparts and Contradictions.
- Pitana, I.G., dan I.K.S. Diarta, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Yogyakarta: Andi.
- Profil Masyarakat Desa Nglanggeran. 2013. diakses online melalui:

<https://www.nglanggeran-patuk.desa.id/first/artikel/34> [Pada 14 November 2019]

Sumber lain:

Materi eLisa perkuliahan Teori Perencanaan kelas PSdK

# PERENCANAAN : MAHASISWA BERPRESTASI

Disusun oleh:

Anggoro Seto P	17/413182/SP/27899
Shafry Zuhair Arifin	17/413209/SP/27926
Lintang Febiana S	17/409887/SP/27732
Leonardo Manullang	17/413197/SP/27914
Rizki Vira Suyatmin	17/413207/SP/27924

## LATAR BELAKANG

Perkuliahan merupakan masa di mana seorang mahasiswa mendapatkan kebebasan untuk mengeksplor seluruh kemampuan dirinya. Pada masa ini mahasiswa sudah bisa menentukan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan baik dalam intra kampus maupun ekstra kampus agar dapat mengembangkan kemampuannya dalam akademik maupun non akademik. Keberhasilan mahasiswa secara mudah dapat dilihat dari prestasi yang didapat, hal ini dijadikan ukuran untuk melihat sejauh mana kemampuan dirinya serta aspek apa saja yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Mahasiswa kini menghadapi era globalisasi yang artinya kelak mereka akan merasakan persaingan dalam dunia pekerjaan tidak hanya dalam lingkup regional dan nasional melainkan internasional. Oleh karena itu mahasiswa memerlukan banyak ruang dan akses untuk melatih mempersiapkan diri dan meningkatkan kapasitas agar kelak mampu bersaing.

Saat ini mahasiswa berlomba-lomba untuk menunjukkan kapasitasnya, banyak ajang dalam berbagai bidang yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Bahkan ada ajang pemilihan mahasiswa berprestasi, ajang ini memilih mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya telah memiliki sejumlah prestasi. Mahasiswa berprestasi tidak hanya diukur dari kemampuan akademik melainkan juga kemampuan akademiknya. Dilansir dari website berita fisipol UGM (anonim, 2017) fungsi mahasiswa berprestasi adalah sebagai media belajar untuk mengembangkan pemikiran secara *scientific* maupun praktis. Selain itu alasan menjadi mahasiswa berprestasi adalah pertama sebagai *impact measurement* untuk mengukur sejauh apa kemampuan mahasiswa selama tiga atau empat tahun nanti ketika terpilih kita dilatih untuk mengembangkan ide praktis sosial. Selanjutnya meningkatkan kapasitas diri melalui pembelajaran yang dinamis, menjadi mapres itu artinya menjadi *centre* dari keunggulan mahasiswa tersebut serta mengisi waktu dengan kegiatan, organisasi dan riset.

Mendapatkan predikat sebagai mahasiswa berprestasi merupakan penghargaan prestisius, oleh karena itu banyak mahasiswa yang juga berupaya untuk mendapatkannya. Menjadi mahasiswa berprestasi tidak hanya meningkatkan kompetensi mahasiswa melainkan juga mental kompetitif yang kelak akan berguna dalam dunia pekerjaan. Namun untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi bukanlah proses yang mudah, seorang mahasiswa harus mampu menyeimbangkan kemampuan akademik dan non akademik. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang untuk mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi

## **PENDEKATAN TEORI**

Perencanaan menurut Pramuji Atmosudirdjo mendefinisikan perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, siapa yang melakukan, bilamana, dimana, dan bagaimana melakukannya.

Sedangkan menurut Alder perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa serangkaian proses penentuan tindakan masa depan yang disertai pertimbangan yang logis dan kontinu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan tertentu.

Teori perencanaan telah berkembang sejak lama dan mengalami banyak perubahan seiring perkembangan waktu. Perencanaan sendiri telah mengalami banyak perkembangan sejak Patrick Geddes mencetuskannya untuk pertama kali. Kebutuhan manusia akan teori tunggal mengenai suatu perencanaan atau biasa disebut dengan teori perencanaan mengakibatkan pengaruh para ilmuwan dibidang ilmu sosial maupun ilmu pengetahuan alam semakin dilibatkan dalam praktek perencanaan, riset, dan pendidikan. Adapun teori-teori perencanaan yang dipergunakan dan menjadi pijakan bagi perencana dan perencanaan, berupa:

- **Functional Theories**

Teori yang dikembangkan lebih berdasar pada pemikiran si perencana, dengan orientasi lebih pada target oriented planning atas dasar dugaan-dugaan, sehingga produk perencanaannya pada umumnya lebih bersifat instrumental atau top-down.

- **Behavioural Theories**

Merupakan teori yang dikembangkan dengan lebih memperhatikan fenomena behavioural melalui gejala-gejala empiris dan lebih berpikir pada trendoriented planning, serta hasil perencanaannya pada umumnya lebih bersifat komunikatif atau bottom up.

## **TEORI INKREMENTAL**

Teori ini dalam mengambil keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan madel yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam

mengambil keputusan. Teori ini memiliki pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya merupakan hal yang saling terkait. Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marjinal setiap alternatif hanya sebagian kecil saja yang dievaluasi mengenai sebab dan akibatnya. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan didefinisikan secara teratur dan memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana sehingga dampak dari masalah lebih dapat ditanggulangi.

Tidak ada keputusan atau cara pemecahan masalah yang tepat bagi setiap masalah. sehingga keputusan yang baik terletak pada berbagai analisis yang mendasari kesepakatan guna mengambil keputusan. Pembuatan keputusan inkremental ini sifatnya adalah memperbaiki atau melengkapi keputusan yang telah dibuat sebelumnya guna mendapatkan penyempurnaan.

Karena diambil berdasarkan berbagai analisis maka sangat tepat diterapkan bagi negara-negara yang memiliki struktur mejemuk. Keputusan dan kebijakan diambil dengan dasar saling percaya diantara berbagai pihak sehingga secara politis lebih aman. Kondisi yang realistis di berbagai negara bahwa dalam mengambil keputusan-kebijakan para pengambil keputusan dihadapkan pada situasi kurang baik seperti kurang cukup waktu, kurang pengalaman, dan kurangnya sumber!sumber lain yang dipakai untuk analisis secara komprehensif.

## **PERENCANAAN APLIKATIF**

Logical Framework Analysis merupakan alat bantu analisis dan manajemen yang dapat menjelaskan analisis situasi yang menjadi alasan atau argumentasi penting suatu program, kaitan logis sebab-

akibat secara hirarki hubungan antara tujuan yang akan dicapai dengan proses yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, identifikasi potensi-potensi resiko yang akan dihadapi dalam pelaksanaan program, mekanisme bagaimana hasil-hasil kerja (output) dan dampak program (outcome) akan dimonitor dan dievaluasi dan penyajian ringkasan program dalam suatu format standar. LFA digunakan ketika melakukan identifikasi dan penjajagan dalam penyusunan proposal, menyiapkan desain proyek/ program dalam suatu sistematika.

Kerangka logika sebagai teknis dalam mengkombinasikan Logika Vertikal maupun Logika Horisontal. Tujuan yang ditetapkan dapat diukur dengan indikator melalui informasi yang dikumpulkan dan disajikan dalam alat verifikasi khusus.

Dalam pelaksanaannya Logframe disusun dalam bentuk Matriks atau biasa disebut dengan logframe matrix yang terdiri atau mempunyai 4 elemen dasar yaitu:

1. Hubungan antara Goals, Objectives, Outputs dan Activities
2. Logika Vertikal dan Logika Horisontal
3. Indikator
4. Asumsi dan resiko yang perlu diidentifikasi pada tahap penyusunan program

Goals dalam kerangka logis (logframe) adalah tingkatan dengan tujuan tertinggi, merupakan hasil akhir tetapi di luar kontrol program. Objectives atau sasaran program merupakan rincian/bagian dari Goal, namun sasaran ini selalunya di luar kontrol program. kedua hal tersebut berada di luar kontrol program karena kegiatannya tidak langsung mempengaruhi tetapi dapat dicapai dengan gabungan beberapa dari program yang satu dengan program yang lainnya. Sedangkan Outputs itu sendiri adalah hasil spesifik apa yang harus diperoleh sesudah program berakhir dan Activities adalah kegiatan yang harus disusun untuk memperoleh outputs.



Dalam matriks logframe kita juga dapatkan istilah Objectively Verifiable Indicators (OVI) dalam bahasa Indonesia disebut indikator verifikasi sasaran tujuan, mengarahkan untuk mengetahui bahwa program itu berhasil, membantu kita untuk klarifikasi, membantu kegiatan monitoring dan evaluasi dan penggunaannya atau indikatornya dibuat dengan pendekatan SMART (Specific, Measurable, Attainable, Reliability and Timely).

Pendekatan SMART yang dimiliki LFA merupakan pendukung kegiatan monitoring dan evaluasi serta untuk menemukan indikator keberhasilan dari suatu program. Hal itu juga merupakan salah satu konsep yang terkenal untuk merumuskan tujuan secara efektif. Konsep ini pertama kali digunakan oleh George T. Doran pada tahun 1981. Berikut penjelasan mengenai konsep pendekatan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely):

#### 1. Specific

Menurut KBBI spesifik sendiri merupakan khusus; bersifat khusus, yang berarti dalam menetapkan keinginan menjadi kandidat calon mahasiswa berprestasi menentukan tujuan sangat diperlukan untuk menguraikan apa harus ditetapkan dengan spesifik. Spesifik akan membuat segala upaya memiliki fokus pada target yang akan dicapai. Untuk itu mahasiswa berprestasi lebih baik apabila dirinya lebih spesifik ingin berprestasi atau lebih menonjolkan salah satu kelebihannya saja, karena lebih spesifik apa yang dapat dinilai masyarakat maka akan lebih mudah juga masyarakat itu menilai dan menentukan siapakah yang pantas menjadi mahasiswa berprestasi.

#### 2. Measurable

Tujuan, tidak seperti pernyataan tujuan, adalah deskripsi terperinci tentang apa yang akan dapat dilakukan siswa pada akhir kegiatan pembelajaran. Hal itu terkait dengan hasil yang diinginkan, bukan proses untuk mencapai hasil tersebut yang spesifik dan terukur, bukan luas dan tidak berwujud. Tujuan pembelajaran mengandung tiga komponen utama:

- a. Keterampilan atau perilaku yang harus dilakukan.

Komponen tujuan ini harus mengandung kata kerja tindakan yang relevan dengan domain kegiatan (kognitif, psiko-motorik atau efektif). Dalam merumuskannya, akan lebih baik bila menghindari dari kata kerja umum seperti “mengerti” atau “tahu” dalam tujuan. Ini tidak dapat diukur, tidak ada yang dapat benar-benar membuat alat penilaian yang mengukur “pemahaman” atau “mengetahui,” tetapi alat penilaian dapat mengukur dapat “menjelaskan, membuat daftar, menentukan, menguraikan, menguraikan, memparafrasekan, membedakan,” dan lainnya.

- b. Kondisi di mana seseorang akan melakukan keterampilan / menunjukkan pengetahuan.

Selain menyertakan kata kerja tindakan, seseorang harus menunjukkan kondisi di mana siswa perlu menunjukkan pengetahuan atau keterampilan mereka. Semisal tujuan Kursus: “Pada saat penyelesaian modul, seseorang akan menulis dan menghasilkan video analisis sejarah 3 menit.”

- c. Kriteria yang digunakan untuk Mengukur Kinerja.

Setiap orang masih perlu menambahkan informasi ke tujuannya karena belum memberi tahu bagaimana akan mengukur keberhasilan. Tujuan Kursus: “Pada saat penyelesaian modul, seseorang akan menulis dan menghasilkan video analisis sejarah 3 menit dengan peringkat rubrik 80 dari 100.”

Dalam versi terbaru dari taksonomi Bloom menempatkan penciptaan sebagai aktivitas pembelajaran paling kompleks yang dapat dilakukan untuk menunjukkan penguasaan belajar seseorang.

a. Domain kognitif

Domain yang paling banyak mendapat perhatian dalam program pengajaran adalah domain kognitif. Ini mencakup tujuan yang terkait dengan pengetahuan atau informasi, penamaan, penyelesaian, prediksi, dan aspek pembelajaran intelektual lainnya.

b. Domain psikomotor

Kategori kedua untuk pengelompokan tujuan instruksional adalah domain psikomotor. Ini mencakup keterampilan yang membutuhkan penggunaan dan koordinasi otot rangka. Perilaku psikomotor lebih mudah untuk diamati, dijelaskan, dan diukur daripada perilaku kognitif atau afektif.

c. Domain afektif

Kategori ketiga dari ranah afektif meliputi sikap, penghargaan, nilai, dan emosi - meskipun sangat penting dalam pendidikan, yang paling sulit untuk menilai siswa. Tingkat domain afektif membentuk sebuah rangkaian dari kesadaran sederhana dan penerimaan hingga internalisasi, ketika pakaian menjadi bagian dari sistem nilai praktik seseorang.

3. Achievable

Tujuan yang ditetapkan harus bisa dicapai. Dengan begitu komitmen yang dibangun mampu dicapai dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai menetapkan tujuan yang tidak mungkin dicapai. Achievement, mencapai kesuksesan pribadi dengan usaha secara optimal dan menunjukkan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan lingkungan.

Di dalam menentukan target harus realistis dan dapat dicapai (*attainable*), artinya target tidak boleh dibuat terlalu mudah (d disesuaikan dengan kemampuan), tapi juga tidak boleh terlalu sulit sehingga terasa mustahil untuk dicapai. Untuk membuat target tercapai perlu:

- Menilai apakah tujuan yang sudah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dengan mengukurnya dari beban kerja tim, pengetahuan dan kemampuan atau dari sumber daya lain yang mendukung . Jika tidak, maka bisa menetapkan tujuan lain yang bisa dicapai di masa sekarang.
- Target yang *attainable* juga akan menjawab pertanyaan, seperti: Apakah anda sudah memiliki komitmen kuat untuk mencapai tujuan anda? Apakah ada target lain yang lebih besar yang ingin anda capai?

Selain ini di dalam achievement juga diperlukan Elevant, Elevant menekankan pada pentingnya memilih target yang tepat. Seringkali membutuhkan dukungan dari berbagai pihak guna mencapai target sumber daya, masukan dari Champion, dan apapun yang bisa membantu meruntuhkan tembok penghalang. Target yang relevan untuk tim , dan organisasi akan mendapatkan dukungan yang anda butuhkan. Target yang relevan apabila tercapai, maka akan mendorong tim, departemen, dan organisasi lebih maju. Sebuah target yang mendukung atau selaras dengan target-target lainnya akan dianggap sebagai target yang relevan.

Target yang relevan akan memberikan jawaban ‘ya’ untuk semua pertanyaan ini dibawah ini.

- Apakah target ini layak diperjuangkan?
- Apakah target ini ada di waktu yang tepat?
- Apakah target ini sesuai dengan kebutuhan dan target anda yang lain?
- Apakah anda orang yang tepat untuk mengejar target ini?

#### 4. Realistic

Realistis atau masuk akal adalah hal lain yang harus dipenuhi oleh tujuan yang ingin dicapai. Jangan membuat tujuan yang terlalu sulit sehingga tidak mungkin dicapai

atau membuat tujuan yang tidak sejalan dengan keinginan atau hasrat hati. Dalam menentukan target seseorang harus memperhatikan kesiapan dirinya serta memperhatikan peluang yang dimiliki agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Target ataupun tujuan haruslah disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki. Untuk mengetahui kapasitas dapat dilihat dari kesiapan mental dan fisik serta persiapan lainnya yang dibutuhkan dalam menghadapi lomba.

Dalam kaitannya dengan mapres, tujuan yang realistis pun juga harus dimiliki seorang mahasiswa berprestasi. Untuk mendapatkan target yang realistis seorang mapres haruslah mempersiapkan dirinya dengan latihan serta mempersiapkan mental dan fisik. Alangkah baiknya jika seorang memulai mengikuti lomba dari tingkatan bawah dan kemudian terus meningkat targetnya hingga tingkatan yang paling tinggi.

Misalnya seorang mahasiswa yang mengikuti lomba debat, hendaknya dia harus memperhatikan kerja kerasnya dan target yang ingin dicapai, jika persiapan serta latihan yang dilakukan sudah maksimal serta siap secara mental dan fisik maka sangat wajar untuk menargetkan juara. Namun jika persiapan dan latihan yang dilakukan belum matang serta tidak siap total secara fisik dan mental maka dapat menargetkan secara realistis masuk lima besar atau mendapat penghargaan dalam satu bidang kategori penilaian atau dapat saja menargetkan lomba tersebut sebagai ajang untuk melatih diri dalam berkompetisi sehingga dapat mengetahui kekurangannya.

Sementara itu akan sangat efektif jika seorang mahasiswa menargetkan lomba secara bertahap. Untuk mengikuti lomba debat internasional alangkah baiknya jika hal tersebut sudah mulai dari lomba debat tingkat jurusan atau fakultas. hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri sehingga dapat menyusun target realistis yang lebih tinggi.

Realistis merupakan suatu hal yang harus dimiliki dalam perencanaan. Dengan memperhatikan segala kesiapan yang dimiliki dengan target yang ingin diraih maka akan memudahkan untuk mencapai tujuan tersebut.

## 5. Timely

Dalam menetapkan tujuan, seseorang harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut harus dicapai. Apakah minggu depan, tahun depan, atau lima tahun lagi. Dengan adanya batasan waktu, seseorang akan terpacu untuk segera memulai melakukan tindakan.

Waktu dalam sebuah perencanaan berkaitan erat dengan skala prioritas. Dikutip dari Jurnal.id Skala prioritas adalah ukuran kebutuhan yang tersusun dalam daftar berdasarkan tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari kebutuhan yang paling penting sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya. Dengan adanya skala prioritas, manusia diharapkan dapat mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana kebutuhan yang bisa ditunda terlebih dahulu. Sehingga, kita dapat memenuhi kebutuhan dengan tepat dan sesuai dengan kemampuan.

Menyusun skala prioritas sangat membantu kita dalam mengelola kegiatan. Dengan mengelola waktu dan kegiatan secara bijak maka setiap kegiatan dan pekerjaan yang bersifat urgent dan penting dapat terpenuhi dengan maksimal. Selain itu mengelola kegiatan dan waktu dengan bijak dapat membiasakan diri kita untuk hidup teratur, hemat, dan melakukan kegiatan sesuai kebutuhan hingga membantu merencanakan masa depan dengan lebih baik.

Menjadi seorang mahasiswa kita harus pintar untuk mengatur waktu untuk mencapai target kita. Contohnya saja ketika kita menjadi mahasiswa yang bergabung di organisasi kampus tingkat fakultas, jurusan dan universitas dengan segala

kegiatan program kerja yang ada di organisasi tersebut, belum lagi jadwal rapat rutin yang ada di organisasi tersebut dan tugas kuliah yang datang silih berganti. Setiap hari kita harus membuat jadwal kita, dari bangun tidur hingga kembali tidur. Tidak lupa skala kegiatan yang akan kita lakukan nantinya seperti apa. Sebagai contoh, ketika pemilihan Mahasiswa Berprestasi semakin dekat misalnya dua minggu, diwaktu dua minggu tersebut kita harus fokus pada pemilihan Mahasiswa Berprestasi dengan tidak lupa dengan hal-hal lainnya.

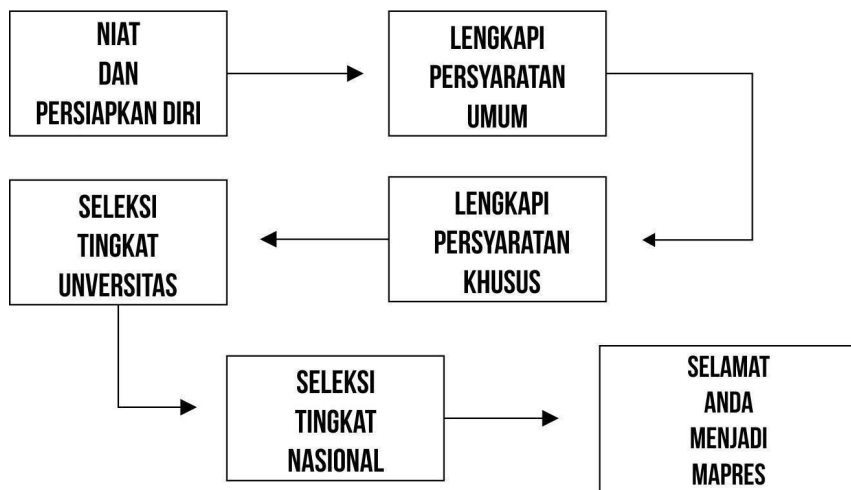
Metode SMART merupakan suatu metode dalam penetapan tujuan agar sebuah objektif dianggap valid dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kelebihan dari metode SMART adalah untuk mengkhususkan suatu objektif agar lebih valid, memberikan arahan yang jelas mengenai suatu tujuan. Kekurangannya adalah SMART hanya menyelesaikan masalah tanpa eror dan tidak bisa dimasukan data informasi tambahan saat proses sedang dilakukan sebab efisien apabila tidak melibatkan kriteria yang banyak.

## **PERENCANAAN DARI TOPIK**

Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) telah dimulai sejak tahun 1986 yang dalam pelaksanaannya mengalami pasang surut, termasuk pergantian nama atau istilah dan akronim. Penggunaan istilah pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres) dimulai tahun 2004 yang kemudian pada tahun 2017 dimulai dengan akronim Pilmapres. Pilmapres dinilai telah memberikan dampak positif pada budaya berprestasi dan menghargai prestasi serta karya mahasiswa, termasuk model pembinaan mahasiswa di kalangan perguruan tinggi dan secara langsung atau tidak langsung dapat mengangkat martabat mahasiswa serta perguruan tingginya.

Pelaksanaan Pilmapres akan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka memberikan motivasi berprestasi di kalangan mahasiswa dan menciptakan budaya akademik yang lebih baik.

Selain itu, diharapkan proses pemilihan ini dapat diadopsi menjadi sebuah sistem pembinaan prestasi di perguruan tinggi.



Untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi ada beberapa tahapan yang harus disiapkan terlebih dahulu yaitu :

1. Niat dan persiapan diri yang dimaksud adalah mempersiapkan diri dan meluruskan tujuan untuk menjadi seorang mahasiswa berprestasi
2. Lengkapi persyaratan umum yaitu melengkapi persyaratan umum yang dibutuhkan untuk mendaftar menjadi mahasiswa berprestasi. Persyaratan umum dipenuhi oleh peserta melalui dokumen yang membuktikan bahwa peserta Pilmapres:
  - a. Merupakan Warga Negara Indonesia;
  - b. Terdaftar di PD-Dikti dan aktif sebagai mahasiswa program Sarjana maksimal semester VI;
  - c. Berusia tidak lebih dari 22 tahun pada tanggal 1 Januari 2019 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IP seluruh mata kuliah yang lulus) rata-rata minimal 3,00; 5. Merupakan wakil resmi dari perguruan tingginya yang dibuktikan dengan



Surat Pengantar dari pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan (Wakil Rektor/Ketua/Direktur) dan belum pernah menjadi finalis Pilmapres Tingkat Nasional. Apabila pemenang pertama berhalangan, pemenang berikutnya dapat diajukan sebagai pengganti.

3. Lengkapi persyaratan khusus yaitu melengkapi persyaratan yang harus ada di dalam diri mahasiswa berprestasi. Persyaratan khusus dipenuhi oleh peserta melalui kelengkapan yang harus diunggah oleh peserta untuk dinilai oleh tim juri, yaitu:
  - a. Rekapitulasi Indeks Prestasi per semester;
  - b. Karya tulis ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia baku;
  - c. Ringkasan (bukan abstrak) yang ditulis dalam bahasa Inggris/bahasa asing PBB lainnya;
  - d. Maksimum 10 (sepuluh) prestasi/capaian yang unggul dan membanggakan, dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai bukti;
  - e. Video profil diri dan deskripsi kegiatan yang paling diunggulkan dan membanggakan berdurasi 3 (tiga) - 5 (lima) menit bagi finalis tingkat nasional.
  
4. Seleksi tingkat universitas yaitu mengikuti seleksi tingkat universitas mulai dari tingkat paling bawah yaitu jurusan, lalu fakultas, lalu universitas. Prosedur Pilmapres pada Tingkat Perguruan Tinggi (PTN/PTS) diatur sebagai berikut:
  - a. Pilmapres Tingkat Prodi/Jurusan/Departemen/Fakultas, dan Perguruan Tinggi dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk dan disahkan oleh pimpinan sesuai tingkatannya.
  - b. Hasil pemilihan pada setiap jenjang (Prodi/Jurusan/Departemen/Fakultas dan Perguruan Tinggi) dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan.

- c. Satu orang terbaik hasil pemilihan di PTN dikirimkan ke Tingkat Nasional.
5. Setelah lolos dari tingkat universitas calon mahasiswa berprestasi nasional akan diseleksi tingkat nasional bersama mahasiswa berprestasi dari universitas lainya. Seleksi yang dilakukan pada tingkat ini yaitu :
- a. Seleksi tahap awal (*desk evaluation*) dilakukan melalui sistem penilaian berdasarkan:
    - i. Persyaratan administrasi;
    - ii. Karya tulis ilmiah;
    - iii. Ringkasan karya tulis ilmiah (bukan abstrak) berbahasa Inggris/ bahasa asing PBB lainnya);
    - iv. Data prestasi/capaian yang diunggulkan dan dibanggakan.
  - b. Seleksi tahap akhir dilakukan terhadap peserta Pilmapres yang lolos seleksi tahap awal yang dilakukan berdasarkan:
    - i. Penilaian presentasi karya tulis ilmiah dan poster;
    - ii. Penilaian presentasi dan diskusi dalam bahasa Inggris/bahasa asing PBB lainnya;
    - iii. Wawancara wawasan umum, kepemimpinan, klarifikasi terhadap prestasi/capaian yang diunggulkan dan dibanggakan, penghargaan/pengakuan/rekam jejak yang relevan), serta video profil diri dan deskripsi kegiatan yang paling diunggulkan;
    - iv. Asesmen dan pengamatan kepribadian.
6. Jika anda bersaing dengan mahasiswa berprestasi lainya, selamat anda dinyatakan lolos menjadi mahasiswa berprestasi indonesia

## PENUTUP

Penulisan ini mengambil topik yaitu Mahasiswa Berprestasi. Pemilihan topik ini diambil karena begitu dekat dengan kehidupan

kampus. Mahasiswa berprestasi merupakan salah satu ikon sebuah universitas. Banyak sekali mahasiswa dari setiap jurusan ingin menjadi mahasiswa berprestasi. Menjadi mahasiswa berprestasi merupakan suatu hal yang bisa dilakukan jika kita memiliki perencanaan matang dan mengikuti prosedur yang ada.

Dalam penulisan topik ini, aplikasi perencanaan menggunakan aplikasi SMART yang dikenalkan pertama kali oleh George T. Doran pada tahun 1981. Pendekatan aplikasi ini cocok karena di setiap akronim dari kata SMART memiliki makna yang sesuai dengan tujuan.

Metode SMART merupakan suatu metode dalam penetapan tujuan agar sebuah objektif dianggap valid dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kelebihan dari metode SMART adalah untuk menhususkan suatu objektif agar lebih valid, memberikan arahan yang jelas mengenai suatu tujuan.

Pendekatan teori yang digunakan juga sesuai dengan topik yang dipilih karena berdasar kepada pemilihan tujuan atau sasaran. Bukan hanya itu pendekatan teori inkremental berfokus pada proses dari tujuan tersebut. Sebuah pencapaian tujuan hendaknya harus direncanakan dan dilaksanakan dengan matang, agar pencapaian sesuai dengan apa yang kita targetkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brim, Rodney. (2004). *The Goal of Management; from MBO to Deming to Project Management and Beyond*. Performance Solution Technology, LLC.
- Couillard, J., Garon, S., & Riznic, J. (2009). *The logical framework approach-millennium*. Project Management Journal, 40(4), 31-44.
- Drucker, Peter F, (2002). *Chapter 8: Management by Objectives and Self-Control*. Martin Hinterseer, Zusammenfassung Kapitel 8.
- Anonim. 2017. Mengapa harus menjadi mahasiswa berprestasi? <http://fisipol.ugm.ac.id/mengapa-harus-menjadi-mahasiswa-berprestasi/> (diakses tanggal 27-10-2019 )

- Mulyono. 2009. Kriteria dalam Mengambil Keputusan. <http://mulyono.staf.uns.ac.id/2009/06/17/kriteria-nilai-nilai-dalam-mengambil-keputusan-criteria-value-in-talking-decision/>(online). Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019.
- Mulyono. 2009. Teori Pengambilan Keputusan. <http://mulyono.staf.uns.ac.id/2009/06/08/teori-pengambilan-keputusan-theory-of-decision-making/>(online). Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019
- Ruch, W. A., 1994, *Organizational Linkages: Understanding the Productivity Paradox* (1994) Chapter 5: Measuring and Managing Individual Productivity, The National Academies Press, Diakses melalui <https://www.nap.edu/read/2135/chapter/6> pada 15 November 2019.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.



# **BAGIAN II**



# RUANG TERBUKA HIJAU DI SURABAYA

Disusun oleh:

Adelia Ishartanti	17/409872/SP/27717
Arini Meihati Nurismah	17/413185/SP/27902
Rahmisutar	17/413202/SP/27919
Khusnul fatimah	17/414912/SP/28039
R. Fajrien Anastitania	17/414916/SP/28043

## LATAR BELAKANG

Setiap proses kehidupan yang manusia jalani pasti mempunyai sebuah tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini perencanaan sangat dibutuhkan untuk mengatur jalannya proses untuk mencapai keberhasilan. Perencanaan yang baik pasti mempunyai strategi yang matang sehingga dapat terlaksana tanpa adanya kendala. Perencanaan sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas terkait dengan dimensi waktu, spasial, serta tingkatan dan teknis perencanaannya. Perencanaan memiliki peran strategis bagi kepentingan publik sebagai sebuah tindakan yang rasional dan ilmiah.

Menurut Hafid Setiadi dikutip dari Coleman Woodbury mendefinisikan perencanaan sebagai *“the process of preparing, in advance, and in a reasonably systematic fashion, recommendations for policies and courses of action, with careful attention given to their possible by-products, side effects, or spillover effects”*. Dari kalimat tersebut dapat dilihat bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan



yang mencakup persiapan, pemilihan alternatif, serta pelaksanaan yang dilakukan secara logis dan sistematik sehingga berbagai kemungkinan yang diakibatkan dapat diprakirakan dan diantisipasi. Kegiatan perencanaan merupakan upaya untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif yang sudah tersedia dalam hal ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Maka dari itu kami menggunakan Teori rasional komprehensif sebagai landasan tulisan ini. Isu perencanaan pembangunan nasional yang saat ini sedang gencar dilakukan menjadi fokus kami dengan mengambil teori perencanaan wilayah sebagai landasannya.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan ditengah maraknya pembangunan yang sedang gencar dilakukan oleh berbagai pihak baik itu pemerintah maupun swasta. Akan tetapi dalam penerapan RTH belum semua sesuai dengan harapan dari tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri. Menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah yang bersifat terbuka sebagai tempat tumbuhan dan juga makhluk hidup lain. Belum semua wilayah kota sudah menerapkan kebijakan tersebut, masih sangat sedikit sekali yang melakukannya. Salah satunya adalah Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota besar di Indonesia, Kota Surabaya merupakan kota industri dimana banyak sekali pabrik-pabrik yang beroperasi disana, sehingga menyebabkan suhu di kota Surabaya panas. Selain itu juga dikarenakan merupakan kota yang banyak penduduknya menyebabkan Surabaya sering mengalami kemacetan dan polusi udara. Kurangnya lahan untuk masyarakat bercengkrama dan menghirup udara segar menjadikan hal tersebut sebagai permasalahan yang perlu ditangani secara serius. Dengan kondisi tersebut perlu adanya Ruang Terbuka Hijau sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang untuk bertemu dan melakukan interaksi bicara satu dengan yang lainnya tanpa membedakan latar belakang, status sosial dan ekonomi.

Diharapkan dengan adanya Ruang Terbuka Hijau diharapkan akan mampu mengurangi tingkat polusi udara baik yang disebabkan oleh kendaraan maupun pabrik di kota Surabaya. Selain itu juga sebagai tempat yang lebih inklusif yang penggunaannya dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat. Menjaga ekosistem flora dan fauna serta mencegah bencana alam yang diakibatkan oleh perilaku manusia juga sebagai harapan dari dibentuknya Ruang Terbuka Hijau ini.

## TEORI PERENCANAAN YANG DIGUNAKAN

### 1. TEORI RASIONAL KOMPREHENSIF

Teori rasional komprehensif merupakan teori yang mengedepankan pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis (rasional). Pengambil keputusan akan berada pada suatu dilema, dimana ia akan dihadapkan pada berbagai pilihan alternatif yang berbeda-beda. Masing-masing alternatif itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang proporsinya pun berbeda-beda. Pengambil keputusan harus sebijak mungkin dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Keputusan yang dibuat harus bisa diterima oleh banyak pihak dan sebisa mungkin tidak ada pihak yang dirugikan. Pengambilan keputusan sendiri harus didasarkan pada tujuan yang hendak dicapai, nilai yang mendasarinya, dan target yang sudah disepakati sebelumnya.

Anderson (1979) menjelaskan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan yang rasional sebagai berikut:

- a. Pengambil keputusan dihadapkan pada suatu masalah yang berbeda dengan masalah lainnya, sehingga dapat dibandingkan dengan masalah lain tersebut.
- b. Diperjelasnya tujuan, nilai, dan target yang disusun berurutan berdasarkan prioritas.
- c. Melihat alternatif-alternatif untuk menyelesaikan masalah.
- d. Melihat konsekuensi biaya dan manfaat dari setiap alternatif.
- e. Setiap alternatif beserta konsekuensinya, diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya.

- f. Membandingkan setiap alternatif beserta konsekuensinya.
- g. Alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan harus dapat memaksimalkan tercapainya tujuan, nilai, dan target yang sudah ditentukan sebelumnya.

Langkah-langkah tersebut dilakukan agar pengambil keputusan dapat mengambil keputusan yang paling baik, sehingga tujuan, nilai, dan target dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam mengambil suatu keputusan, pengambil keputusan tidak boleh hanya melihat satu pilihan saja, akan tetapi harus melihat berbagai pilihan (alternatif) agar dapat melihat mana yang terbaik.

Ketika pengambil keputusan membandingkan antara satu alternatif dengan alternatif lainnya, maka akan terlihat konsekuensi dari masing-masing alternatif tersebut. Dengan demikian, pengambil keputusan dapat menghindari atau meminimalisasi konsekuensi negatif dari setiap alternatif, kemudian memilih yang alternatif yang lebih baik. Adapun tujuan dari langkah-langkah tersebut adalah untuk mengambil keputusan secara rasional.

Teori rasional komprehensif ini mendapat beberapa kritik. Misalnya, dalam pengambilan suatu keputusan tidak akan sepenuhnya dilakukan secara rasional. Teori ini seolah menempatkan si pengambil keputusan sebagai orang yang memiliki banyak informasi dan waktu sehingga mampu menyeleksi berbagai alternatif yang ada dengan waktu yang cukup. Sehingga dalam teori ini seolah-olah semuanya sempurna sehingga keputusan yang didapat adalah keputusan yang rasional. Akan tetapi, kenyataannya tidak semua pengambil keputusan memiliki banyak informasi dan mereka memiliki waktu yang terbatas dalam mengambil keputusan, terlebih lagi apabila keputusan sangat mendesak dan harus segera diputuskan. Sehingga keputusan yang diambil tidak sepenuhnya rasional.

Menurut Hoogerwerf teori rasional komprehensif ini menempatkan hasil atau dampak dari suatu keputusan (kebijakan) yang didasarkan pada pemikiran rasional berdasarkan data atau

informasi yang lengkap (komprehensif). Pengambil keputusan dituntut cermat dan teliti dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak dan dapat membawa dampak positif bagi semua orang.

Dalam melakukan upaya pembangunan wilayah di perkotaan, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Pengambil keputusan yang juga merupakan pembuat kebijakan harus menentukan skala prioritas dari berbagai macam rencana pembangunan yang ada. Masing-masing rencana pembangunan tentu memiliki target yang jelas yang ingin dicapai. Akan tetapi, masing-masing rencana pembangunan tersebut harus disaring kembali dengan mengedepankan *ke-urgent-an* masalah yang ada sehingga rencana pembangunan dapat segera dilaksanakan.

Daerah perkotaan dikenal sebagai daerah yang padat penduduk, sehingga kuantitas kendaraan dan kawasan industrinya juga tinggi. Mobilitas penduduk perkotaan yang jumlahnya banyak mengakibatkan daerah perkotaan sering terkena macet sehingga kualitas udara tercemar polusi dari asap kendaraan. Selain itu, banyaknya pabrik di kawasan industri perkotaan juga turut berkontribusi dalam pencemaran udara. Dari permasalahan tersebut maka pembuat kebijakan harus mencari solusi yang dapat menyelesaikannya, misalnya dengan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pembuat kebijakan tidak serta merta langsung memutuskan pembangunan RTH sebagai skala prioritas karena masalah pencemaran udara bukan satu-satunya permasalahan yang ada di perkotaan. Pembuat kebijakan harus melihat semua permasalahan yang ada untuk mengetahui sejauh mana *ke-urgent-an* dari masing-masing masalah. Dalam hal ini, pembuat kebijakan harus melihat dengan cermat dan teliti terkait data atau informasi tentang permasalahan tersebut. Kemudian, pembuat kebijakan juga harus memperhatikan konsekuensi dan manfaat dari setiap solusi permasalahan tersebut.

Selanjutnya dari hal itu, pembuat kebijakan dapat membandingkan antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya. Dengan demikian dapat dilihat mana permasalahan yang lebih mendesak dan harus segera ditangani. Keputusan atau kebijakan yang dibuat akan dinilai rasional karena telah melewati proses penyaringan dan perbandingan dari permasalahan yang ditawarkan.

## 2. TEORI PERENCANAAN WILAYAH KOTA

Perencanaan didefinisikan sebagai proses persiapan, dilakukan pada awal kegiatan, dilaksanakan berdasarkan cara yang sistematis, rekomendasi untuk kebijakan dan tindakan, dengan perhatian yang cermat terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi. Sebuah perencanaan diusahakan memenuhi kriteria yang baik karena mengingat kedudukan sebuah perencanaan sangat penting untuk menentukan keberhasilan sebuah kegiatan. Menurut Friedmann (1987) perencanaan selalu mengandung empat unsur utama, yaitu:

- 1) perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi.
- 2) perencanaan selalu berorientasi ke masa depan.
- 3) perencanaan memberikan perhatian pada keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan.
- 4) perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif perencanaan merupakan proses untuk mencapai tujuan serta menentukan strategi apa yang digunakan. Maka sebuah perencanaan juga mencakup pemikiran yang matang, dimana perlu cara-cara yang disesuaikan dengan situasi kondisi serta memperkecil adanya masalah di kemudian hari. Perencanaan ini kemudian diaplikasikan pada berbagai bidang dalam pembangunan termasuk perencanaan wilayah dan kota. Perencanaan dengan pendekatan keruangan (*spatial plan*) pada awalnya dipandang sebagai penerapan desain fisik

pada lingkungan pemukiman (Friedman, 1987; Taylor, 1998). Taylor (1998) dalam menguraikan perencanaan perkotaan (*urban planning*) pada masa awal perang dunia kedua dalam tiga komponen, yaitu:

1. Perencanaan kota sebagai perencanaan fisik.  
Hal ini dimaksudkan bahwa dalam perencanaan wilayah dan kota selalu berkaitan dengan penataan fisik baik infrastruktur maupun pemetaan ruang. Wilayah dan perkotaan sebagai objek pemangunan menjadi bahan garapan yang diatur sedemikian rupa agar menuju pemafaatan yang efisien.
2. Aspek desain adalah sentral pada perencanaan.  
Perencanaan wilayah dan kota dimaksudkan untuk kehidupan yang lebih nyaman dan aman. Oleh karena itu suatu kota di desain sedemikian rupa dengan perencanaan yang baik dan matang. Kualitas hidup masyarakat juga ditentukan oleh kondisi lingkungan yang menjadi tempat tinggal, maka sudah menjadi kewajiban pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dengan desain yang diciptakan dengan penuh perencanaan dan pertimbangan.
3. Perencanaan kota meliputi pembuatan *master plan* yang menunjukkan ketepatan konfigurasi spasial penggunaan lahan dan bentuk kota yang dihasilkan oleh arsitek atau insinyur ketika mendesain bangunan dan bentuk-bentuk lain buatan manusia.

Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai

sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003). Maksud dari pembangunan yang lebih baik yaitu suatu perencanaan wilayah dilakukan untuk memberi akses kepada masyarakat dalam megembangkan kualitas hidupnya dalam berbagai bidang, termasuk infrastruktur dan akses yang dibangun. Perencanaan wilayah dan kota ini juga dimaksudkan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada termasuk lingkungan secara menyeluruh dan memprioritaskan kepentingan umum di masyarakat.

Teori perencanaan wilayah dan kota seringkali dijadikan sebagai dasar penentuan kebijakan suatu daerah. Salah satunya adalah kebijakan mengenai pemanfaatan lahan termasuk ruang terbuka hijau atau RTH. Dalam perencanaan wilayah dan kota maka ruang terbuka hijau disesuaikan dengan kondisi geografis, karakteristik masyarakat dan juga kebutuhan yang dirasakan. Sehingga adanya RTH ini penting untuk direncanakan terlebih dahulu khususnya dengan teori perencanaan kota untuk melihat dimana baiknya lahan terbuka hijau dibuat dan wilayah seperti apa yang akan dimanfaatkan.

Di Indonesia ruang terbuka hijau ditargetkan mencapai 30% dari total wilayah yang ada, sehingga perlu direncanakan dengan cermat bagaimana nantinya bentuk kota dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam presentase 30% tersebut juga mencakup bangunan infrastruktur yang ada di dalamnya seperti jalan, danau, dan sarana pendukung lainnya.

Salah satu kota dengan tata kelola dan perencanaan kota yang baik adalah Surabaya. Perencanaan kota mengenai ruang terbuka hijau dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Ruang terbuka Hijau (DKRTH) yang merupakan perangkat daerah dengan menyelenggarakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan dan sub urusan air limbah. Sebagian kecil urusan yang sudah dikerjakan seperti adanya temen korea, taman

bhayangkara, taman surya dan pengolahan sampah serta limbah dalam berbagai bentuk.

Di kota Surabaya untuk ruang terbuka hijau diserahkan pada dinas khusus sehingga ada fokus yang kuat dan kepentingan yang tidak tumpang tindih terhadap penyelenggaraan RTH ini. Maka sebuah perencanaan perlu diperhatikan siapa yang akan menjalankan dan bagaimana cara menjalankannya sehingga dalam perencanaan wilayah dan kota ini semua tujuan dapat tertata dengan rapi dan konsekuen.

## **PERENCANAAN RTH DI SURABAYA**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 1 ayat 31 yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Perencanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Surabaya ini telah tertulis di dalam RTRWP Jawa Timur tahun 2005-2020 yang mana isinya adalah penerapan dari Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) yang berisi perintah bahwa seluruh Pemerintah Kota se-Jawa Timur harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mana luasnya adalah sebanyak 20% dari luas kota dengan 10% bagiannya adalah berupa hutan kota (Irmadella, 2018; Widigdo dan Hartono, 2010).

Sementara itu menurut Peraturan Menteri (Permen) PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan luas Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan adalah sebanyak 30 persen yakni dengan pembagian 20 persen adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan yang 10 persen adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat. Sampai pada bulan Juni tahun 2019 jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang ada di Surabaya sudah mencapai 21,79 persen dari luas Kota



Surabaya yakni sebesar 7.290,53 ha yang mana luasan tersebut terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) makam sebanyak 283,53 ha, Ruang Terbuka Hijau (RTH) waduk atau telaga sebanyak 192,06 ha, Ruang Terbuka Hijau (RTH) lapangan dan stadion sebanyak 355,91 ha, Ruang Terbuka Hijau (RTH) fasilitas umum dan fasilitas sosial pemukiman sebanyak 205,5 ha, Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan lindung sebanyak 4.548,59 ha, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) taman dan jalur hijau sebanyak 1.649,1 ha (Pemkot Surabaya, 2019; Hakim, 2019).

Dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, yakni masyarakat dan pihak swasta dimana masyarakat dilibatkan dalam perumusan perencanaan dna pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sementara pihak swasta memiliki peran menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta dengan memberikan bantuan lainnya juga (Iswari, 2013).

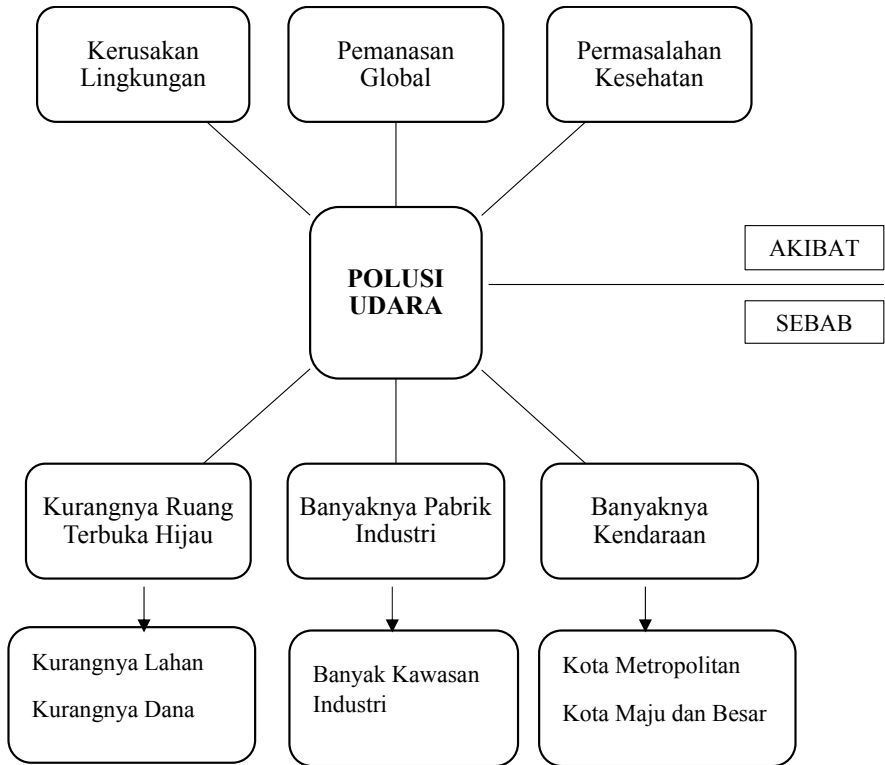
Tentu dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Surabaya ini telah berhasil memberikan dampak positif bagi lingkungan. Salah satu dampak positif bagi lingkungan yang telah ditimbulkan oleh adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Surabaya tersebut adalah adanya penurunan suhu udara sebanyak 2 derajat Celsius yang mana sebelumnya suhu udara di Surabaya adalah sebesar 30 hingga 31 derajat Celcius lalu menurun menjadi 28 sampai 29 derajat Celcius (Hakim, 2019; Kurniawan, 2019).

Di Surabaya sendiri sudah memiliki banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH). Di antara banyak Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut adalah Taman Bungkul, Taman Flora yang berada di dekat Terminal Bratang, Taman Prestasi yang berada di pinggir Sungai Kalimas, Taman Apsari yang terletak di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Taman Pelangi yang berada di Jalan A. Yani Surabaya, dan Taman Lansia yang berada di Jalan Kalimantan Surabaya (Marmi, 2016).

Namun Ruang Terbuka Hijau (RTH) terbaik di Surabaya adalah Taman Bungkul. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang pernah donobatkan sebagai pemenang Asian Townscape Awards (ATA) pada tahun 2013 ini merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terletak di pusat Kota Surabaya tepatnya di Jalan Raya Darmo, yang rawan kemacetan dan berisi bermacam-macam tumbuhan dan pohon, taman bermain anak, arena *skateboard*, *jogging track*, amfiteater, perpustakaan, jaringan internet nirkabel, dan sarana untuk edukasi tentang pengolahan sampah dan air (Zaenal, 2013; Irmadella, 2018). Taman Bungkul ini merupakan titik pertama kalinya Indonesia dapat memenangkan Asian Townscape Awards (ATA) yang mana bebarengan dengan Vietnam (Zaenal, 2013).

Dengan dibangunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) maka diharapkan kualitas udara akan meningkat dan polusi udara akan menurun sehingga dapat mendukung adanya pembangunan dalam dimensi lingkungan agar tercipta pembangunan tata kota yang baik seperti di dalam RTRWP Jawa Timur tahun 2005-2020. Selain itu dengan memperhatikan dimensi lingkungan dalam pembangunan, maka akan terwujud adanya pembangunan yang berkelanjutan karena selain memperhatikan aspek fisik dari suatu pembangunan tapi juga tetap memperhatikan faktor lingkungan agar adanya kelestarian lingkungan dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya yang mana adanya lingkungan yang lestari dapat menciptakan daya dukung terhadap pelaksanaan gaya hidup sehat.

## A. IDENTIFIKASI MASALAH PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU DI SURABAYA



Masalah polusi udara di Surabaya sampai saat ini masih menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat karena kualitas udara yang tidak sehat atau tidak memenuhi standar yang seharusnya. Berdasarkan data Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) Kota Surabaya berada pada angka 67 dengan status sedang. Sedangkan berdasarkan alat Airvisual, *air quality* (kualitas udara) Kota Surabaya berada pada angka 88. Kedua data tersebut diambil pada tanggal 2 Agustus 2019. Kemudian menurut Pakar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Dr. Arie Dipareza

mengatakan bahwa kondisi dengan status sedang pada data ISPU menunjukkan kualitas udara di Kota Surabaya berada di ambang waspada. Selain itu, beliau menambahkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh laboratorium miliknya yang dilakukan di enam jalan protokol Kota Surabaya dengan partikel udara yang lebih kecil atau PM 2,5 hasilnya menunjukkan melebihi baku mutu dengan polutan udara yang berbahaya.

Berdasarkan data - data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kondisi udara di Kota Surabaya dalam taraf yang berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan. Sebenarnya polusi udara yang diambang batas tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

a. Banyaknya Kendaraan di Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah ibukota Jakarta dan termasuk kota metropolitan terbesar di Jawa Timur. Kota Surabaya juga tergolong sebagai kota yang maju dan memiliki jumlah penduduk terbanyak di Propinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kota Surabaya sebesar 2.9 juta jiwa. Maka tak heran jika banyaknya jumlah penduduk di kota metropolitan tersebut mempengaruhi jumlah kepemilikan kendaraan yang banyak pula. Data dari Polda Jatim menunjukkan jumlah kendaraan baru yang teregister pada Juni 2018 mencapai 1.080.126 unit untuk roda empat sedangkan roda dua tercatat 14.043.712 unit. Maka jumlah kendaraan yang terdapat di Kota Surabaya sekitar 15 juta kendaraan, ini belum termasuk transportasi umum seperti bus, angkot, truk, dan lainnya.

Berdasarkan data - data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya jumlah kendaraan di Kota Surabaya menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara di kota tersebut semakin memburuk. Hal tersebut terjadi karena kandungan gas buang dari asap kendaraan bermotor tergolong dalam jenis gas yang berbahaya yaitu gas karbon monoksida.

b. Banyaknya Pabrik Industri di Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan kota yang menjadi pusat kegiatan perekonomian di Jawa Timur dan sekitarnya. Sebagian besar penduduknya bergerak dalam bidang jasa, industri, dan perdagangan. Banyak perusahaan besar yang berkantor pusat di Surabaya seperti PT. Sampoerna Tbk, Maspion, Wing's Group, Unilever, PT. PAL, dan lainnya. Kemudian Kota Surabaya juga menjadi pusat kawasan industri seperti Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Margomulyo, dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya pabrik - pabrik industri yang berdiri di Kota Surabaya maka hal ini sedikit banyak mempengaruhi terjadinya polusi udara di Kota Surabaya.

Kawasan industri pastinya akan menghasilkan limbah - limbah buangan baik cair, padat, maupun udara. Limbah udara yang dihasilkan oleh pabrik - pabrik industri berupa asap yang keluar dari cerobong asap yang ada di atap pabrik. Asap yang dihasilkan oleh proses kegiatan produksi sangat berbahaya karena dapat mencemari udara dan bisa menyebabkan semakin menipisnya lapisan ozon. Oleh karena itu, banyaknya pabrik industri di Kota Surabaya menjadi salah satu faktor terjadinya polusi udara yang semakin memburuk.

c. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PU nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan diamanatkan proporsi RTH (Ruang Terbuka Hijau) pada kawasan perkotaan minimal 30 persen yang terdiri dari 20 persen RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik dan 10 persen RTH (Ruang Terbuka Hijau) privat. Sedangkan data RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Surabaya hingga tahun 2018 sudah mencapai 21,79 persen atau sama dengan 7.290, 53 hektar dari luas wilayah Surabaya. Data ini menunjukkan bahwa jumlah RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Surabaya sudah melebihi target yang ditentukan oleh pemerintah. Akan

tetapi, target RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang ditentukan oleh walikota Surabaya sebesar 30 persen dari total luas wilayah Kota Surabaya. Sehingga sampai saat ini Kota Surabaya masih akan terus melakukan pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) di lahan-lahan kosong di wilayah kota Surabaya.

Dalam mengatasi pencemaran polusi udara, RTH (Ruang Terbuka Hijau) mempunyai peran yang sangat penting. RTH (Ruang Terbuka Hijau) memiliki beberapa fungsi penting bagi lingkungan maupun masyarakat diantaranya :

- a. Fungsi Ekologis  
Area RTH (Ruang Terbuka Hijau) dibuat dengan fungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan seperti peningkatan kualitas air tanah, menurunkan peluang terjadinya banjir, memiliki peran dalam pembentukan serta pengaturan iklim mikro, dan mengurangi polusi udara.
- b. Fungsi Sosial Budaya  
Area RTH (Ruang Terbuka Hijau) dapat menjadi tempat dalam kegiatan interaksi sosial, sarana rekreasi, penanda kawasan, hingga menjadi tempat untuk penelitian dan pendidikan.
- c. Fungsi Ekonomi  
RTH (Ruang Terbuka Hijau) dapat dijadikan sebagai daerah wisata hijau di perkotaan yang dapat meningkatkan daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan untuk mengunjungi tempat itu.
- d. Fungsi Estetika  
RTH (Ruang Terbuka Hijau) akan memberikan nilai estetika sehingga meningkatkan kenyamanan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran fungsi - fungsi dari RTH (Ruang Terbuka Hijau) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa RTH mempunyai peranan yang besar bagi sebuah kota besar seperti Kota Surabaya. Oleh karena itu, RTH (Ruang Terbuka Hijau) menjadi solusi

yang efektif untuk mengatasi pencemaran udara yang disebabkan oleh polusi udara dari kendaraan maupun kegiatan industri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Perencanaan sangat dibutuhkan untuk mengatur jalannya proses untuk mencapai keberhasilan dari sebuah tujuan. Perencanaan yang baik pasti mempunyai strategi yang matang sehingga dapat terlaksana tanpa adanya kendala. Teori rasional komprehensif merupakan teori yang mengedepankan pengambilan keputusan berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang logis (rasional). Dalam perencanaan pengambilan keputusan sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan memilih perencanaan yang baik.

Proses perencanaan wilayah dikaitkan dengan pembangunan yang membawa perubahan ke arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu. Dalam perencanaan juga dibutuhkan komponen yang saling berhubungan satu sama lainnya membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Perencanaan juga berkaitan dengan motivasi dari setiap individu itu sendiri. Ruang Terbuka Hijau sebagai sebuah perencanaan aplikatif yang sudah dilakukan di beberapa wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Surabaya untuk menjaga agar kualitas udara di kota tetap baik. Dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya melibatkan partisipasi dari berbagai pihak. Tentu dengan adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Surabaya ini telah berhasil memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga masyarakat.

### 2. Saran

Setiap perencanaan pasti mempunyai strategi akan tetapi dalam pelaksanaannya belum tentu semua strategi dari yang direncanakan akan berhasil dalam mencapai tujuan. Perlu adanya Perencanaan cadangan sebagaiantisipasi jika di tengah jalan terdapat kendala dan permasalahan terkait perencanaan

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No 26 tahun 2007

Khairi, Halilul. *Konsep Dasar Kebijakan Publik (modul 1)*. <http://repository.ut.ac.id/4025/1/MIPK5302-M1.pdf> Diakses pada 27 Oktober 2019.

Anderson, James.1979. *Public Policy Making (Second ed)*. New York: Holt, Rinehart and Winston, New York.

Wahyuni, Sari. Kebijakan Publik : Model Rasional Komprehensif, Inkremental dan Mixed Scanning. Staf Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat <https://sumbarprov.go.id/images/1480504848-3.%20sari.pdf> diakses pada 17 Oktober 2019.

Setiadi, Hafid. Dasar-dasar Teori Perencanaan (modul satu)

Friedmann. 1987. *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton, NJ : Princeton

Taylor, Nigel. 1998. *Urban Planning Theory Since 1945*. Sage Publications Ltd. London.

Riyadi dan Bratakusumah, D.S., 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Hakim, Abdul. (2019). Sudah lebihi target luasan ruang terbuka hijau di Surabaya. Diakses tanggal 16 November 2019, dari <https://m.antaranews.com/berita/981938/sudah-lebihi-target-luasan-ruang-terbuka-hijau-di-surabaya>

Irmadella, Arviana. (2018). MODEL KOLABORASISTAKEHOLDERS DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAMAN BUNGKUL KOTA SURABAYA. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 6.

Iswari, Ardina Nur. (2014). Strategi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 1.



- Kurniawan, Dian. (2019). Suhu Surabaya Turun 2 Derajat Celcius Berkat Ruang Terbuka Hijau. Diakses tanggal 16 Noveber 2019, dari <https://m.detik.com/travel/travel-news/d-2425011/taman-bungkul-di-surabaya-jadi-taman-kota-terbaik-se-asia>
- Marmi. (2016). Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surabaya Sebagai Wahana Peningkatan Kemampuan Dasar Sistematis Tumbuhan. *Jurnal Inovasi*. Vol. 18. 72-80.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2019). Turunkan Suhu hingga 2 Derajat, Begini Cara Wali Kota Risma Perangi Polusi di Surabaya. Diakses tanggal 16 November 2019, dari <https://surabaya.go.id/id/berita/51526/turunkan-suhu-hingga-2-derajat>.
- Widigdo, Wanda & Samuel Hartono. (2010). "Bantaran Kali Jagir, Surabaya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)," Prosiding Seminar Nasional Arsitektur (di) Kota "Hidup dan Berkehidupan di Surabaya. Surabaya: 27 Mei 2010.
- Zaenal. (2013). Taman Bungkul di Surabaya Jadi Taman Kota Terbaik se-Asia. Diakses tanggal 16 November 2019, dari <https://m.detik.com/travel/travel-news/d-2425011/taman-bungkul-di-surabaya-jadi-taman-kota-terbaik-se-asia>
- Priskilla, Milka. *Ruang Terbuka Hijau : Pengertian, Manfaat, Jenis, dan Penyediaan*. 2019 diakses daring <https://foresteract.com/ruang-terbuka-hijau/> pada 18 November 2019.
- Pratama, Bayu. *Pakar Lingkungan Sebut Jalanan di Surabaya Berpolusi Tinggi*. 2019 diakses daring <https://jatimnet.com/pakar-lingkungan-sebut-jalanan-di-surabaya-berpolusi-tinggi> pada 17 November 2019.
- Anonim. *Tentang Surabaya*. 2019 diakses daring <https://www.uc.ac.id/tentang-uc/lokasi/tentang-surabaya/> pada 17 November 2019.
- Kusnandar, Viva. Kota Surabaya Miliki Penduduk Terbanyak di Jawa Timur. 2019 diakses daring <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/19/kota-surabaya-miliki-penduduk-terbanyak-di-jawa-timur> pada 17 November 2019.

Anonim. Surabaya Makin Macet. 2018 diakses daring <http://www.surabayapagi.com/read/surabaya-makin-macet> pada 17 November 2019.



# PERENCANAAN PENGEMBANGAN PERTANIAN ORGANIK DI PEDESAAN KARST, GUNUNG KIDUL, JOGJAKARTA

Disusun oleh :

Berlian Indah Kusumaningrum	17/409880/SP/2772
Fiki Nafila	17/413193/SP/27910
Ramadhani Tareq Kemal Pasha	17/413203/SP/27920
Winda Winarni	17/409894/SP27739

## Latar Belakang

Sebagai negara agraris, Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah dengan posisi strategis. Hampir di setiap daerah di Indonesia dapat ditumbuhi berbagai jenis tanaman dengan baik berdasarkan jenis tanahnya. Sebagai salah satu negara yang mempunyai potensi besar dalam kekayaan alamnya, Indonesia mengembangkan bidang agraris menjadi salah satu sumber pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan yang penting. Indonesia merupakan negara agraris yang identik dengan pertanian. Potensi di bidang pertanian yang dimiliki Indonesia dapat dikembangkan dan dapat menjadi salah satu bidang yang sangat penting perannya dalam meningkatkan pendapatan nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bidang pertanian memiliki daya tarik tersendiri untuk dijadikan lapangan pekerjaan utama, salah satunya yaitu bidang pertanian yang merupakan sumber makanan utama masyarakat. Selama ini, sebagian besar pertanian yang dikembangkan di Indonesia adalah pertanian modern. Pertanian

modern dicirikan dengan sistem usaha tani yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Sutanto (2002) menyatakan bahwa teknologi pertanian modern yang dimaksud adalah penggunaan varietas unggul berproduksi tinggi, pestisida kimia, pupuk kimia/sintesis, dan menggunakan mesin-mesin pertanian untuk mengolah tanah dan memanen hasil.

Namun, seiring dengan berjalannya waktu banyak pakar lingkungan menyadari bahwa penggunaan bahan kimia tersebut dapat menimbulkan dampak negatif berupa penurunan produktivitas tanah akibat penggunaan pupuk kimia serta rusaknya keseimbangan ekosistem akibat penggunaan pestisida. Penggunaan pupuk kimia, menimbulkan beberapa masalah baru yang dirasakan masyarakat petani pengguna pupuk kimia yaitu kondisi tanah menjadi asam, tekstur tanah menjadi keras dan padat, tanah tidak dapat menyimpan air, serta kandungan unsur hara di dalam tanah yang mulai hilang secara bertahap. Selain itu penggunaan pupuk kimia berdampak pada perilaku ketergantungan petani dalam penggunaannya dan justru cenderung menambah takaran pupuk kimia melebihi aturan yang ada maka lama kelamaan tanaman menjadi kebal dan tidak terpengaruh hingga menyebabkan kerusakan pada tanah. Apabila hal ini terus dibiarkan, dapat menyebabkan tanah lahan pertanian kering dan hanya menjadi lahan tandus yang tidak dapat dimanfaatkan.

Keadaan tersebut akhirnya mendorong individu dan kelompok organisasi menyuarakan gerakan untuk mempraktikkan usaha tani alami yang ramah lingkungan dengan berbagai istilah seperti "organik" atau "alternatif" yang dirasa perlu untuk kelestarian lahan dan lingkungan. IFOAM (Federasi Internasional Gerakan Pertanian Organik) menyampaikan bahwa pertanian organik ini sangat tepat untuk diterapkan karena sangat aman bagi kesehatan serta teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Dengan demikian, pertanian organik secara tidak langsung dapat merubah gaya hidup masyarakat yang lebih baik dengan mengkonsumsi produk-produk yang sehat

dan bebas dari bahan kimia. Hal ini didukung oleh pernyataan Sutanto (2002) bahwa jika ditinjau dari segi ekonomi, pertanian organik seharusnya dapat memberikan keuntungan yang diperoleh dari hasil produksi. Sugarda et al. (2008) juga turut berpendapat bahwa pada kasus pangan, pengertian ramah lingkungan tidak hanya sekedar aman (bersih, sehat, bergizi, bermutu, dan berwawasan lingkungan) tetapi juga memberikan jaminan kesejahteraan bagi petani dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan.

Maka dalam penulisan ini akan membahas mengenai pertanian organik pada daerah karst. Kata "Karst" berasal dari nama suatu kawasan yang terletak di perbatasan antara Yugoslavia dengan Italia bagian Utara, dekat kota Trieste Berasal dari bahasa Slovenia "krst/krast". Karst merupakan areal yang mempunyai lithologi dari batuan yang berbahan induk kapur. Batuan tersebut bersifat porous (berpori) dan berongga pada bagian bawahnya, pada bagian permukaan tanah dijumpai doline yaitu lubang-lubang sumur yang terbentuk karena tergerus oleh aliran air. Akibatnya, air hujan yang turun tidak mengalir menjadi aliran permukaan tetapi masuk dan ke dalam tanah. Sehingga tak ada sungai yang mengalir di kawasan ini. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kawasan karst yang cukup luas, diperkirakan mencapai  $\pm$  15,4 juta (Bapenas 2003).

Sebagian besar wilayah pantai selatan dari Pulau Jawa merupakan kawasan karst, dengan bentuk memanjang dari barat hingga ke arah timur. Salah satu kawasan karst yang cukup luas yaitu pedesaan karst yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kondisi geografis yang kurang mendukung pada musim kemarau atau kering dan penggunaan pupuk yang tidak tepat (pupuk kimia) oleh masyarakatnya maka sangat diperlukan strategi perencanaan pertanian yang baik yaitu pertanian organik agar kelestarian atau keberlanjutan lingkungan daerah tersebut dapat terjaga.

## Pendekatan teori

Perubahan selalu terjadi setiap saat, dan berarti beranjak dari keadaan awal dan sebuah proses terjadinya peralihan yang bersifat dinamis. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang direncanakan dan sistematis untuk merencanakan suatu hal dengan adaptasi kepada perubahan pada yang ada di lingkungan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Sementara itu teori perubahan menurut Roger (1962) menekankan pada latar belakang individu yang terlibat di dalam perubahan tersebut. Menurut Roger dalam melaksanakan perubahan diperlukan langkah-langkah seperti :

1. Tahap Awareness  
Dalam tahap ini perubahan diawali oleh kesadaran hingga akhirnya terjadi peralihan.
2. Tahap Interest  
Perubahan perlu perasaan minat untuk perubahan yang diharapkan.
3. Tahap Evaluasi  
Tahap penilaian agar hambatan tidak terulang di kemudian hari.
4. Tahap Trial  
Adalah tahap percobaan terhadap hasil dari perubahan yang terjadi.
5. Tahap Adoption  
Merupakan tahap terakhir yaitu penerimaan terhadap perubahan itu sendiri.

Dalam perubahan setiap aktor dapat menerima maupun menolaknya seiring berjalannya waktu, Roger beranggapan perubahan akan bersifat positif jika aktor berupaya untuk terus berkembang dan beraktualisasi, sedangkan perubahan akan menjadi siklus yang akan menghasilkan hal yang berdampak pada hal lain, sehingga dalam perubahan unsurnya saling memengaruhi dan terikat.

Perubahan selain dianggap suatu proses peningkatan juga dipandang sebagai suatu penghambat bagi sebagian aktor sehingga

menimbulkan penolakan akibat gangguan keamanan terhadap aktor tersebut. Perubahan dalam perencanaan bisa menjadi krusial guna memperbaiki sistem lama menjadi baru, menciptakan inovasi agar hal yang direncanakan menjadi lebih baik dan tentunya setelah melewati tahap-tahap yang ada dalam perubahan.

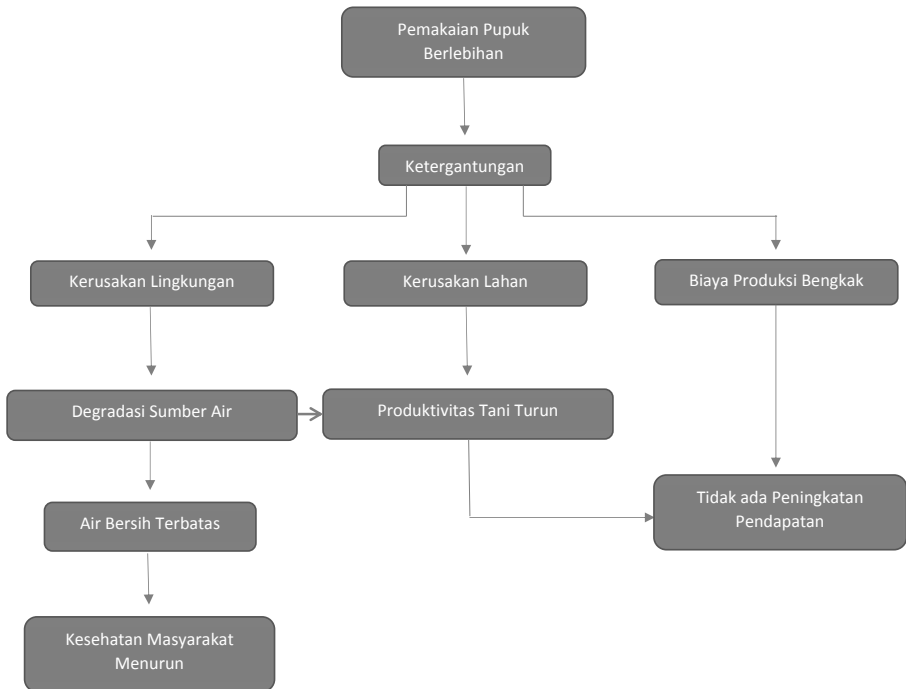
### **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan data hasil observasi dan juga wawancara terhadap masyarakat setempat mengenai permasalahan yang dirasakan oleh warga. Kondisi lahan pertanian yang mengalami pengerasan pada struktur tanah dan sulitnya akses terhadap air bersih, karena kondisi mata air yang mengering. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya terjadi degradasi lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, atau ketergantungan masyarakat terhadap pupuk kimia sehingga apabila digambarkan dengan metode *tree problem* permasalahan tersebut dapat menghasilkan sebab-akibat sebagai berikut



# PROBLEM TREE PERTANIAN ORGANIK DI GUNUNG KIDUL

Gambar 1.



Dari *Problem Tree* di atas dapat dilihat garis sebab akibat, dimana pemakaian pupuk kimia selama ini sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam pertanian sehari - hari. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara suplemen tumbuhan dan pupuk, serta takaran penggunaan yang ideal, berimbas pada penggunaan pupuk yang berlebihan dan terus-menerus tanpa diimbangi dengan upaya pelestarian lahan. Hal ini diperbruk juga dengan penebangan tumbuhan keras yang berfungsi alami sebagai wadah penyimpanan air tanah.

Penggunaan pupuk kimia secara *massive* ini kemudia berdampak kepada tiga sektor lain, yaitu kerusakan lingkungan, kerusakan lahan pertanian, dan berimbas ke faktor ekonomi atau modal dari para petani. Kerusakan lahan diakibatkan oleh tercemarnya kondisi air tanah akibat limbah kimia yang terbawa oleh air irigasi lahan. Selain itu banyak ditebang tanaman keras, seperti pepohonan dan bamboo, yang kemudian diganti oleh tumbuhan jati mengakibatkan melemahnya kemampuan tanah sekitar area lahan pertanian dalam menyerap air tanah. Kurangnya akses air bersih kemudian berimbas kepada konsumsi rumah tangga yang menurun dan secara tidak langsung produktivitas pertanian warga yang berhenti dikarenakan mengutamakan kebutuhan air untuk konsumsi sehari-hari.

Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dan sudah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, mengakibatkan rusaknya kandungan humus di dalam tanah. Hal ini kemudian merubah struktur tanah menjadi keras dan tidak mampu menyerp air secara optimal. Secara bersamaan kondisi lahan pertanian yang sudah memburuk berarti lahan membutuhkan pupuk yang lebih banyak, pola pikir seperti ini yang difahami masyarakat dalam menggunakan pupuk atau suplemen tani berbahan dasar kimia.

Di satu sisi tidak adanya kelompok tani yang cukup mapan secara organisasi dan fungsi sebagai distributor baik hasil pertanian dan juga keperluan penunjang komunitasnya. Secara tidak langsung kegiatan pertanian yang tidak terorganisir memberikan dampak yang cukup signifikan kepada komunitas tani di wilayah tersebut. Sebagai contoh tidak adanya fungsi penyaluran pupuk bersubsidi, kemudia memaksa para petani untuk membeli pupuk secara individu dengan harga yang lebih mahal. Selain itu tidak berfungsinya kelompok tani secara tidak langsung memutus alur distribusi bantuan dari pemerintah daerah baik di bidang subsidi ataupun pengembangan kapasitas. Tidak adanya fungsi distribusi hasil tani juga berpengaruh terhadap *income* juga yang stagnan.

## Metode Perencanaan

### Theory of Change

Theory of Change atau Teori Perubahan adalah salah satu bentuk metodologi yang digunakan untuk mempromosikan perubahan sosial, teori ini memberi penjelasan tujuan yang berjangka panjang yang kemudian memetakan ke belakang sehingga bisa mengidentifikasi prasyarat yang diperlukan. Teori ini mencoba menjelaskan perubahan yang terjadi melalui hubungan sebab dan akibat. Teori Perubahan menggambarkan jenis intervensi (satu program atau inisiatif masyarakat luas) yang membawa hasil yang digambarkan dalam jalur dari peta perubahan. Setiap hasil di jalur perubahan terkait dengan intervensi, mengungkapkan kegiatan yang diperlukan untuk membawa perubahan.

Teori Perubahan tidak akan lengkap tanpa adanya asumsi bahwa para stakeholder digunakan untuk menjelaskan proses perubahan. Asumsi ini menjelaskan antar koneksi yaitu tujuan awal jangka menengah, panjang dan harapan tentang bagaimana serta mengapa perlu diadakan intervensi. Asumsi juga perlu didukung oleh penelitian. Penelitian ini harus memperkuat kasus sehingga dibuat secara masuk akal dari teori dan kemungkinan yang mana menyatakan tujuan yang akan tercapai.

Teori perubahan merupakan bagian dari perencanaan dan evaluasi program karena menciptakan visi umum yg dipahami dalam tujuan jangka panjang, bagaimana mereka mencapai tujuan, serta apa yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan sepanjang proses. Perencanaan yang baik dan metode evaluasi untuk perubahan sosial memerlukan peserta dalam prosesnya dan harus jelas tujuan jangka panjang yang akan dicapai, serta perlunya identifikasi indikator-indikator terukur untuk menentukan kesuksesan, dan merumuskan tindakan untuk mencapai tujuan awal.

Stein dan Valters (2012) mengungkapkan sejak digunakan dalam bidang pengembangan masyarakat, pendekatan ToC semakin menjadi arus utama. Ini sebagian besar disebabkan oleh tuntutan

para penyandang dana utama, yang fokusnya pada ToC telah menguat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun beberapa orang mungkin melihat ToC hanya sebagai 'kata kunci', tetapi tampaknya hal itu juga mewakili keinginan yang meningkat bagi organisasi untuk dapat mengeksplorasi dan mewakili perubahan dengan cara yang mencerminkan pemahaman pembangunan yang kompleks dan sistemik.

Di luar konseptualisasi awal ini, ada sedikit konsensus tentang bagaimana ToC didefinisikan. Namun, seperti definisi awal Weiss (dalam Stein dan Valtes, 2012), ToC paling sering didefinisikan dalam hal koneksi antara kegiatan dan hasil, dengan artikulasi koneksi ini komponen kunci dari proses ToC. Kemampuan untuk mengartikulasikan hubungan ini bertumpu pada gagasan bahwa, program sosial didasarkan pada teori eksplisit atau implisit tentang bagaimana dan mengapa program akan bekerja. Mengartikulasikan teori-teori ini biasanya melibatkan mengeksplorasi seperangkat keyakinan atau asumsi tentang bagaimana perubahan akan terjadi. Pendekatan ToC dimaksudkan berfungsi sangat penting untuk kejelasan dan kepraktisan dari ToC yang diberikan dan intervensi terkait. Konsep level ini juga berguna dalam memeriksa bagaimana fungsi ToC dalam suatu organisasi, karena mungkin ada ToC implementasi untuk intervensi tertentu serta ToC organisasi untuk memandu keputusan perencanaan (Weiss dalam Stein dan Valtes, 2012).

James dalam Stein dan Valters, 2012 mengidentifikasi sejumlah besar 'level' untuk ToCs: ada "teori perubahan makro (perspektif dan pemikiran pengembangan yang memengaruhi kita); teori perubahan sektor atau kelompok sasaran; teori perubahan organisasi; dan teori perubahan proyek atau program. Level ToC dalam suatu organisasi juga sering saling bergantung (Stein dan Valters, 2012).

Salah satu cara memahami konsep level dalam ToC adalah dengan melihat para aktor dan target dari proses perubahan yang dimaksud. Seperti yang Shapiro soroti (dalam Stein dan Valtes, 2012)

para praktisi tampaknya menargetkan target level aktor tertentu sebagai titik awal untuk membuat konsep perubahan :

1. Mengubah individu melibatkan strategi yang menggeser sikap dan persepsi, perasaan, perilaku dan motivasi peserta dalam intervensi.
2. Program yang berfokus pada perubahan hubungan sering kali menunjukkan bahwa jaringan baru, koalisi, aliansi, dan hubungan kerja sama lainnya antara anggota kelompok yang bertentangan tidak hanya secara positif mengubah individu yang terlibat langsung, tetapi dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk mendorong perubahan sosial yang membantu menyelesaikan konflik. Strategi perubahan tingkat meso ini bertujuan untuk mempengaruhi individu dan struktur sosial.
3. Perubahan struktural, kelembagaan dan sistemik adalah fokus utama untuk beberapa program intervensi konflik. Upaya-upaya ini sering secara langsung ditujukan pada reformasi legislatif, pemilu dan peradilan. , membangun mekanisme dan forum mediasi baru dalam masyarakat, prakarsa pembangunan ekonomi (misalnya keuangan mikro, pelatihan kerja) dan dukungan infrastruktur untuk kebutuhan dasar manusia (misalnya air, makanan, perawatan kesehatan).

Dalam perumusanya ToC harus memiliki dasar-dasar yang baku dan cukup kuat dalam pembentukan asumsinya seperti pengetahuan ilmu sosial yang lebih luas dan penelitian primer baru sebagai bukti nyata. Proses ini harus didasarkan pada analisis yang akurat dari baik konteks masing-masing intervensi dan pemahaman tentang peran pihak yang melakukan intervensi. Ini memastikan baik kemungkinan untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam ToC, dan juga tujuan yang realistis dari tujuan ini. Landasan yang tepat juga akan memastikan bahwa ToC dapat digunakan atau dapat dilakukan, yang berarti bahwa sumber daya, keahlian, dan kondisi eksternal yang diperlukan untuk perubahan diidentifikasi dan hadir.

ToC juga harus memenuhi beberapa pokok konten utama dalam perumusannya, sehingga mendapatkan cakupan yang cukup holistic.

Meskipun komprehensif, kriteria yang tercantum belum tentu benar-benar sesuai untuk memenuhi atau menyelesaikan masalah - masalah utama ketika mendekati ToC (Stein dan Valters, 2012). Dengan demikian, Hivos dalam Stein dan Valters (2012) menekankan pentingnya menggabungkan “analisis kekuatan tentang” bagaimana perubahan terjadi “dan kekuatan yang berperan yang membantu atau menghambat” berubah menjadi pendekatan ToC.

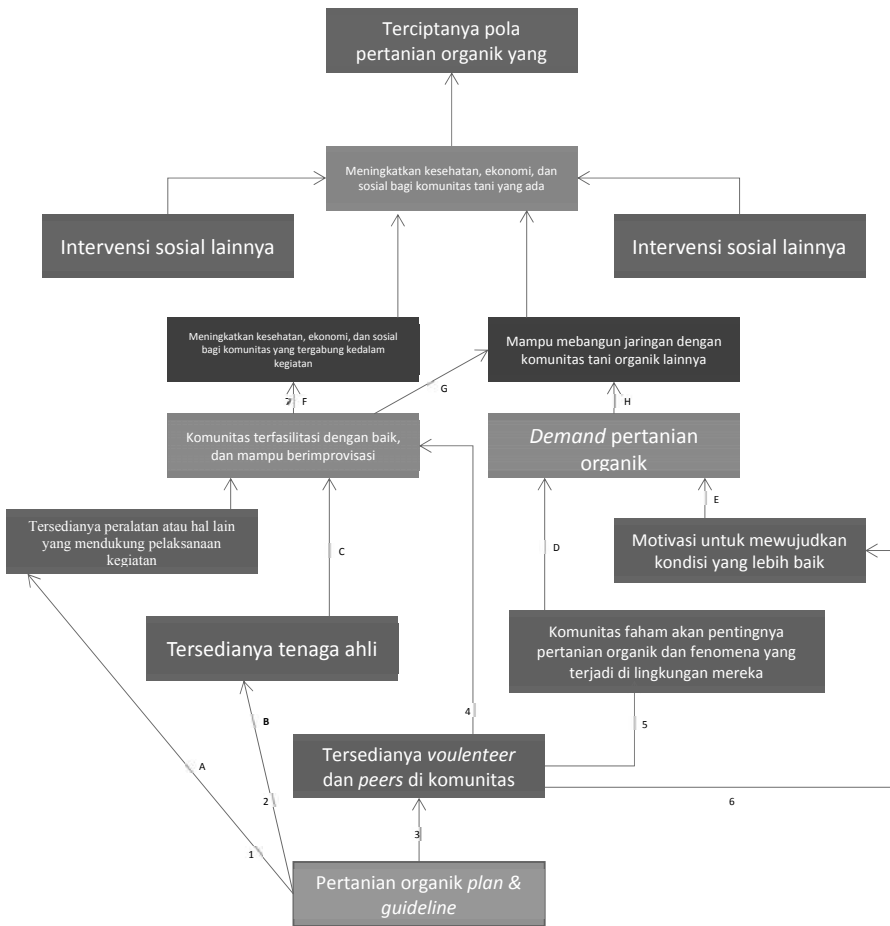
### **Perencanaan Aplikatif**

Pengaplikasian pertanian organik pada komunitas tani bukan merupakan sesuatu yang mudah. Perlu dilakukan pendekatan khusus guna meningkatkan pemahaman komunitas mengenai pentingnya dari pola pertanian organik, guna melestarikan lingkungan serta merevitalisasi kondisi lahan pertanian yang rusak akibat penggunaan pupuk kimia. Dari uraian di atas maka terbentuklah sebuah peta rencana *plan and guideline*.

Peta perencanaan ini kemudian akan menjadi dasar pelaksanaan program guna mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam proses perumusannya peta perencanaan didasari oleh beberapa aspek mulai termasuk didalamnya adalah pendekatan *specific, measureable, achievable, realistic, dan timely* (SMART) yang terimplementasikan dalam peta perencanaan dan tentunya termasuk pemetaan aktor yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan, maupun aktor yang dapat menghambat kegiatan.

# Peta Rencana Program Pertanian Organik di Gunung Kidul

Gambar 2.



## Legenda peta perencanaan:

- **Intervensi kegiatan:**

1. Membuka ruang untuk tersedianya intervensi mengenai penting serta manfaat pertanian organik di masyarakat dan penyediaan bahan-bahan penunjang kegiatan.
2. Pelatihan untuk tenaga ahli di bidang pelatihan tersebut (tokoh di masyarakat setempat), menghadirkan praktisi dari luar.
3. Perekrutan masa yang bersedia bergabung dalam kegiatan
4. Mengidentifikasi prioritas masalah yang dialami masyarakat dan dapat ditangani dengan berlangsungnya kegiatan pertanian organik, sehingga dapat memperkecil *gap* di riap lahan milik warga.
5. Intervensi berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemahaman (baik melalui iterasi dan *FGD*) tentang pentingnya pertanian organik
6. Intervensi berbasis masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.
7. Manajemen mengenai dampak kerusakan dan revitalisasi lahan. Juga manajemen pola penuaan produk tani organik.

- **Asumsi dalam ToC**

- a. Pembuatan ketentuan anggaran, untuk pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung.
- b. dukungan politik dan dukungan untuk mendukung untuk mendukung pedoman pertanian organik.
- c. Para tokoh dan pejabat pemerintah mau mendukung dan mengembangkan pertanian organik di wilayah mereka.
- d. Meningkatnya pemahaman masyarakat diharapkan mampu mendukung dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pola pertanian organik serta *benefitnya* bagi komunitas dan lingkungan.
- e. Menurunnya angka ketergantungan terhadap pupuk kimia diharapkan mampu mengalihkan pola pertanian masyarakat ke pertanian organik.



- f. Mampu mengembangkan produk kegiatan dan mengakses pasar yang tersedia atau membuka peluang kerja baru.
- g. Mampu mengakses komunitas lalin dan membangun jejaring
- h. Mampu membangun pola kerja dan pasar bersama

Dalam perencanaan yang terangkum pada peta tersebut, sudah didasarkan dengan diskusi serta pengasumsian yang paling mendasar atas permasalahan yang terjadi dan dirasakan langsung oleh subjek penerima kegiatan. Tentunya hal ini guna meminimalisir adanya kegagalan serta agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dan dibutuhkan oleh semua pihak. Tiap poin sengaja di proyeksikan untuk terbuka terhadap segala intervensi sosial dan juga ruang partisipasi bagi masyarakat lokal.

Dalam proses intervensi sosial diperlukan adanya dukungan dari tokoh-tokoh yang dianggap mampu mendukung jalannya kegiatan. Selain itu semua kegiatan yang direncanakan harus di desain secara berjenjang guna mencapai target dari pelaksanaan program serta memastikan tiap aspek telah memiliki kesamaan tujuan dan mampu menjalankan fungsinya untuk mendukung berjalannya kegiatan.

## **Penutup**

Dalam proses pembuatan perencanaan tentunya harus dapat memenuhi segala aspek yang dibutuhkan hingga mencapai tujuan. Oleh karena itu pandangan yang holistik serta adanya dialog dari penyelenggara dan juga subjek yang diberdayakan harus hadir dalam tiap perumusan kegiatan yang akan dilakukan. Persiapan yang mendetail serta asumsi yang didasari atas fakta yang terjadi dan kajian teori dari tindakan yang dilakukan dirasa penting dalam membangun sebuah keputusan dan menghasilkan produk yang bermanfaat dan berkelanjutan, serta mampu mengakomodir kebutuhan dari tiap subjek yang berproses dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Selain itu pendekatan

Sebagai seorang yang membuat perencanaan, terutama dalam

bidang *empowerment* tentunya juga harus mampu dalam memetakan kemampuan subjek, baik kelebihan maupun kekurangan. Hal ini jelas menjadi kebutuhan yang mendasar, bahwasanya seorang praktisi dalam bidang perencanaan harus mampu mendesain sebuah strategi berjenjang guna mempersiapkan setiap aspek, mulai dari sekelompok orang hingga akhirnya menjadi satu sistem yang siap melaksanakan seluruh alur proses kegiatan hingga mewujudkan perubahan yang ditetapkan di awal dengan kemampuan komunitas itu sendiri.

### Daftar Pustaka

- Purwanto, Imam Jurnal Litbang Pertanian dalam “*Kearifan Lokal Usaha Tani Ramah Lingkungan di Kawasan Karst Gunung*” diakses melalui <http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/lainnya/imam%20waktu%20potong%20padi.pdf> pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 23.00 WIB
- Stein, Danielle dan Valters, Craig. 2012. *Understanding Theory Of Change In International Development, Justice and Security Research Program (JSRP) and The Asia Foundation (TAF)*.
- Utami, Firda Emiria Jurnal Institut Pertanian Bogor dalam “*Pengembangan Pertanian Organik di Kelompok Tani Madya, Desa Kebonagung, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta*” diakses melalui <https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/66038/1/I13feu.pdf> pada tanggal 25 Oktober 2019 pukul 21.00 WIB
- Rogers, Everett M. 1962. *Diffusion and Innovation*. The Free Press: New York.

Lampiran:

Legenda peta perencanaan:

- Intervensi kegiatan:
  1. Membuka ruang untuk tersedianya intervensi mengenai penting serta manfaat pertanian organik di masyarakat dan penyediaan bahan-bahan penunjang kegiatan.
  2. Pelatihan untuk tenaga ahli di bidang pelatihan tersebut (tokoh di masyarakat setempat), menghadirkan praktisi dari luar.
  3. Perekrutan masa yang bersedia bergabung dalam kegiatan
  4. Mengidentifikasi prioritas masalah yang dialami masyarakat dan dapat ditangani dengan berlangsungnya kegiatan pertanian organik, sehingga dapat memperkecil *gap* di riap lahan milik warga.
  5. Intervensi berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemahaman (baik melalui iterasi dan *FGD*) tentang pentingnya pertanian organik
  6. Intervensi berbasis masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia.
  7. Manajemen mengenai dampak kerusakan dan revitalisasi lahan. Juga manajemen pola penuaan produk tani organik.
  
- Asumsi dalam ToC
  - i. Pembuatan ketentuan anggaran, untuk pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung.
  - j. dukungan politik dan dukungan untuk mendukung untuk mendukung pedoman pertanian organik.
  - k. Para tokoh dan pejabat pemerintah mau mendukung dan mengembangkan pertanian organik di wilayah mereka.
  - l. Meningkatnya pemahaman masyarakat diharapkan mampu mendukung dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pola pertanian organik serta *benefitnya* bagi komunitas dan lingkungan.

- m. Menurunnya angka ketergantungan terhadap pupuk kimia diharapkan mampu mengalihkan pola pertanian masyarakat ke pertanian organik.
- n. Mampu mengembangkan produk kegiatan dan mengakses pasar yang tersedia atau membuka peluang kerja baru.
- o. Mampu mengakses komunitas lain dan membangun jejaring
- p. Mampu membangun pola kerja dan pasar bersama



# **PROGRAM PERENCANAAN: REVITALISASI BEKAS TAMBANG KAPUR MENJADI DAERAH OBJEK WISATA ( DESA BEDOYO, KECAMATAN PONJONG, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, D.I YOGYAKARTA)**

Disusun Oleh:

Annisa Feli Surahya

17/409875/SP/27720

Desyana Setyarini

17/413190/SP/27907

Rayi Nandhini

17/414918/SP/28045

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Indonesia memiliki banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, data tahun 2018 dilansir dari *detiknews.com* menyebutkan bahwa Delegasi Pemerintah Indonesia telah melaporkan 16.056 pulau bernama di Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (Mardiastuti,2018). Maka tidak heran jika Indonesia termasuk sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Bukan hanya itu, Indonesia pun terkenal sebagai negara yang kaya karena memiliki sumber daya alam yang berlimpah, baik yang berasal dari alam berupa hasil hutan, pertanian, perkebunan hingga perairan, maupun yang berasal dari dasar bumi yang berupa hasil pertambangan.

Selain sumber daya alam yang berasal dari hasil pertanian, hasil pertambangan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Indonesia. Sifat hasil pertambangan yang tidak dapat terbarukan atau membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperolehnya kembali, menjadikan sumber daya tersebut bernilai ekonomi yang

sangat tinggi. Jenis tambang tersebut antara lain, tambang batu bara, tambang minyak bumi, tambang emas, tambang timah, tambang batu kapur dan masih banyak lagi. Barang tambang tersebut tersebar di berbagai daerah tetapi, ada salah satu jenis tambang yang hampir dimiliki seluruh wilayah Indonesia yaitu tambang batu kapur. Daerah tersebut dilansir dari *tambangbatu.com* tambang batu kapur/gamping yang paling banyak terdapat di daerah Papua dengan jumlah 244.082,73 juta ton, diikuti Sulawesi sebesar 95.518,85 juta ton, kemudian Maluku dan Halmahera yang mencapai 93.345,22 juta ton. Sementara itu di pulau Jawa sumber daya batu kapur juga terbilang cukup banyak yakni 12.288,95 juta ton (Tambangbatu,2018). Beberapa wilayah di Indonesia bahkan ada tanah yang kaya akan gamping hingga membentuk sebuah bongkahan besar menyerupai gunung kapur, salah satunya di pulau Jawa tepatnya di D.I. Yogyakarta.

Yogyakarta yang terkenal sebagai kota pelajar dan kota wisata juga tidak luput akan potensi tambangnya. Diketahui bahwa Yogyakarta memiliki pegunungan kapur tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul. Luas kawasan *karst* ini sekitar 807 km persegi, atau 53% dari luas Kabupaten Gunung Kidul yang 1.483 Km persegi. Kekayaan akan karst tersebut menjadi daya tarik dari para investor untuk melakukan penambangan batu kapur di kawasan ini. Berdasarkan Data inventerisasi dan verifikasi dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (EDSM) Provinsi DI Yogyakarta ada 7 perusahaan yang melakukan penambangan batu gamping dengan jumlah total luas eksploitasi 40 ribu meter persegi. Sedangkan jumlah usaha pertambangan warga ada 14 usaha yang terverifikasi izin eksploitasinya dengan jumlah eksploitasi berkisar 7 ribu meter persegi (Apriando,2012).

Sementara itu, seiring banyaknya aktivitas tambang di Gunung Kidul mengakibatkan munculnya berbagai masalah, baik di masyarakat maupun dampak bagi lingkungan. Masyarakat dihadapkan pada kondisi sosial yang cukup berat untuk memilih antara melakukan penambangan demi memenuhi kebutuhan hidup

sehari-hari atau terus menambang akan tetapi berdampak pada kerusakan wilayah karst di Gunung Kidul, padahal kawasan karst tersebut merupakan kawasan yang dilindungi oleh perundang-undangan. Hal ini pun juga disampaikan oleh anggota Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Gunung Kidul Sri Agus Wahono dilansir dari *kompas.com* yang mengatakan bahwa Kawasan karst di Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, merupakan kawasan lindung yang tidak boleh ditambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Sawabi,2010).

Permasalahan terkait pertambangan di Gunung Kidul memang cukup pelik dan sejatinya menguras energi para pihak terkait. Mulai dari masalah wilayah mana yang boleh dan tidak boleh ditambang, penambangan yang tidak mempedulikan aspek kelestarian lingkungan, penambangan yang telah memasuki zona merah pertambangan atau area yang tidak diizinkan, sampai dengan penutupan pabrik-pabrik pengolah batu hasil pertambangan karena diduga menampung material hasil tambang ilegal, dan lain sebagainya. Salah satu pabrik tambang tersebut berada di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta.

Akibat dari adanya penutupan tambang tersebut berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat sekitar. Mereka menopang hidup melalui kegiatan tambang, akibat penutupan tambang menyebabkan masyarakat setempat menjadi pengangguran. Bekas tambang pun meninggalkan gurat-gurat dan lubang di berbagai sisi pegunungan kapur. Sehingga masyarakat harus berpikir ulang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Berkaca pada kasus yang sama yaitu Tebing Breksi yang mana merupakan bekas tambang, kini justru menjadi objek wisata yang dikenal hingga berbagai daerah bahkan jumlah pengunjungnya semakin meningkat. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Sudarningsih yang dilansir dari *tribunjogja.com* mengatakan bahwa



data per desember tahun 2018 jumlah kunjungan Tebing Breksi telah menyentuh angka 904 ribu (Aprita,2018).

Oleh karena itu, salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh masyarakat yaitu dengan mengubah bekas tambang yang semula terbengkalai kemudian diolah menjadi tempat yang dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah. Gunung Kidul yang terkenal dengan pesona alam seperti pantainya kini dapat juga dikenal dengan objek wisata baru yaitu objek wisata tebing batu dengan berbagai pesona ukiran-ukiran yang nantinya akan dipahat pada dinding-dinding bekas tambang sehingga meningkatkan nilai estetikanya. Bekas tambang tersebut diperbaiki melalui berbagai perencanaan program guna membangun sarana wisata yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Berbagai pemberdayaan dilakukan dengan partisipasi masyarakat lokal dalam membuka usaha di sekitar tempat wisata, sehingga dengan adanya upaya revitalisasi tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Perencanaan tersebut harus disusun secara matang sehingga harus diperkuat melalui suatu teori perencanaan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam menyusun perencanaan tersebut guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka paper ini akan menjelaskan mengenai suatu perencanaan revitalisasi bekas tambang menjadi objek wisata tepatnya di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta yang diharapkan akan menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar dan mampu meningkatkan kesejahteraanya.

## **Rumusan Masalah**

1. Teori perencanaan apa yang digunakan dalam upaya perencanaan revitalisasi bekas tambang menjadi objek wisata di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta?

2. Bagaimana implementasi teori tersebut ke dalam langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya revitalisasi bekas tambang menjadi objek wisata di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta

### **Tujuan**

1. Untuk mengetahui teori perencanaan yang digunakan dalam upaya perencanaan revitalisasi bekas tambang menjadi objek wisata di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan sebagai upaya merealisasikan revitalisasi bekas tambang menjadi objek wisata di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta.

## **PEMBAHASAN**

### **Landasan Teoritis**

Revitalisasi bekas tambang diformulasikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat serta memperbaiki dan memindahkan bekas lokasi tambang agar tidak berujung terbengkalai. Rencana ini akan disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan faktor tantangan internal dan faktor tantangan eksternal.

Tantangan internal dalam perencanaan ini antara lain terkait dengan perizinan dari masyarakat dan juga dinas lingkungan setempat untuk merevitalisasi bekas tambang kapur. Tantangan internal lainnya adalah sumber daya manusia yang terbatas kaitannya dengan proses pembuatan ukiran seni di lokasi tebing. Sedangkan tantangan eksternal disebabkan oleh berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, dan semakin meningkatnya tuntutan hidup. Sehingga dengan adanya tantangan tersebut dikhawatirkan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam program yang ada. Kurangnya partisipasi masyarakat akan berakibat pada kelancaran dan keberlangsungan suatu program.

Oleh karena itu, berdasarkan tantangan diatas untuk meminimalisir segala kemungkinan tersebut pada akhirnya penulis menggunakan salah satu teori perencanaan yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program revitalisasi bekas tambang kapur. Teori yang digunakan adalah teori sinoptik oleh Hudson (1979) dan konsep SMART Goal oleh George T. Doran (1981) sebagai pendukung tercapainya perencanaan tersebut. Lebih lanjut, teori sinoptik akan dijelaskan sebagai berikut:

- **Teori Sinoptik oleh Hudson (1979)**

Kegiatan perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang melekat pada kehidupan sehari-hari kita. Dalam melaksanakannya, perencanaan membutuhkan suatu teori sebagai sebuah pendekatan. Barclay Hudson (1979), menyebutkan beberapa teori perencanaan yang diantaranya adalah Teori Sinoptik, Teori Radical, Teori Advocacy, Teori Transactive, dan Teori Incremental. Diantara beberapa teori tersebut, teori yang kami gunakan untuk aplikasi disini adalah Teori Sinoptik.

Alasan utama dipilihnya Teori Sinoptik untuk pendekatan perencanaan adalah karena teori ini memposisikan para ahli sebagai pihak yang mendominasi dan memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan sedangkan masyarakat hanya memiliki sedikit peran di dalamnya namun masyarakat juga turut berpartisipasi dalam mewujudkan keberhasilan program. Hal tersebut terlihat dalam perencanaan revitalisasi bekas tambang karts menjadi objek wisata di Desa Bedoyo di mana dalam proses perencanaan dan pembangunan objek wisata tersebut dilakukan oleh para ahli seperti ahli geologi dan seniman. Dalam proses pembangunan wisata ini memang hanya membutuhkan ahli geologi dan seniman sebagai pelaksana perubahan yang nantinya akan dilakukan. Peran masyarakat sekitar hanya sebagai pendukung, serta sebagai pihak yang menikmati hasil. Bahkan tidak ada unsur politik dalam perencanaan ini. Alasan pendukung lainnya adalah tidak begitu

memperhitungkan sumber daya dan memanfaatkan sumber daya yang ada di Desa Bedoyo berupa bekas tambang karts yang nantinya akan diubah menjadi objek wisata karts yang dapat meningkatkan pariwisata di Gunung Kidul.

Teori Sinoptik ini merupakan teori perencanaan paling komprehensif dibanding teori milik Hudson yang lain karena teori sinoptik mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan, yang dengan kata lain Sinoptik berusaha menyelesaikan masalah secara menyeluruh.

Langkah-langkah perencanaan dalam Teori Sinoptik diantaranya adalah :

1. Pengenalan masalah
2. Estimasi ruang lingkup modern
3. Klasifikasi kemungkinan penyelesaian
4. Investigasi masalah
5. Prediksi alternatif
6. Evaluasi kemajuan atas penyelesaian spesifik

Selanjutnya, untuk mendukung tercapainya tujuan perencanaan tersebut maka digunakan pula konsep SMART Goals yang merupakan pedoman untuk menentukan sasaran atau target pada suatu program. Dilansir dari *ilmumanajemenindustri.com* Prinsip SMART Goal ini pertama kali dikenalkan oleh George T. Doran pada tahun 1981 dalam Majalah Management Review (Budi, 2017). Penentuan sasaran ataupun target yang tepat merupakan salah satu hal penting dalam memotivasi dan meningkatkan kinerja suatu Tim. Kata "SMART" merupakan singkatan dari Specific, Measurable, Attainable, Realistic dan Timely. Berikut ini adalah penjelasan mengenai SMART Goals :

1. Specific (Spesifik / Khusus)

Target suatu program harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. Suatu target yang ditentukan dengan spesifik akan memiliki kesempatan pencapaian yang lebih tinggi

dibandingkan dengan target yang ditentukan secara umum dan luas. Misalnya, apa yang ingin dicapai, siapa saja yang terlibat, dan sebagainya. Biasanya, sesuatu yang spesifik akan menjawab pertanyaan yang meliputi 5W+1H.

2. Measureable (Dapat diukur)

Setelah menentukan tujuan yang spesifik, tahap selanjutnya adalah mengukur kemajuan dari tindakan yang sudah dilakukan. Kemajuan akan membantu tim untuk tetap berada dalam jalur yang benar, menepati tenggat waktu, serta dapat dilakukan peninjauan ulang dan evaluasi program.

3. Attainable (Yang dapat dicapai)

Attainable menekankan bahwa target harus realistis dan dapat dicapai. Target tidak boleh dibuat terlalu mudah, tapi juga tidak boleh terlalu sulit sehingga terasa mustahil untuk dicapai atau dengan kata lain bahwa target disesuaikan dengan kemampuan Tim. Pada versi SMART Goals lainnya, Attainable juga disebut dengan Achievable.

4. Realistic (Realistis)

Target program yang ditentukan harus bersifat realistis atau masuk akal. Realistis ini penting untuk menyusun tujuan sehingga pembuatan tujuan disesuaikan dengan kemampuan serta batas waktu yang ada sehingga suatu program dapat dilaksanakan dengan baik.

5. Timebound (Batas Waktu)

Harus menetapkan batas waktu dalam mencapai target program. Tanpa adanya batas waktu, Tim akan bekerja lambat dan sulit untuk mencapai target yang diinginkan. Penetapan waktu ini sangat penting agar Tim terpacu untuk segera melakukan tindakan dan menyelesaikan target sesuai waktu yang disepakati.

## Implementasi Teori

Gunung Kidul merupakan salah satu kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas wilayah 1.485,36 km<sup>2</sup>. Kabupaten Gunung Kidul juga dikenal dengan istilah Pegunungan Kapur Selatan karena wilayahnya didominasi oleh pegunungan karts yang terbentang di Selatan Pulau Jawa. Kondisi geografis yang dimiliki tersebut menjadikan Gunung Kidul sebagai salah satu destinasi wisata di Yogyakarta yang ramai dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Salah satu objek wisata yang terkenal di kabupaten ini adalah pesona pantai pasir putih yang dimiliki karena kondisi topografi Gunung Kidul yang terdiri dari batuan karts mampu menyimpan keindahan tersendiri bagi pantainya. Selain menjadi daya tarik wisata, potensi kekayaan alam yang dimiliki justru dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengambil keuntungan dengan melakukan kegiatan penambangan karts secara ilegal. Padahal kawasan karts di Kabupaten Gunung Kidul merupakan kawasan yang dilindungi oleh perundang-undangan dan pemerintah melarang masyarakat untuk mengeksploitasi batuan karts tersebut.

Dilansir dari *kompas.com*, anggota Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Gunung Kidul Sri Agus Wahono mengatakan bahwa kawasan karts di Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta, merupakan kawasan lindung yang tidak boleh ditambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Sawabi, 2010). Meskipun telah ada peraturan pemerintah terkait pelarangan penambangan karts, namun masih kerap dijumpai praktik tersebut di beberapa pedalaman Gunung Kidul yang jauh dari pemukiman warga dan pengawasan aparat penegak hukum sehingga para penambang leluasa untuk mengeksploitasi batuan karts tanpa memikirkan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Praktik penambangan secara asal-asalan dan penggunaan alat berat untuk mengeruk batuan karts tersebut menyebabkan bukit-bukit

karts menjadi berlubang dan tidak jarang pula menyebabkan tanah longsor yang dapat menelan korban jiwa.

Salah satu wilayah penambangan karts secara ilegal pernah terjadi di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul yang sampai saat ini keadaanya masih terbengkalai dan belum ada revitalisasi dari bekas tambang tersebut. Revitalisasi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah dengan menyulap bekas tambang menjadi objek wisata yang nantinya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran kepada masyarakat untuk mengangkat problematika yang ada berupa bekas tambang karts menjadi potensi yang sangat menguntungkan dengan diubahnya menjadi objek wisata yang menarik layaknya wisata Tebing Breksi yang ada di Kabupaten Sleman. Dengan adanya objek wisata yang dapat dikelola secara mandiri oleh masyarakat pastinya akan meningkatkan *capacity building*, kemandirian, dan tingkat kesejahteraan yang baik bagi masyarakat setempat. Selain itu juga dapat memberdayakan masyarakat khususnya ibu-ibu untuk membuka warung makan, menjual souvenir, dan makanan khas Gunung Kidul kepada wisatawan.

Untuk mewujudkan semua itu maka perlu adanya suatu perencanaan yang sistematis dan terencana agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan terbentuknya pariwisata karts yang mampu mengangkat pariwisata lokal di Gunung Kidul. Dalam merencanakan objek wisata karts ini akan dikaji lebih lanjut menggunakan pendekatan teori sinoptik yang dikemukakan oleh Barclay Hudson. Teori sinoptik ini memposisikan para ahli sebagai pihak yang mendominasi dan memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan sedangkan masyarakat hanya memiliki sedikit peran di dalamnya namun masyarakat juga turut berpartisipasi dalam mewujudkan keberhasilan program. Hal tersebut terlihat dalam perencanaan revitalisasi bekas tambang karts menjadi objek wisata di Desa Bedoyo di mana dalam proses perencanaan dan

pembangunan objek wisata tersebut dilakukan oleh para ahli seperti ahli geologi dan seniman.

Para ahli tersebut saling berkolaborasi untuk mengubah dinding-dinding bekas tambang menjadi seni ukir yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Seni ukir dengan berbagai macam bentuk di dinding karts tersebut dapat dijadikan sebagai tempat swafoto dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Meskipun dalam perencanaan pariwisata karts nantinya lebih banyak melibatkan para ahli seperti teknik geologi dan seniman dalam penataan objek wisata namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk turut membantu dan saling berkolaborasi mewujudkan pariwisata lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pariwisata karts di Desa Bedoyo tersebut dibutuhkan langkah-langkah perencanaan yang dapat sebagai upaya untuk merealisasikan revitalisasi bekas tambang menjadi objek wisata di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul.

- a. Melakukan pemetaan sosial (*social mapping*) guna mengidentifikasi karakteristik masyarakat yang akan dijadikan sebagai wilayah sasaran program revitalisasi bekas tambang. Pemetaan sosial dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi masyarakat di Desa Bedoyo. Informasi yang didapatkan tersebut nantinya akan digunakan untuk dasar perencanaan dalam melaksanakan program pariwisata karts.
- b. Melakukan sosialisasi dan FGD (*Focus Group Discussion*) kepada masyarakat Desa Bedoyo dengan melibatkan tokoh masyarakat, perwakilan masyarakat, karang taruna, dinas kebudayaan dan kepariwisataan, jurusan teknik geologi, dan beberapa seniman. Tahapan sosialisasi ini perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa dengan potensi karts yang dimiliki tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang menarik dan meningkatkan perekonomian masyarakat.



- c. Membentuk kaderisasi dari masyarakat lokal agar masyarakat dapat berperan aktif seperti menyumbangkan ide atau gagasannya dalam perencanaan program pariwisata karts. Berkaca pada sistem pariwisata *CBT (Community Based Tourism)* yang sedang tren saat ini di mana nantinya pariwisata dikelola langsung oleh masyarakat setempat maka pariwisata karts di Dusun Jentir ini juga akan difokuskan pada pengelolaan pariwisata berbasis komunitas. Hal itu dilakukan agar masyarakat mampu mengembangkan sektor pariwisata karts di Gunung Kidul dengan berkelanjutan.
- d. Berhubung pariwisata karts identik dengan ukiran/pahatan yang eksotik di dinding karts maka perlu adanya kerjasama dengan jurusan teknik geologi dan beberapa seniman untuk mengerjakan proyek tersebut. Para seniman dan teknik geologi berkolaborasi untuk mengubah dinding-dinding bekas tambang menjadi seni ukir yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Seni ukir dengan berbagai macam bentuk di dinding karts tersebut dapat dijadikan sebagai tempat wisata swafoto dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Meskipun dalam perencanaan pariwisata karts nantinya lebih banyak melibatkan para ahli seperti teknik geologi dan seniman dalam penataan objek wisata namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk turut membantu dan saling berkolaborasi mewujudkan pariwisata lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Peningkatan *capacity building* melalui pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat setempat agar nantinya setelah objek wisata tersebut dibuka, masyarakat dapat melayani wisatawan dengan baik seperti adanya pelatihan *tour guide* untuk anak-anak muda di Desa Bedoyo.

Selain langkah-langkah perencanaan di atas, adapun enam langkah perencanaan yang dikemukakan oleh Hudson, maka dalam

paper ini penulis menggunakan lima langkah dari enam langkah perencanaan yang dikemukakan oleh Hudson tersebut, diantaranya 1. Pengenalan masalah, 2. Estimasi ruang lingkup modern, 3. Klasifikasi kemungkinan penyelesaian, 4. Investigasi masalah dan 5. Prediksi alternatif. Hal ini dikarenakan paper ini lebih fokus menjelaskan mengenai tahap perencanaan program dan belum sampai pada evaluasi hasil sehingga langkah perencanaan nomor 6 yang menjelaskan mengenai evaluasi kemajuan tidak dimasukkan pada paper ini. Berikut penjelasan mengenai langkah-langkah tersebut:

#### 1. Pengenalan Masalah

Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah menemukenali masalah-masalah yang terjadi di lapangan guna menyadarkan masyarakat untuk lebih peduli terhadap masalah lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Permasalahan yang ada tersebut jika ditangani dengan baik mampu diangkat menjadi potensi bagi masyarakat sekitar untuk mengembangkan pariwisata lokal. Kasus tersebut terlihat di Desa Bedoyo di mana terdapat bekas tambang karts yang terbengkalai dan ditinggalkan begitu saja oleh pihak yang telah melakukan eksploitasi ilegal. Permasalahan yang terjadi di Desa Bedoyo dapat diangkat menjadi potensi oleh masyarakat sekitar dengan merevitalisasi bekas tambang tersebut menjadi objek wisata karts yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dengan pemerintah dan lembaga terkait untuk menyadarkan masyarakat dan mengangkat masalah yang ada di Desa Bedoyo menjadi potensi bagi masyarakat untuk mengembangkan pariwisata lokal di Gunung Kidul.

#### 2. Estimasi Ruang Lingkup Modern

Tahap kedua yang perlu dilakukan yaitu memperkirakan mengenai ruang lingkup mana saja yang nantinya akan terlibat

dalam proyek revitalisasi bekas tambang tersebut. Adapun pihak-pihak yang dilibatkan dalam proyek tersebut yaitu masyarakat Desa Bedoyo, Pemerintah Daerah Gunung Kidul, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gunung Kidul, ahli geologi, seniman, LSM, dan beberapa pihak swasta yang mendukung proyek tersebut. Pemetaan ruang lingkup perlu dilakukan supaya pihak-pihak terkait saling berkolaborasi untuk mewujudkan iklim pariwisata lokal yang baik dan mampu mengangkat pariwisata di Gunung Kidul khususnya Desa Bedoyo.

### 3. Klasifikasi kemungkinan penyelesaian

Tahap ketiga yang perlu dilakukan yaitu menemukan penyelesaian atau jawaban dari permasalahan yang ada. Alternatif penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Bedoyo bersama beberapa pihak terkait untuk turut berpartisipasi dalam proyek revitalisasi bekas tambang karts tersebut. Kemudian penyelesaian dari permasalahan bekas tambang karts yang terbengkalai tersebut nantinya akan diubah menjadi objek wisata karts dengan berbagai seni ukir yang dapat dijadikan wahana swafoto bagi wisatawan. Oleh karena itu, maka dibutuhkan pihak yang ahli dibidangnya untuk mengerjakan proyek tersebut yaitu ahli geologi dan seniman untuk mengukir dinding-dinding bekas tambang tersebut. Meskipun proyek objek wisata karts tersebut nantinya lebih dominan dikerjakan oleh ahli geologi dan seniman, namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat sekitar untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan mengingat nantinya objek wisata tersebut akan dijalankan dan dikelola oleh masyarakat setempat.

### 4. Investigasi masalah

Tahap keempat adalah melakukan peninjauan lebih lanjut mengenai masalah yang ada di masyarakat sekitar bekas tambang. Daerah bekas tambang menimbulkan berbagai masalah

terutama pada masalah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Berbagai lokasi bekas tambang yang kering akan menyebabkan terbentuknya debu yang dapat membahayakan kesehatan karena debu tersebut dapat terbang hingga ke desa dan kota terdekat. Aktivitas tambang tersebut akan berpengaruh pada air tanah yang ada dibawahnya. Selain masalah lingkungan, terdapat berbagai masalah lainnya yang cukup penting yaitu masalah sosial ekonomi para bekas penambang. Masyarakat di sekitar tambang biasanya menggatungkan hidup sebagai penambang. Mereka pun mengalami dilema antara tidak menambang untuk menjaga kelestarian atau menambang demi memenuhi kebutuhan hidup. Pilihan sulit bagi mereka jika harus melepaskan kebiasaan menambang karena pendapatan mereka berasal dari kegiatan tersebut. Gunung Kidul merupakan salah satu wilayah karst dengan perbukitan yang kaya batu kapur. Tidak heran jika potensi kekayaan alam tersebut dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mengambil keuntungan. Tidak jarang pula akibat aktifitas pertambangan, korban jiwa hingga luka pun kerap dijumpai serta hal yang menonjol dan kasat mata adalah bekas pertambangan tersebut menisakan gurat-gurat dan menyebabkan bukit-bukit menjadi bolong.

#### 5. Prediksi alternatif

Tahap kelima yaitu memprediksi alternatif yang mana lebih menjelaskan mengenai upaya yang ditempuh dalam mengatasi suatu permasalahan yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas salah satu upaya untuk memperbaiki bekas tambang tersebut yaitu dengan cara revitalisasi bekas tambang menjadi kawasan wisata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan teori sinoptik dan konsep SMART goals ke dalam perencanaannya. Dalam teori sinoptik, perencanaan model ini bersifat "keahlian". Sehingga melibatkan aktor yang memiliki keahlian tertentu, dan kaitanya dengan program revitalisasi ini maka yang dibutuhkan adalah ahli geologi dan

juga para seniman yang nantinya memiliki peran penting dalam mengubah bekas tambang yang semula terbengkalai menjadi tempat wisata yang memiliki nilai estetika tersendiri. Karakter dasar dari teori perencanaan sinoptik bersifat komprehensif (menyeluruh), yakni mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, sehingga semua masalah ingin coba diselesaikan. Jika melihat permasalahan bekas tambang ini maka bukan tidak mungkin bahwa masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dapat diselesaikan, mulai dari masalah lingkungan yang mengganggu kesehatan akibat debu-debu yang beterbangan serta mencemari lingkungan, kemudian dapat mengatasi masalah ekonomi masyarakat yang mana dengan revitalisasi ini mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat bisa dan meninggalkan pekerjaan sebagai penambang. Hal ini pun dapat menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat sehingga perlahan kesejahteraan mereka akan meningkat. Dari segi sosial, hubungan antar masyarakat akan lebih erat karena mereka akan dihadapkan pada situasi yang mengharuskan mereka selalu bersama baik dalam mengelola dan menjaga kawasan wisata nantinya. Sedangkan pada aspek budaya, revitalisasi ini berperan untuk menjaga kelestarian pegunungan karst terutama di Gunung Kidul serta dengan adanya revitalisasi sebagai kawasan wisata dapat digunakan sebagai ajang pertunjukan budaya setempat sehingga mampu dikenal oleh masyarakat luas. Untuk mewujudkan semua itu maka diperlukan konsep SMART, yang mana konsep ini digunakan sebagai pendukung demi mencapai suatu target tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diterapkan pula konsep SMART goals. Konsep ini digunakan untuk memudahkan dalam pencapaian target dan sasaran serta agar semua kegiatan lebih terstruktur dan konsisten dalam pengerjaannya serta

memudahkan dalam setiap pemantauan program. Berikut penjelasan mengenai konsep SMART goals:

### 1. Specific (Spesifik / Khusus)

- Project  
Revitalisasi tebing bekas tambang yang akan dijadikan sebuah lokasi pariwisata di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta.
- Tujuan Perencanaan
  - a. Memperbaiki lingkungan yang mendapat dampak buruk dari kegiatan tambang.
  - b. Memanfaatkan tebing bekas tambang breksi untuk menjadi lokasi pariwisata daripada dibiarkan terbengkalai.
  - c. Peningkatan perekonomian masyarakat sekitar lokasi yang nantinya akan dilaksanakan revitalisasi tebing bekas tambang.
- Subjek yang terlibat
  - a. Dinas Lingkungan Gunung Kidul
  - b. Dinas Pariwisata Gunung Kidul
  - c. Arsitek untuk merancang ukiran pada tebing
  - d. Teknik Sipil
  - e. Masyarakat sekitar Desa Bedoyo
  - f. Pejabat setempat

### 2. Measureable (Dapat diukur)

Target Kerja :

- Target kerja dianggap terpenuhi ketika sudah mendapatkan perizinan dari 4 subyek yaitu dinas lingkungan, dinas pariwisata, pejabat setempat, dan masyarakat Desa Bedoyo.
- Proses pembangunan tebing ini akan dilaksanakan selama 2 tahun.
- Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat Desa Bedoyo

3. Attainable

Memerlukan partisipasi dari berbagai subyek yang terlibat, dibutuhkan juga peran masyarakat sekitar untuk ikut merawat lokasi tebing agar program ini dapat berkelanjutan dan membawa dampak baik bagi perekonomian masyarakat sekitar.

4. Realistic (Realistis)

Program revitalisasi ini dilakukan berdasarkan realita di lapangan yang mana di Desa Bedoyo banyak terdapat bekas tambang dan meninggalkan lubang-lubang di dinding pegunungan kapur. Oleh karena itu, revitalisasi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi bekas tambang yang terbengkalai menjadi tempat yang memiliki daya tarik dan dapat memiliki nilai estetik yang semakin menarik minat wisatawan berkunjung. Program ini pun bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru melalui pembangunan tempat wisata tersebut sehingga masyarakat setempat tidak menggantungkan hidup sebagai penambang kapur lagi dan dapat menjaga kelestariaannya.

5. Timebound (Batas Waktu)

- 2 bulan pertama akan dilaksanakan beberapa hal untuk mendapatkan izin dari dinas lingkungan, dinas pariwisata, pejabat setempat, dan masyarakat sekitar Desa Bedoyo. Setelah itu dilanjutkan kualifikasi arsitek dan teknik sipil
- Bulan ke 3 adalah proses survei sumber daya alam yang ada di lokasi tebing
- Bulan ke 4 dilaksanakan perancangan lokasi wisata yang cocok dengan sumber daya alam
- Bulan ke 5 proses pembangunan lokasi wisata

## PENUTUP

### Kesimpulan

Perencanaan merupakan suatu proses terkait strategi-strategi untuk mewujudkan tujuan bersama yang akan dicapai. Perencanaan perlu dilakukan dengan matang dan sistematis salah satunya yaitu pada perencanaan pariwisata karts di Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta sebagai upaya untuk merevitalisasi bekas pertambangan karts. Pendekatan yang dilakukan dalam perencanaan pariwisata karts ini adalah dengan Teori Sinoptik yang dikemukakan oleh Barclay Hudson. Teori sinoptik ini memposisikan para ahli sebagai pihak yang mendominasi dan memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan sedangkan masyarakat hanya memiliki sedikit peran di dalamnya namun masyarakat juga turut berpartisipasi dalam mewujudkan keberhasilan program. Hal tersebut terlihat dalam perencanaan revitalisasi bekas tambang karts menjadi objek wisata di Desa Bedoyo di mana dalam proses perencanaan dan pembangunan objek wisata tersebut dilakukan oleh para ahli seperti ahli geologi dan seniman yang saling berkolaborasi untuk mengubah dinding-dinding bekas tambang karts menjadi seni ukir yang memiliki nilai estetika yang tinggi. Sehingga dapat dikatakan para ahli tersebut memiliki peran yang cukup signifikan dan mendominasi kegiatan tersebut. Dalam kasus ini masyarakat lebih diarahkan untuk mengelola objek wisata yang telah terbentuk melalui pariwisata berbasis komunitas sehingga mampu meningkatkan *capacity building*, kemandirian, dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Meskipun masyarakat memiliki sedikit peran dalam proses perencanaan pariwisata karts ini karena tidak memiliki keahlian di bidang geologi namun masyarakat dapat berpartisipasi dengan cara yang lain yaitu mengelola objek wisata tersebut menjadi salah destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Gunung Kidul. Selanjutnya demi tercapainya tujuan perencanaan tersebut digunakan pula konsep SMART Goals oleh George T. Doran (1981). Kata “SMART” merupakan singkatan



dari Specific, Measurable, Attainable, Realistic dan Timely. Konsep ini dijadikan pedoman untuk menentukan sasaran atau target pada suatu program agar semua kegiatan terstruktur dan dapat berjalan lancar hingga tujuan pun dapat tercapai.

## **Saran**

Upaya revitalisasi bekas tambang kapur ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak tersebut upaya revitalisasi tidak akan berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari pemerintah, yang mana pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kegiatan pertambangan tidak selamanya mendatangkan keuntungan namun, juga akan berpengaruh pada kerusakan lingkungan. Sehingga pemerintah memperkenalkan upaya revitalisasi sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi bekas tambang menjadi wilayah yang berpotensi dan dapat menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi masyarakat sekitar sebagai lapangan pekerjaan baru. Pemerintah juga dapat memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat setempat sebagai salah satu modal mereka membuka usaha, yang mana hasil dari keterampilan tersebut dapat dijual di kawasan wisata sebagai salah satu cinderamata khas kawasan tersebut. Lebih lanjut pemerintah juga melakukan pemantauan serta evaluasi program demi keberlangsungan kawasan wisata.

Bagi swasta, kegiatan revitalisasi ini dapat dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan perusahaan terkait atau perusahaan yang sebelumnya melakukan pertambangan pada daerah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Perusahaan pun dapat berperan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta bantuan sejumlah dana demi kelangsungan wisata nantinya. Adapun upaya yang dapat dilakukan perusahaan penambang karts tersebut seperti

peminjaman alat berat dan berkerjasama dengan ahli geologi untuk mengubah dinding-dinding bekas tambang menjadi seni ukir yang nantinya dapat digunakan sebagai objek swafoto. Selain bekerjasama dengan perusahaan penambang, dapat pula menjalin kerjasama dengan perusahaan multinasional atau perusahaan yang berada di sekitar Yogyakarta untuk turut mendukung proyek pembangunan objek wisata karts di Desa Bedoyo mengingat dalam proyek ini akan membutuhkan dana yang tidak sedikit.

Sedangkan yang terakhir adalah masyarakat, yang mana masyarakat merupakan salah satu aktor penting dalam terwujudnya revitalisasi karena tanpa masyarakat upaya tersebut tidak berjalan lancar. Upaya revitalisasi ini selain sebagai bentuk perbaikan lingkungan juga merupakan upaya perbaikan kondisi perekonomian masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat diperlukan untuk terwujudnya program. Masyarakat harus mulai membuka diri dan memiliki kesadaran bahwa sebaik apapun program yang diberikan tanpa adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat maka segala pencapaian tujuan dari program tersebut akan terhambat. Dukungan dari masyarakat dapat berupa partisipasi dalam setiap kegiatan termasuk pada pengelolaan kawasan wisata nantinya. Masyarakat juga dapat mempromosikan kawasan wisata tersebut ke masyarakat luas yang mana promosi wisata ini dapat dilakukan melalui media sosial mereka. Oleh karena itu, semakin terkenal kawasan wisata tersebut maka diharapkan semakin banyak pula wisatawan yang berkunjung dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Apriando, Tomy. 2102. *Dilema Tambang Karst Gunung Kidul: Kebutuhan Perut Vs Melindungi Alam*. diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2012/09/12/dilema-tambang-karst-gunung-kidul-kebutuhan-perut-vs-melindungi-alam/> pada 25 Oktober 2019.

- Aprita,Alexander.2018. *Jelang Akhir 2018, Jumlah Kunjungan ke Wisata Tebing Breksi Dekati 1 Juta*. diakses dari <https://jogja.tribunnews.com/2018/12/13/jelang-akhir-2018-jumlah-kunjungan-ke-wisata-tebing-breksi-dekati-1-juta>. pada 17 November 2019.
- Budi.2017. *Pengertian SMART Goal dan Contoh Penggunaannya*. diakses dari <https://ilmumanajemenindustri.com/menggunakan-prinsip-smart-goal-dalam-menentukan-target-proyek/>. Pada 17 November 2019.
- Hermawan, Hary. 2017. *Pengaruh Daya Tarik Wisata, Keselamatan, dan Sarana Wisata Terhadap Kepuasan Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Wisatawan : Studi Community Based Tourism di Gunung Api Purba Nglanggeran*. Jurnal Media Wisata ,Vol 15 No 1
- Hudson, Barcal M. 1979. "Comparison of Current Planning Theories: Counterparts and Contradictions". APA Journal, Oktober 1979, hal 387-898 pada 27 Oktober 2019.
- Kandar.2015. *Menegok Potensi Kawasan Pertambangan di Gunung Kidul*. diakses dari <http://kabarhandayani.com/menengok-potensi-kawasan-pertambangan-di-gunungkidul/pada> 25 Oktober 2019.
- Mardiastuti,Aditya. 2018. *Indonesia Laporkan 16056 Pulau Bernama ke PBB*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4005694/indonesia-laporkan-16056-pulau-bernama-ke-pbb> pada 25 Oktober 2019.
- Muallisin, Isnaini. 2007. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta : Jurnal Penelitian BAPPEDA Kota Yogyakarta pada 27 Oktober 2019.
- Pany,Yusef.2016. *Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Indonesia melalui Pemanfaatan Tambang Batu Gamping*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/yusefpany/58262a85d17a619b1b8b4567/meningkatkan-pembangunan-infrastruktur-indonesia-melalui-pemanfaatan-tambang-batu-gamping?page=all> pada 25 Oktober 2019.

- Ramadhanny, Fitriya. 2019. *Tebing Breksi Contoh Nyata Bekas Tambang Yang Jadi Tempat Wisata*. diakses dari <https://m.detik.com/travel/domestic-destination/d-4433491/tebing-breksi-contoh-nyata-bekas-tambang-yang-jadi-tempat-wisata> pada 27 Oktober 2019
- Sawabi, Ignatius. 2010. *Karst Gunung Kidul tak Boleh Ditambang*. diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2010/11/19/0938553/karst.gunung.kidul.tak.boleh.ditambang>. Pada 25 Oktober 2019.
- Tambangbatu, 2018. *Tambang Batu Limestone / Kapur / Gamping*. diakses dari <https://tambangbatu.com/tambang-batu-limestone-kapur-gamping/> pada 25 Oktober 2019.
- Zuchrufa, Maritsa. 2017. *Karst Kerusakan Lingkungan dan Kelangsungan Hidup*. diakses dari <http://pmb.lipi.go.id/karst-kerusakan-lingkungan-dan-kelangsungan-hidup/> pada 25 Oktober 2019.



# PERENCANAAN WILAYAH DENGAN SKEMA *FOREST CITY* UNTUK IBU KOTA BARU INDONESIA

Disusun oleh:

Cahaya Mutia P.	17/413188/SP/27905
Nabilah Dzakiroh	17/413199/SP/27916
Nadya Rahmi S.	17/413200/SP/27917
Erina Virdaus	17/414907/SP/28034

## LATAR BELAKANG

Aktivitas dalam kehidupan sehari-hari banyak yang berkaitan dengan rencana dan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, hal ini juga sangat bergantung pada perencanaan yang baik pula. Perencanaan yang baik akan mempermudah dalam mencapai tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan. Dalam pembangunan wilayah atau kota, tidak lepas dari perencanaan mengenai pembangunan wilayah atau kota, sehingga dalam pembangunannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan dari pembangunan secara maksimal dan kemungkinan keberhasilan pembangunan juga tinggi. Salah satu program pengembangan kota yang akan dilaksanakan di Indonesia sendiri adalah pemindahan Ibu Kota Indonesia yang sebelumnya berada di DKI Jakarta akan dipindah ke lokasi baru yang berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Alasan mengapa Ibu Kota Indonesia dipindah dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur adalah karena adanya berbagai permasalahan

yang terdapat di DKI Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas yang sudah parah, kepadatan penduduk yang tinggi, hingga masalah polusi udara dan air. Berbagai permasalahan tersebut muncul karena besarnya beban perekonomian yang diberikan kepada Jawa dan Jakarta, sehingga terjadi kesejanaan ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa meskipun telah diberlakukan otonomi daerah.

Ibu Kota adalah wilayah yang sangat penting dari suatu Negara, sehingga pemindahan Ibu Kota Indonesia harus direncanakan dengan baik dan matang. Adapun alasan mengapa Kalimantan Timur dipilih untuk menjadi Ibu Kota adalah karena risiko bencana yang lebih rendah, baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan longsor. Alasan selanjutnya adalah letak geografis yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia, dan alasan ketiga adalah kedua wilayah Kalimantan Timur tersebut dekat dengan wilayah kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Alasan pemindahan kota ini tentunya telah dikaji berdasar letak geografis dari kedua wilayah Kalimantan Timur tersebut. Ada berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam pemindahan Ibu Kota Negara, seperti letak geografis hingga konsep pembangunan kota, semuanya tidak lepas dari perencanaan yang harus dibuat terlebih dahulu. Kemudian, perencanaan pemindahan Ibu Kota nantinya akan memakai skema *Forest City*.

*Forest City* sendiri merupakan konsep dari pembangunan kota yang memperhatikan keberadaan hutan. Dengan berbagai sumber daya alam yang dimiliki oleh Kalimantan Timur, maka konsep *Forest City* dipilih agar pembangunan Ibu Kota yang baru dapat memaksimalkan sumber daya yang ada dan tetap menjaga ekosistem hutan Kalimantan. Dalam konsep *Forest City* ini sendiri, pemerintah akan mengkolaborasikan kota yang *modern, smart* (pintar), *beautiful* (cantik), dan *sustainable* (berkesinambungan) dengan kekayaan hutan tropis yang dimiliki oleh Kalimantan Timur.

Rencana *Forest City* Ibu Kota Indonesia yang baru ini nantinya akan dibuat ruang terbuka hijau yang mencakup minimal 50% luas

ibu kota. Selain itu, dalam upaya menjaga ekosistem yang ada, maka dalam rencana pembangunan kota juga akan menggunakan sumber energi terbarukan yang juga rendah karbon seperti solar, gas, dan sebagainya agar ekosistem yang ada di daerah Ibu Kota yang baru dapat terjaga dan rancangan pembangunan kota dengan *Forest City* dapat tercapai dengan baik. Konsep *Forest City* dipandang sesuai dengan karakteristik geografis dari Kalimantan Timur, namun tetap harus ditinjau apakah konsep pembangunan kota tersebut sudah sesuai dengan perencanaan yang baik, sehingga pembangunan kota dapat terlaksana dengan maksimal dan dapat mencapai pembangunan yang sukses dan sesuai tujuan.

## PENDEKATAN TEORI

### TEORI PERENCANAAN YANG BAIK

Perencanaan maupun kegiatan yang menuntut adanya suatu susunan strategis tidak terlepas dari kehidupan manusia. Kegiatan perencanaan memiliki ruang lingkup yang luas, mulai dari waktu, tindakan, teknis, dll. Untuk itu proses perencanaan memiliki peran strategis bagi kepentingan manusia secara luas sebagai sebuah tindakan yang rasional dan ilmiah.

Manusia dikenal sebagai “mahluk yang berpikir”. Ryle (1951) menyatakan bahwa cara berpikir manusia dibentuk oleh tiga komponen utama yang saling terkait yaitu: penalaran (*thought*), perasaan (*feeling*), dan kehendak (*will*). Oleh sebab itu, proses berpikir sesungguhnya adalah proses yang sangat kompleks dan tak pernah henti (Setiadi, 2014). Penalaran ini menuntun untuk selalu berpikir secara kritis, menggunakan logika untuk mencocokkan kenyataan dan harapan. Melalui kegiatan berpikir kritis ini, proses perencanaan terbentuk.

Mengenai teori perencanaan, terdapat dua istilah yang selalu melekat, yaitu *theory of planning* dan *theory in planning*. Keduanya dapat dimaknai sebagai pengertian dari teori perencanaan. Jika mengacu pada istilah yang pertama yaitu “*theory of planning*”,



teori perencanaan dapat dimaknai sebagai ide atau gagasan yang menjelaskan tentang upaya untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Upaya tersebut digambarkan sebagai sebuah prosedur yang terangkai secara logis sehingga dapat menjelaskan tahapan yang harus dilalui untuk tercapainya suatu tujuan (Setiadi, 2014).

Menurut istilah *theory in planning*, perencanaan adalah sebuah kerangka pikir yang dijadikan sebagai landasan guna melakukan intervensi terhadap permasalahan tertentu. Dengan kata lain, *theory in planning* merujuk pada upaya untuk menemukan argumen-argumen substansial yang dipandang mampu atau layak dijadikan landasan perencanaan. Berdasarkan pada uraian ini dapat ditegaskan bahwa *theory of planning* menekankan pada prosedur perencanaan; sedangkan *theory in planning* menekankan pada konsep substansial perencanaan (Setiadi, 2014).

Pengertian lain mengenai perencanaan disampaikan oleh John Friedmann. Dalam bukunya yang berjudul *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action* (1987) menyatakan bahwa pengertian perencanaan selalu mengandung empat unsur utama, yaitu:

- 1) Perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi;
- 2) Perencanaan selalu berorientasi ke masa depan
- 3) Perencanaan memberikan perhatian pada keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan
- 4) Perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif.

Berdasarkan ke empat unsur yang disampaikan oleh Friedmann, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan untuk kepentingan masa depan (Setiadi, 2014).

Perencanaan disusun dalam model yang ideal sebagai sebuah gambaran langkah-langkah taktis. Perencanaan tentu diisi dengan hal-hal yang praktis yang memudahkan proses untuk mencapai tujuan. Untuk itu perencanaan harus dibuat seefektif mungkin, walaupun tidak ada pakem yang pasti mengenai bagaimana bentuk dari perencanaan yang baik, namun berikut menurut Siagian mengenai perencanaan yang baik :

- 1) Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah di tentukan sebelumnya
  - 2) Perencana harus sungguh- sungguh memahami hakikat tujuan yang ingin dicapai
  - 3) Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang cermat
  - 4) Keterkaitan sebuah rencana dengan pelaksanaannya
  - 5) Kesederhanaan
- (Setiadi, 2014)

Tidak menutup kemungkinan, dalam proses merencanakan dan proses pelaksanaan terdapat berbagai kendala. Walaupun telah terdapat sebuah rencana, beberapa faktor lain dapat mengganggu jalannya proses, sehingga terjadi hambatan atau bahkan kegagalan. Menurut Handoko, beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya hambatan dan juga kegagalan dalam perencanaan efektif adalah :

- 1) Kurang pengetahuan tentang organisasi  
Kurangnya pengetahuan tentang organisasi tidak hanya ditumpukan kepada manajer sebagai pelaksana rencana, namun juga kepada bagian-bagian yang mendukung perencanaan dapat berjalan. Pembagian kerja, kerja sama dan koordinasi merupakan aspek penting dalam organisasi agar dapat membentuk perencanaan yang baik.
- 2) Kurang pengetahuan tentang lingkungan  
Proses perencanaan tidak hanya mengalokasi kekuatan dari dalam sebuah organisasi, namun juga harus mengetahui kondisi lingkungan yang menjadi tempat dilakukannya perencanaan.

Lingkungan bukan hanya lingkungan alam, namun juga mengenai iklim kompetisi antar kompetitor sehingga persiapan dapat secara menyeluruh.

- 3) Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif  
Tujuan perencanaan adalah mempersiapkan masa depan, untuk itu perlu adanya pengandaian dan juga peramalan bagi kondisi yang akan mendatang.
  - 4) Kesulitan perencanaan operasi-operasi yang tidak berulang  
Dalam organisasi banyak operasi-operasi yang hanya berlangsung dalam saat tertentu saja yang tidak akan berulang pada saat-saat yang lain, namun perlu direncanakan. Para manajer sering melupakan hal ini.
  - 5) Biaya  
Proses perencanaan juga harus mempertimbangkan penggunaan biaya, mulai dari biaya yang harusnya ditetapkan dan juga biaya cadangan yang mungkin akan digunakan.
  - 6) Takut gagal  
Perasaan takut gagal sedikit banyak mempengaruhi mentalitas pelaksana rencana, untuk itu dibutuhkan jiwa optimis namun juga realistis.
  - 7) Kurang percaya diri  
Kurang percaya diri menghasilkan perencanaan yang ragu-ragu, untuk itu butuh kepercayaan diri yang tinggi dan juga persiapan sehingga tercipta perencanaan yang matang.
  - 8) Ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif  
Perlu adanya tujuan alternatif dari sebuah perencanaan, meskipun perencanaan tidak mencapai tujuan yang utama, namun tetap menghasilkan sesuatu.
- Handoko dalam Rusniati & Haq (2014).

Terkait dengan tema paper mengenai *Forest City* yang akan digunakan sebagai model dari pembangunan Ibukota baru di Kalimantan, maka aspek perencanaan yang dilihat bukan hanya

sisi pembangunan infrastruktur, namun juga pembangunan sosial ekonominya. Menurut Sandy (1992), pembangunan wilayah juga menimbang berbagai aspek sosial ekonominya. Beberapa dalil yang berkaitan dengan pembangunan sebagai berikut.

- 1) Setiap konsepsi pembangunan adalah pemikiran yang harus dapat diwujudkan, bukan sekedar latihan akademis.
- 2) Perwujudan konsepsi pembangunan haruslah benar-benar dapat menjamin peningkatan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya.
- 3) Membangun adalah untuk keperluan masyarakat yang hidup saat ini, namun harus mempertimbangkan daya guna selama mungkin bagi mereka yang hidup di masa datang.
- 4) Konsepsi pembangunan yang tidak bisa diwujudkan dan lebih banyak menimbulkan kesusahan, keresahan, dan kerugian bagi masyarakat banyak adalah konsepsi yang salah (Setiadi, 2014).

## 2. TEORI PERENCANAAN YANG SESUAI DENGAN ISU

Teori perencanaan sudah seharusnya bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kemudian kebutuhan ini dirumuskan melalui diskusi atau istilahnya *public hearing*. Dengan melakukan diskusi yang berbentuk Focus Group Discussion (FGD), masalah-masalah yang diderita oleh masyarakat dituangkan dan dikeluarkan dalam forum, sehingga terbentuk opini antara kebutuhan dan keinginan. Kedua aspirasi ini kemudian disaring kembali kedalam skala prioritas yang disebut sebagai permasalahan mendesak atau kebutuhan. Dengan menemukan permasalahan yang diderita masyarakat, selanjutnya dapat didekati dengan pendekatan secara keilmuan (*scientific approach*), dengan berpikir secara rasional. Cara ini juga mempertimbangkan cara evaluatif serta sistematis terhadap alternatif langkah atau cara (*means*) untuk mencapai tujuan (*goal*). Untuk mencapai tujuan ini tentunya perlu untuk menganalisa potensi/kekuatan/*resources*, maka analisis tentang perencanaan ini tidak bisa hanya asal merencanakan, namun butuh pertimbangan

yang matang supaya tidak menyimpang dari kebutuhan dan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Menurut Setiadi (2008) selain harus memperhitungkan potensi dari dalam dirinya, manusia juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungannya. Pertimbangan dan perhitungan ini bermanfaat untuk memprediksi hasil serta resiko yang dihadapi nantinya. Apabila keduanya berada pada kondisi yang baik dan stabil, maka perencanaan akan mendekati ketepatan dengan tujuan dan kebutuhan. Perencanaan ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan individu maupun peran individu dalam kelompok. Peran perencanaan untuk individu adalah peningkatan kapasitas dan kualitas hidup, sedangkan perencanaan yang dilakukan individu dalam kelompok adalah perwujudan tujuan bersama atau disebut pembangunan. Manusia baik secara individu maupun kelompok tidak dapat terlepas dari perencanaan karena perencanaan merupakan hasrat dasar manusia dan dimanapun manusia hidup perencanaan akan selalu ada baik sekecil apapun.

Kegiatan perencanaan pada hakekatnya juga merupakan upaya untuk menentukan pilihan dari sekian banyak alternatif yang tersedia karena terkait dengan pengambilan keputusan. Dengan perkataan lain, menurut Conyer dan Hill (1984) perencanaan adalah upaya untuk menyusun prioritas sesuai dengan sumberdaya yang tersedia dan tujuan jangka panjang yang ditetapkan. Friedmann (1987) mengingatkan pentingnya keterpaduan antara sains dan pengetahuan praktis dalam kegiatan perencanaan. Hal ini senada dengan pendapat Kelly dan Becker (2000) yang menyatakan perencanaan sebagai suatu upaya yang dilakukan secara rasional untuk menghadapi masa depan. Namun demikian, Setiadi (2008) menyampaikan bahwa kredibilitas perencanaan tidak dapat dijamin sepenuhnya oleh penerapan sains dan pengetahuan praktis. Menurut Setiadi, selain sains dan pengetahuan praktis, perencanaan juga perlu didukung oleh intuisi. Jika sains dan pengetahuan praktis mewakili daya rasionalitas dan intelektualitas, maka intuisi mewakili hadirnya

kearifan. Dengan demikian, perencanaan sesungguhnya bukanlah aktivitas yang semata-mata mengandalkan “kerja otak”; tetapi lebih jauh dari itu juga harus mengandalkan “kerja hati”. Kombinasi optimal antara “kerja otak” dan “kerja hati” ini memungkinkan aktivitas perencanaan berlangsung dalam suatu situasi di mana nilai-nilai ilmiah menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan yang lebih holistik.

Untuk lebih mengarahkan perencanaan sesuai dengan kebutuhan maka perlu untuk mengembangkan kekuatan (*strengths*) dan mengoptimalkan peluang (*opportunities*), dan mengembangkan kekuatan (*strengths*) untuk mengatasi ancaman (*threats*), serta untuk meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) biasanya analisis ini disebut analisis SWOT yang berupa :

- 1) Kekuatan (*strengths*) potensi-potensi dari dalam individu yang akan menggerakkan proses perubahan
- 2) Peluang (*opportunities*) faktor eksternal yang turut mendukung perubahan
- 3) Ancaman (*threats*) faktor yang berasal dari luar, bisa disadari atau tidak. Ancaman dikhawatirkan akan menghambat proses perubahan
- 4) Kelemahan (*weaknesses*) faktor dari dalam individu yang apabila tidak dirubah akan menghambat proses perubahan

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan yang sejalan dengan kebutuhan awalnya berasal dari pemikiran ilmiah atau merupakan hasil berpikir tentang suatu permasalahan yang dikaji secara ilmiah, namun kemudian hasil-hasil perencanaan dikembangkan juga dengan adanya gabungan antara hal-hal ilmiah dengan ilmu-ilmu kemanusiaan atau humanisme yang lebih holistik serta mempertimbangkan norma-norma atau nilai yang berlaku di masyarakat.

Menurut Setiadi (2008) teori perencanaan dapat dikatakan sebagai *theory of planning* maupun *theory in planning*. Teori

perencanaan dikatakan sebagai *theory of planning* apabila terdapat serangkaian cara atau langkah yang disusun untuk dilakukan. Maka langkah-langkah perencanaan ini mengikuti petunjuk ataupun prosedur untuk mencapai tujuan. Teori perencanaan dapat dimaknai sebagai ide atau gagasan yang menjelaskan tentang upaya untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Upaya tersebut digambarkan sebagai sebuah prosedur yang terangkai secara logis sehingga dapat menjelaskan tahapan yang harus dilalui untuk tercapainya suatu tujuan. Inti dasarnya adalah idea tau gagasan yang disusun sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tidak hanya cara untuk mencapai tujuan, cara-cara ini harus bisa dijelaskan secara logis bukan berbentuk asumsi bohong, mengapa harus logis supaya tidak meleset dari tujuan yang telah disepakati. Maka teori perencanaan ini sangat menekankan pada prosedur atau cara untuk mencapai tujuan.

Sedangkan teori perencanaan dikatakan sebagai *theory in planning* apabila teori perencanaan tersebut menggunakan alasan-alasan konseptual atau substansi untuk dijadikan landasan penyelesaian masalah. Menurut istilah kedua ini, perencanaan adalah sebuah kerangka pikir yang dijadikan sebagai landasan guna melakukan intervensi terhadap permasalahan tertentu. Dengan kata lain, *theory in planning* merujuk pada upaya untuk menemukan argumen-argumen substansial yang dipandang mampu atau layak dijadikan landasan perencanaan. Letak batu fondasinya adalah konsep perencanaan atau istilahnya adalah esensi yang tertuang dalam maksud dari terentunya rencana tersebut.

Kemudian, apakah fenomena perencanaan *Forest City* untuk Ibu Kota baru menggunakan teori perencanaan *theory in planning* atau *theory of planning*, penulis rasa perencanaan tersebut menggunakan teori perencanaan *theory in planning*. Alasannya adalah teori ini memiliki sifat membangun dengan asumsi tentang pentingnya pemindahan ibukota baru dan konsep baru yang digunakan untuk menyelesaikan masalah adalah konsep *Forest City*. Konsep ini

dianggap lebih arif dibanding konsep modernisasi lingkungan. Mengapa lebih arif? Seperti yang kita tahu bahwa lokasi yang dipilih untuk pembangunan Ibu Kota baru merupakan kawasan hutan dengan kondisi geografis yang seperti itu lebih arif untuk mengurangi dampak negatif pembangunan dengan tetap memberikan porsi bagi adanya hutan. Hutan yang digunakan untuk pembangunan kawasan ini diperkirakan jumlahnya sekitar 180 ribu hektare (Ha) ada di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur. Menurut laporan Liputan 6, lahan yang disiapkan untuk membangun kawasan inti adalah 3.000 hektare namun juga tidak menutup kemungkinan akan ditambah. Dengan porsi yang sangat luas tersebut, diperlukan pertahanan eksistensi dan kelangsungan vegetasi yang ada disana. Oleh karena itu, *Forest City* merupakan salah satu alternatif konsep yang diutarakan. Dalam *theory in planning* intervensi konsep ini diajukan untuk menguraikan permasalahan berkaitan dengan pemindahan Ibu Kota baru karena alasan substantif pemindahan Ibu Kota yang lama telah begitu mendesak.

### C. PERENCANAAN APLIKATIF

Kota tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang statis, melainkan dipandang sebagai sesuatu yang dinamis. Dinamika sosial, politik, budaya dan ekonomi selalu

mengalami perubahan sepanjang masa peradaban manusia itu ada. Dinamika yang terjadi di masyarakat memiliki kekuatan untuk memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang ada di kota tersebut. Untuk dapat mengimbangi dinamika perubahan itu, diperlukan perencanaan kota yang baik. Perencanaan yang baik juga tidak lupa berkaitan dengan unsur ruang, kepentingan publik, dan keputusan pemilihan alternatif yang dinilai terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Oleh sebab itu, keputusan perencanaan kota yang bersinggungan dengan banyak kepentingan akan menentukan arah perkembangan dan pertumbuhan kota (Ginting, 2009).



Perencanaan kota tidak hanya sebatas pada penyusunan rencana, tetapi juga tahap implementasi/pelaksanaan rencana serta monitoring dan evaluasi rencana. Realita yang ditemukan pada perencanaan-perencanaan yang lalu, sayangnya seringkali mengalami *missed* pada tahap implementasi, disamping prosedur-prosedur serta substansi perencanaan sudah di susun sedemikian rupa. Untuk itu diperlukan sinergi dan koordinasi di setiap lini proses perencanaan serta perencanaan perlu dilakukan secara komprehensif, inovatif, antisipatif, dan responsif sehingga dapat mewujudkan kota yang berkelanjutan. Selanjutnya, penulis akan mengambil studi kasus mengenai pemindahan ibu kota ditinjau dari aspek lingkungan yang saat ini sedang terjadi sebagai bentuk perencanaan aplikatif.

Pasca kemerdekaan, Ibu kota Jakarta terus melakukan pembangunan yang intensif guna menunjang aktivitas roda penggerak negara. Pembangunan masif yang terus terjadi di Jakarta lambat laun menimbulkan kesenjangan bagi kota-kota lain. Kesenjangan yang terjadi di ibu kota melahirkan penumpukan masyarakat, baik dari kalangan elit hingga masyarakat kecil berbondong-bondong menuju ibu kota dengan dalih meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, masalah yang timbul akibat pembangunan ini tak lain adalah penyempitan lahan hijau yang semakin luas dikarenakan penggunaan lahan tanpa melihat peruntukan lahan tersebut. Maka tidak heran apabila masalah ini mendapat teguran dan kecaman dari aktivis lingkungan sebagai bentuk kekhawatiran mereka akan hilangnya vegetasi dan ekosistem yang ada.

Kesenjangan yang ada di ibu kota juga dapat dilihat melalui belum meratanya pemerataan pembangunan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2018 yang dilansir dari media online Tempo menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Pulau Jawa menyumbang 58,48 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Adapun wilayah timur Indonesia yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua mencapai 64 persen dari total luas Indonesia, hanya menyumbang 16,8 persen PDB.

Sebagaimana ibu kota metropolitan lain, Jakarta tentu tidak terhindar dari permasalahan baik itu di bidang lingkungan, sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Bahkan, saat ini daya dukung Jakarta sebagai ibu kota negara dinilai tidak mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang kondusif. Jakarta terus mengalami tekanan penduduk akibat urbanisasi, rawan gempa, banjir, terancam mengalami kelangkaan air bersih dan kondisi kemacetan di Jakarta yang berdampak pada kerugian ekonomi sebesar Rp 56 triliun per tahun. Menyikapi hal tersebut, kabinet kerja presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk memindahkan ibu kota ke Provinsi Kalimantan.

Keputusan pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan berarti pemerintah sudah siap untuk deforestasi, yaitu melakukan penanaman pohon kembali, hingga merestorasi ekosistem hutan bakau dan gambut. Tidak hanya itu, Kalimantan Timur juga memiliki wilayah pertambangan dan apabila melihat ke lapangan, Kalimantan Timur saat ini sedang mengalami gelombang pengrusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan ini salah satunya diakibatkan oleh operasi pertambangan yang masif di Kalimantan Timur. Data yang dilansir dari media berita online kumparan.com menyebutkan bahwa Kalimantan Timur adalah provinsi yang paling banyak memiliki izin tambang. Lebih dari 1.404 izin usaha pertambangan mineral dan batu bara. Dan izin tambang 48 wilayah operasi minyak bumi dan gas alam.

Berangkat dari kekhawatiran tersebut, pemindahan ibu kota ini akan memakai konsep *Forest City* sebagaimana disampaikan oleh Yudy R Prawiradinata, Deputi Bidang Pengembangan Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dilansir dari media berita online kumparan.com. Dari luas 180 ribu hektar kawasan, pembangunan ibu kota baru tahap pertama akan memakan luas sekitar 40 ribu hektar. Dari 40 ribu hektar ini, 2 ribu hektar terdiri dari lokasi istana negara, kantor lembaga negara, taman negara dan botanical garden. Konsep *Forest City* yang akan diterapkan pada ibu

kota baru diharapkan akan selalu mempertimbangkan pelestarian alam dan lingkungan serta membuat hunian masyarakat yang layak dan nyaman.

Konsep *Forest City* dalam paradigma teori perencanaan termasuk dalam paradigma utopianism. Utopianism adalah suatu paham yang bertujuan mengembangkan nilai-nilai esensial kemanusiaan dan lingkungan yang telah terabaikan oleh sistem industri dan birokrasi, untuk dibawa ke suatu masa depan yang ideal (lingkungan sosial dan fisik). Fungsi perencanaan jenis ini adalah untuk mempertahankan atau mengembalikan kesinambungan searah dan lembaga-lembaga kota yang telah dihancurkan untuk kepentingan ekonomi profit.

Inti ajaran utopia menganut nilai-nilai idealisme dalam *planning*, berlangsung pada abad XIX dan sebelumnya, diklasifikasikan atas:

- 1) Humanis: *Social Utopia*
- 2) Naturalis: *Physical Utopia*

Lebih lanjut, pendekatan humanis menggambarkan manusia akan lebih baik, lebih bahagia, lebih produktif dan lebih religius apabila tatanan-tatanan dan lembaga-lembaga masyarakat di ubah, sedangkan pendekatan naturalis (yang digagas Thomas Moore terkait dengan lingkungan) menggambarkan manusia akan lebih sehat, lebih tertata, lebih puas dan lebih peka terhadap keindahan, apabila lingkungan fisik ditata secara serasi.

Konsep *Forest City* yang direncanakan kedepannya akan mengusung konsep kota yang *modern, beautiful, sustainable* dan *smart*. Apabila diuraikan lebih lanjut, konsep-konsep kota tersebut memiliki tujuan dan strategi-strategi.

Pemerintah Indonesia selanjutnya akan segera merealisasikan rencana pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan pada tahun 2019. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kewajiban negara dalam memberikan hak-hak warga negaranya supaya memiliki atmosfer pemerintahan yang layak dan sehat, hunian yang nyaman, lingkungan yang sehat serta udara yang bersih sebagaimana tertuang dalam inti paradigm utopianism. Kedepannya pula, ibu kota baru dengan konsep *Forest City* diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitar serta dapat menciptakan masyarakat yang lebih tertata dan sejahtera lahir batin.

#### D. PENUTUP

Pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke daerah Kalimantan Timur telah dikaji oleh pemerintah selama bertahun-tahun. Dengan didasarkan pada letak wilayah geografis dari Kalimantan Timur, pemerintah dalam pembangunan ibu kota yang baru di Kalimantan Timur ini nantinya akan menggunakan konsep perencanaan *Forest City*, di mana dalam pembangunan kota memperhatikan keberadaan hutan kota. Pemindahan ibu kota dengan konsep ini dirasa cocok dengan karakteristik letak geografis Kalimantan Timur dan menguntungkan baik dari segi pelestarian ekosistem alam hingga menguntungkan bidang ekonomi juga. Dengan dikaji menggunakan teori-teori perencanaan yang baik dan disesuaikan dengan analisis dari konsep perencanaan ini, maka bisa diketahui bahwa konsep *Forest City* ini cocok dilaksanakan untuk pembangunan kota di Kalimantan Timur karena telah disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

Cahyani, D. R. (2018, Februari 5). *BPS: Pulau Jawa Sumbang Kontribusi PDB Terbesar*. Dipetik Oktober 27, 2019, dari Tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1057589/bps-pulau-jawa-sumbang-kontribusi-pdb-terbesar/full&view=ok>

- onyers, D. d. ((1984)). An introduction to development planning in the third world. *Diana Conyers and Peter Hill*. Wiley, Chichester, 271 pp.
- Egeham, L. (2019, Agustus 26). *Jokowi Ungkap Alasan Mendesak Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim*. Dipetik Oktober 27, 2019, dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/4047115/jokowi-ungkap-alasan-mendesak-pemindahan-ibu-kota-ke-kaltim>
- Friedmann, J. ((1987)). *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*. Princeton University Press.
- Ginting, N. P. (2009, Agustus 2). Trust dan Leadership dalam Praktik Perencanaan Kota di Era Demokrasi dan Otonomi Daerah. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 127.
- Handoko, H. T. (2009). *Manajemen, Edisi II*. Yogyakarta: BPFE.
- Kelly, E. D. ((2000)). *Community Planning: An Introduction to the Comprehensive Plan*. Island Press.
- kumbaran, T. r. (23, Agustus 2019). *Pemerintah Harus Perhatikan Dampak Lingkungan Jika Ibu Kota ke Kaltim*. Dipetik November 17, 2019, dari Kumbaran: <https://kumbaran.com/kumbarannews/pemerintah-harus-perhatikan-dampak-lingkungan-jika-ibu-kota-ke-kaltim-1riYYN5aX6y>
- Lidyana, V. (2019, Agustus 21). *Ibu Kota Baru Bakal Berkonsep Forest City, Apa Itu?* Dipetik Oktober 27, 2019, dari finance.detik.com: <https://finance.detik.com/properti/d-4674694/ibu-kota-baru-bakal-berkonsep-forest-city-apa-itu>
- P, D. A. (2019). *Tahap Awal, Ibu Kota Baru Dibangun di Atas Lahan 3.000 Ha*. Liputan6.com.
- Prayitno, G. (2019, Agustus 27). *Melihat Konsep Forest City untuk Ibu Kota Baru Indonesia*. Dipetik Oktober 27, 2019, dari Kumbaran.com: <https://www.kompasiana.com/gigih98582/5d63da33097f3606b12c9222/melihat-konsep-forest-city-untuk-ibu-kota-baru>

- indonesia?page=all
- Rusniati, & Haq, A. (November 2014). PERENCANAAN STRATEGIS DALAM PERSPEKTIF ORGANISASI. *Jurnal INTEKNA* , Tahun XIV, No. 2 Hal 102-209.
- Setiadi, H. (2008). *Ruang dan Penataan Ruang di Indonesia: Dari Filosofi Hingga Praktek*. Kertas Kerja Ilmiah dipersiapkan untuk Direktorat Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Ditjen Bangda dan otda Depdagri dalam rangka kerjasama dengan GTZ. .
- Setiadi, H. (2008). *Master Plan Sdm Bidang Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Setiadi, H. (2014). *Teori Perencanaan*. In: *Dasar-dasar Teori Perencanaan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Setiadi, H. (2014). *Teori Perencanaan*. In: *Dasar-dasar Teori Perencanaan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wibisono, S. G. (2019, Agustus 22). *Forest city jadi konsep ibu kota baru Indonesia di Kaltim*. Dipetik Oktober 27, 2019, dari beritagar.id: <https://beritagar.id/artikel/berita/forest-city-jadi-konsep-ibu-kota-baru-indonesia-di-kaltim>



# RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA REPUBLIK INDONESIA

Disusun Oleh:

Damiana Vania Puspita

17/413189/SP/27906

Safira Ramadhani

17/413208/SP/27925

Giranda Septa Aji P

17/414908/SP/28035

Laila Nur Assyifa

17/414913/SP/28040

## A. Latar Belakang

Ibu kota negara atau *capital city* atau *political capital* dalam bahasa Inggris, asal katanya dari bahasa Latin *caput* yang berarti kepala (*head*) dan terkait dengan kata *capitol* yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan. Kota utama ini intinya diasosiasikan dengan pusat pentadbiran atau tata kelola suatu negara. Secara fisik difungsikan sebagai kantor pusat dan tempat pertemuan dari pimpinan pemerintahan di eksekutif, yudikatif, legislatif atau parlemen. Begitu pula lokasi bagi kantor perwakilan negara lain akan ditempatkan di ibu kota negara. Ibu kota adalah pusat ekonomi, budaya, dan atau pusat intelektual. Ibu kota menjadi simbol bagi negara dan pemerintahannya, serta sebagai tempat berkembangnya muatan politik.

Sebelum menentukan alternatif untuk menentukan lokasi pemindahan ibu kota negara, terlebih dahulu perlu dicari rumusan ibu kota negara yang ideal. Penelusuran pustaka tentang syarat ibu kota negara yang ideal cenderung belum optimal.



Berdasarkan pemikiran geografis, ibu kota negara yang ideal harus mempertimbangkan aspek spasial, ekologis, dan kewilayahan. Oleh karena itu diperlukan antara lain: tersedia lahan yang sesuai, aman, nyaman, lingkungan sehat, bebas dari bahaya dan bencana, aksesibilitas dan arus informasi memadai, ketersediaan lahan untuk perwakilan negara sahabat (kedutaan), ketersediaan air bersih, fasilitas umum, fasilitas kesehatan, masyarakat sekitar kondusif dan tidak menimbulkan ketimpangan antar wilayah. Berdasarkan rumusan tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi geografis Indonesia dapat ditentukan alternatif lokasi sebagai calon ibu kota negara.

Namun seringkali sebuah gagasan pembangunan yang rasional dan objektif terhalang oleh adanya benturan kepentingan, baik itu kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik. Wacana pemindahan ibu kota belakangan ramai diperbincangkan di televisi dan koran. Hal itu sudah melibatkan opini di kalangan DPR RI, DPD, dan analis politik perkotaan, namun rupanya sengaja untuk pewacanaan saja. Studi lebih lanjut maupun upaya serius meneruskan wacana pemindahan ibu kota tak pernah digagas, apalagi benar-benar dijalankan.

Secara historis, negara Indonesia pernah memindahkan ibu kotanya selama dua kali, yakni di Bukittinggi dan Yogyakarta. Jejak historis ini memberi makna bahwa dalam konteks tertentu, pemindahan ibu kota bukanlah hal yang terlalu mustahil. Hanya saja, permasalahannya memang ada banyak pihak yang merasa diuntungkan oleh keberadaan ibu kota di Jakarta. Banyak pihak itu, sayangnya berada di posisi menentukan. Namun begitu banyak pula yang berjuang melakukan pemisahan (separatisme) karena tidak diperlakukan secara adil oleh Jakarta selama ini.

Ibu kota negara menjadi simbol suatu negara sebagai lokasi pusat pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, fungsinya pun tidak lagi tunggal, Jakarta telah pula menjadi pusat perburuan lapangan kerja kelas menengah bawah dari desa yang tidak mau bertani lagi,

pemukiman dengan harga jual dan sewa yang mahal, berkumpulnya sentra pendidikan, tujuan pariwisata dan perdagangan internasional. Kepadatan penduduk yang tinggi, kemacetan lalu lintas yang parah, polusi, kejahatan jalanan, banjir adalah kondisi umum yang mencitrakan Jakarta sebagai ibu kota negara dengan indikasi sulitnya melakukan penataan tata ruangnya. Gejala tingginya ketimpangan sosial ekonomi, berkorelasi terhadap meningkatnya angka kriminalitas di Jakarta dan fakta ini memerlukan jalan keluar yang sistemik.

Usulan memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke tempat lain, merupakan salah satu solusi alternatif yang dapat dimasukkan dalam Rancangan UU Penataan Ruang (RUU PR) di Indonesia. Selama ini Ibu kota Jakarta mengemban banyak fungsi, selain sebagai pusat pemerintahan juga sebagai pusat bisnis. Dengan pemindahan ibu kota negara diharapkan fungsi administrasi pemerintahan akan lebih efektif. Selain itu pemindahan ini juga diikuti penyebaran penduduk sehingga tidak terkonsentrasi di Jakarta lagi.

Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, merupakan kota yang padat dan disertai permasalahan yang kompleks. Mulai dari permasalahan kependudukan di Jakarta yang begitu padat yang mencapai 15.663 jiwa per km persegi. Di mana luas wilayah DKI Jakarta 662,3 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 10,37 juta jiwa (BPS, 2018). Masalah kepadatan penduduk menimbulkan permasalahan lain yang berkaitan yaitu tingginya permintaan perumahan padahal lahan yang ada terbatas. Permasalahan transportasi yang semakin padat dan menyebabkan permasalahan kemacetan akut di Jakarta, permasalahan lingkungan berupa banjir, minimnya ketersediaan air bersih, tercemarnya udara, serta tingginya kriminalitas di Jakarta. Terdapat pertumbuhan perekonomian yang terpusat di Jakarta sehingga mendorong investor untuk melakukan investasi di Jakarta. Perdebatan yang panjang mengenai pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi isu yang menarik untuk dipertimbangkan kembali. Karena Jakarta sebagai ibu kota

dinilai sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara. Sehingga perlu adanya keputusan yang jelas mengenai pemindahan lokasi ibu kota tersebut. Keputusan untuk memindahkan lokasi ibu kota ini dilakukan selain untuk mengurangi permasalahan yang kompleks di Jakarta juga mampu membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru dan mampu mengurangi disparitas ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pemilihan lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur menjadi solusi alternatif dalam mengurangi kompleksitas permasalahan di Jakarta dan mendorong berkembangnya sektor ekonomi di luar Jakarta.

Ibu kota negara dapat diartikan secara singkat sebagai kota utama yang didalamnya terdapat kegiatan pemerintahan secara administratif dan adanya bentuk secara fisik yang terdapat fungsi pemerintahan yang sah secara hukum. Ibu kota bukan hanya sebagai simbolisasi negara dan pemerintahannya namun juga sebagai tempat berkembangnya muatan politis. Namun disisi lain mengatakan bahwa ibu kota merupakan pusat ekonomi, budaya dan intelektual. Melihat kondisi Jakarta saat ini menggambarkan bahwa Jakarta sebagai kota multifungsi yang didominasi sebagai pusat ekonomi. Hal tersebut dilihat dari besarnya investasi yang ditanamkan di Jakarta dan besarnya perputaran rupiah yang terjadi di Jakarta.

Kasus pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh berbagai negara di dunia, hal tersebut dilakukan karena alasan yang berbeda-beda. Pemindahan ibu kota Belanda dari Den Haag ke Amsterdam sebagai alternatif solusi masalah yang ada di Den Haag. Saat ini Amsterdam sebagai ibu kota nasional konstitusional. Sedangkan di Den Haag digunakan sebagai pemerintahan Belanda, parlemen maupun istana ratu. Berbeda dengan Afrika Selatan yang menempatkan ibu kota administratif Pretoria, ibu kota legislatif di Cape Town dan ibu kota yudikatifnya di Bloemfontein.

Penempatan Jakarta sebagai ibu kota dalam sejarah mengalami berbagai pemindahan namun lokasi terakhir hingga saat ini tetap ditempatkan di Jakarta. Sejarah mencatat bahwa ibu kota negara

Indonesia pernah dipindahkan ke Bukittinggi dan Yogyakarta. Pemindahan lokasi ibu kota ini dapat dipindahkan dari Jakarta ke wilayah lain. Karena dalam UUD NKRI Bab II ayat (2) tertulis : Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam pasal tersebut maupun di perundangan lain tidak dijelaskan mengenai dimana dan bagaimana ibu kota tersebut diatur. Jadi dapat diartikan bahwa penempatan ibu kota memungkinkan diletakkan dimana saja namun harus ada alasan yang mendasar agar tercapai fungsi efektivitasnya.

Pemindahan ibu kota di NKRI sangat memungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya, tidak atau belum mengatur secara tegas. Dalam Bab II ayat (2) UUD NKRI tertulis: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam UUD tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana ibu kota negara diatur. Dengan demikian, terdapat fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur termasuk memindahkan ibu kota negara. Dalam pemindahan ibu kota negara, tentu saja diperlukan alasan yang kuat dan mendasar tentang efektifitas fungsinya.

Ketimpangan pembangunan, ketimpangan ekonomi menjadi permasalahan di Indonesia. Lebih dari 50% pembangunan dilakukan di Jawa dan aktivitas perkembangan ekonomi berkembang pesat di Jawa, khususnya di Jakarta. Secara awam, Kalimantan yang memiliki banyak sektor pertambangan seharusnya memiliki pendapatan yang tinggi dan mampu mendukung pemerataan ekonomi di sana, namun pada kenyataannya masih banyak ditemui penduduk yang masih terbatas dalam mengakses berbagai fasilitas dan belum terlayani dengan baik oleh pemerintah. Pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara pertama kali digagas oleh Presiden pertama, Ir. Soekarno. Kaltim dipilih karena lokasi yang strategis yang ada ditengah-tengah wilayah Indonesia. Sehingga akan mendukung upaya untuk pemeratakan distribusi kesenjangan yang terjadi

di Indonesia. Pemindahan lokasi ibu kota ke Kaltim dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah pertama dari segi geografis Kaltim relatif aman dari gempa dan bukan merupakan wilayah *ring of fire* karena daerah ini relatif datar. Kedua Kaltim berada di wilayah perbatasan dengan negara lain. Sehingga daerah perbatasan yang selama ini sulit dijangkau dan tidak diperhatikan memungkinkan untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Faktor yang ketiga adalah Kalimantan Timur memiliki populasi penduduk yang relatif sedikit. Sehingga dengan menempatkan ibu kota negara di Kalimantan Timur akan mendorong pemerataan distribusi penduduk di Indonesia.

## **B. Pendekatan Teori**

Perencanaan merupakan langkah awal dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. Menurut Terry (1975), perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, maka perencanaan merupakan sarana atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sehingga, perencanaan merupakan tahapan yang penting karena menjadi acuan suatu program atau kegiatan.

Selanjutnya, teori yang dapat digunakan dalam analisis perencanaan pemindahan ibu kota Indonesia adalah teori sinoptik. Teori sinoptik akan dikaitkan dan digunakan untuk memahami perencanaan pemindahan ibu kota. Tokoh yang mengemukakan teori sinoptik adalah Barclay M. Hudson. Menurut Hudson dalam Tanner (1981), teori perencanaan antara lain sinoptik, inkremental, transakti, advokasi, dan radikal. Teori-teori perencanaan yang telah dikemukakan oleh Barclay M. Hudson kemudian dikembangkan dan sekarang dikenal dengan istilah SITAR (*synoptic, incremental,*

*transactive, advocacy, radical*). Kelima teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisis suatu fenomena sesuai situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

Teori Sinoptik (*synoptic*) disebut juga *system planning, rational system approach*, atau *rational comprehensive planning*. Teori ini memandang objek perencanaan sebagai sebuah kesatuan yang utuh dengan satu visi yang digunakan sebagai acuan. Dalam analisis perencanaan pemindahan ibu kota Indonesia ini, yang dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah masyarakatnya. Hal tersebut nampak karena pemerintah memandang bahwa semua masyarakat di Indonesia itu sama, tidak melihat perbandingan antar pulau, perbandingan antar etnis, perbandingan umur masyarakatnya, atau perbedaan lain yang ada dimasyarakat. Langkah-langkah perencanaan dalam teori sinoptik dimulai dari pengenalan masalah, kedua mengestimasi ruang lingkup program, mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian, menginvestigasi problem, memprediksi alternatif, dan terakhir mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian spesifik. Apabila dikaitkan dengan analisis perencanaan pemindahan ibu kota Indonesia, maka langkah-langkah perencanaan dalam teori sinoptik yang telah disebutkan sebelumnya dilakukan oleh beberapa orang saja, seperti pemerintah dan para ahli atau pakar.

Penggunaan teori sinoptik dalam proses perencanaan memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari teori sinoptik antara lain kurang diperhitungkannya sumber daya yang ada karena asumsi bahwa sumber daya dapat dicari dan diusahakan, peran masyarakat sangat kecil karena didominasi oleh para ahli atau perencana dan masyarakat ada hanya sebagai objek dimana suaranya kurang diperhitungkan, mengesampingkan perbedaan atau potensi yang ada di masyarakat, harus menemukan solusi yang berdampak bagi semua pihak bukan hanya salah satu pihak saja, dan lain sebagainya. Mencoba melihat perencanaan pemindahan ibu kota Indonesia dengan teori sinoptik, maka memang nampak bahwa potensi yang ada dimasyarakat kurang diidentifikasi dan

diperhatikan. Pemerintah melihat perencanaan pemindahan ibu kota Indonesia dari sudut pandang para ahli dan kurang mendengarkan dari sudut pandang masyarakat. Sehingga sempat muncul pendapat dari beberapa pihak yang kontra dengan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara, salah satunya dari masyarakat adat. Hal ini cukup penting untuk diperhatikan karena adanya perbedaan pendapat yang tidak segera diselesaikan dapat menjadi konflik yang menghambat perencanaan kedepannya.

Disamping kekurangan, penggunaan teori sinoptik dalam proses perencanaan juga memiliki kelebihan. Beberapa kelebihan teori sinoptik tersebut antara lain metodenya yang sederhana dan ringkas sehingga cocok digunakan untuk memecahkan permasalahan umum, dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan individu maupun kelompok, harus melibatkan pihak ahli atau yang paham mengenai permasalahan yang sedang dihadapi, serta melihat suatu permasalahan melalui dimensi yang luas sehingga tidak hanya berkaitan dengan salah satu aspek saja tetapi juga aspek-aspek yang lain (ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, dan lain sebagainya). Penggunaan teori sinoptik dalam perencanaan pemindahan ibu kota Indonesia dirasa tepat apabila pemerintah menganggap hal ini bersifat mendesak dan memerlukan sebuah solusi yang cepat dengan memperhitungkan berbagai aspek yang ada didalamnya.\

### **C. Pembahasan**

Dengan resminya Bapak Jokowi mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju menandakan babak baru pemerintahan Indonesia pada periode kedua pemerintahan era Jokowi. Permasalahan-permasalahan yang sedang hangat saat ini adalah tentang perencanaan pemindahan ibu kota yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur dibangun di sekitar wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pro dan kontra pun menuai di berbagai lini media pemberitaan.

Kritik-kritik serta dukungan mewarnai wacana pemindahan ibu kota tersebut. Hingga banyak akademisi-akademisi dari luar negeri ikut berpendapat mengenai rencana pemindahan ibu kota pada rezim Jokowi. Salah satunya adalah profesor dari Leiden University bernama Prof. David Hanley yang menyatakan bahwa “Saya setuju bahwa pemindahan ibu kota tidak perlu, pemindahan tersebut merupakan pemborosan anggaran dan tidak hanya permasalahan uang saja namun juga politisi akan terisolasi dari realitas sosial yang ada karena mereka tinggal di tengah kota yang cantik di Kalimantan atau Sulawesi.”

Dari politisi Indonesia sendiri juga terdapat kritik. Salah satu kritik yang ada adalah milik Fadli Zon, “Di tengah minta untuk mendapatkan anggaran dana sulit, yah pencapaian negara sulit apakah ini masuk akal? Jadi menurut saya sih enggak masuk akal untuk saat ini, kecuali kita ada kelebihan anggaran dana yang memang dipersiapkan dan tempat juga penting dimana,” tutur Fadli. Kritik-kritik tersebut menandakan bahwa kesiapan Indonesia dalam pemindahan ibu kota secara finansial masih diragukan. Sementara itu, Harya Sukamdani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia menyebut bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa akan memberi dampak positif bagi dunia usaha. Dengan adanya pemindahan ibu kota akan otomatis menciptakan satu kota metropolitan baru. Kendati demikian, proses pemindahan ibu kota tidak akan terasa dampaknya dalam jangka waktu pendek melainkan jangka panjang.

Wacana pemindahan ibu kota ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 1957. Wacana ini kemudian kembali dimunculkan di era orde baru, dan terus muncul sampai pada era Susilo Bambang Yudhoyono, dan kemudian menemukan titik terang di era pemerintahan Jokowi. Sebagai ibu kota, Jakarta menjadi kota pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian, sehingga urbanisasi yang ada di Jakarta sangat tinggi. Berdasarkan laporan dari World Economic Forum pada tahun 2017, Jakarta menempati urutan ke sembilan sebagai kota terpadat di



dunia. Kondisi tersebut yang kemudian menimbulkan permasalahan yang hingga saat ini sulit untuk dibenahi. Berbagai permasalahan tersebut antara lain adalah macet, resiko bencana banjir, dan krisis air bersih.

Kemacetan merupakan salah satu masalah besar yang biasa terjadi di ibu kota negara berkembang, yang hingga saat ini masih sulit untuk dipecahkan. Dikutip dari *Tom Tom Traffic Index*, pada tahun 2018 Jakarta berada pada posisi ke-7 sebagai kota paling macet di dunia. Kemacetan parah yang sering terjadi tentunya berdampak pada konsumsi bahan bakar yang terbuang sia-sia. Kemacetan di Jakarta telah menyebabkan pemborosan dalam hal konsumsi bahan bakar, bahkan semakin parah karena penambahan jumlah kendaraan sekitar 11% per tahun dan penambahan panjang jalan hanya 0,01% per tahun. Suatu rasio yang tidak seimbang antara jumlah kendaraan dengan kapasitas daya tampung jalan. (Kurniawan, 2018) Apabila Jakarta terus dijadikan sebagai pusat perekonomian dan pusat pemerintah bukan tidak mungkin masalah kemacetan akan semakin sulit untuk diurai, bahkan kondisi bisa saja menjadi semakin parah. Dengan adanya peningkatan dalam pelayanan transportasi umum, diharapkan permasalahan kemacetan yang ada di ibu kota dapat sedikit demi sedikit terurai.

Bencana banjir sudah hampir tidak bisa lagi dipisahkan dari kehidupan masyarakat Jakarta. Sejarah mencatat banjir sudah mengakrabi Jakarta sejak awal pendirian kota ini oleh Pemerintah Hindia Belanda. Awalnya pada tahun 1916, Jan Peterszoon Coen meminta Simon Stevin merancang sebuah kota di muara Sungai Ciliwung yang sering kebanjiran sebagaimana Kota Amsterdam di Belanda. Kota Batavia (Sekarang menjadi Jakarta) dibangun dengan dikelilingi parit-parit, tembok kota, lengkap dengan kanal. Dengan kanal-kanal itu, Coen berharap bisa mengatasi banjir, sekaligus menciptakan sebuah kota yang menjadi lalu lintas pelayaran sebagaimana kota-kota di Belanda ( Harsoyo, 2013). Hingga saat ini, berbagai pemberitaan di media seringkali memberitakan tentang

bencana banjir yang melanda ibu kota, terutama saat musim penghujan. Hal ini merupakan salah satu dampak dari tingginya kepadatan penduduk serta berbagai pembangunan infrastruktur seperti gedung bertingkat, jalan, dan jembatan yang kemudian menyebabkan turunnya muka tanah akibat tanah di Jakarta menanggung beban yang begitu berat. Selain gedung perkantoran, alangkah lebih baik apabila pemerintah memikirkan juga pembangunan infrastruktur banjir serta upaya-upaya lainnya terkait dengan konservasi lingkungan untuk memperbaiki wilayah ibu kota yang telah rusak, sehingga dapat mengurangi resiko bencana banjir.

Berdasarkan data dari Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), cadangan air Indonesia mencapai 2.530 km kubik per tahun yang termasuk dalam salah satu negara yang memiliki cadangan air terkaya di dunia. Dalam data lain menunjukkan, ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.400 m kubik per kapita pertahun. Angka ini masih jauh di atas ketersediaan air rata-rata dunia yang hanya 8.000 meter kubik per tahun (Prihatin, 2013). Meskipun begitu, Indonesia masih mengalami kelangkaan air bersih, terutama di kota-kota besar, salah satunya di Jakarta. Tingginya jumlah penduduk yang menetap di Jakarta tentu saja sejalan dengan tingginya kebutuhan air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Konsumsi air tanah yang terlalu tinggi tentunya juga tidak akan berdampak baik bagi lingkungan. Diperlukan pengawasan yang ketat dari berbagai aktor terkait pemanfaatan air tanah, pembangunan, dan perbaikan kualitas air, sehingga masalah krisis air bersih dapat ditangani.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyebut rencana pemindahan ibukota dapat menjadi angin segar dan membawa sentimen positif bagi para investor jika sudah terealisasi. Dia menjelaskan, estimasi anggaran pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa yang tidak sedikit, yaitu sekitar Rp 466 triliun atau setara USD 33 miliar dapat menjadi kesempatan bagi para investor. Sebab dana pemindahan tersebut

dapat diperoleh dan dipenuhi dari berbagai skema pembiayaan, tidak hanya mengandalkan APBN. Sumber pendanaan pemindahan ibu kota bisa didapat melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU), BUMN, dan swasta murni. Hal tersebut tentu akan dipandang sebagai kesempatan emas bagi para investor.

Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menuturkan ada banyak pertimbangan kenapa ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta. Salah satunya terkait faktor daya dukung. Jakarta sebagai ibu kota telah dinilai memiliki kemacetan yang luar biasa. Belum lagi masalah banjir yang sering melanda Jakarta. Tidak hanya itu, masalah serius lainnya adalah penduduk yang tinggal di Jawa ada 57 persen dari total penduduk di Indonesia dan Sumatera 21 persen. Pemindahan ibu kota dianggap solusi dari penyebaran penduduk. Kemudian yang paling penting adalah menyelesaikan pemerataan infrastruktur di Indonesia. (Bimo, 2019)

Selain itu opini-opini juga datang dari pemerhati lingkungan pasalnya akan ada konsekuensi pembabatan hutan demi pembukaan akses ibu kota. Padahal untuk restorasi lahan tambang saja belum diupayakan secara maksimal atau dengan kata lain kerap dilupakan. Sedangkan bagi warga pesisir Kecamatan Samboja pemindahan ibu kota dinilai menjadi harapan baru mereka dalam memperbaiki kualitas hidup seperti akses pendidikan yang lebih mudah tapi juga tidak jauh dari kemungkinan ancaman-ancaman seperti penggusuran, keamanan dan kriminalitas. (Kumparan, 2019)

Pendapat-pendapat juga datang dari warga yang tinggal di Jakarta. Sebagian besar dari mereka setuju apabila adanya jejak pendapat dari masyarakat dan akademisi sangat penting daripada hanya mendapat persetujuan dari DPR yang dalam hal ini menjadi representasi masyarakat Indonesia. Kebanyakan dari mereka takut dengan kondisi finansial dan dampak pengabaian infrastruktur seperti gedung DPR dan MPR. Keikutsertaan yang mereka tuntut bertujuan untuk mendapatkan sosialisasi mendalam tentang

wacana pemindahan ibu kota dan keterbukaan pemerintah dalam melaksanakannya. (CNN, 2019)

Rencana pemindahan ibu kota memanglah terkesan kurang melibatkan masyarakat. Padahal dampak dari pemindahan ibukota ini sangat amat mempengaruhi kondisi masyarakat, baik itu masyarakat yang tinggal di mantan ibu kota, maupun masyarakat yang tinggal di calon ibu kota baru. Sebelum menganalisa dampak-dampak yang mungkin akan terjadi, masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya pemindahan ibukota itu bukan berarti memindahkan segala sesuatu yang ada di Jakarta sebagai pusat perekonomian, perdagangan, dan pusat hiburan, namun hanya memindahkan pusat pemerintahan ke ibu kota baru. Agenda pemindahan ibu kota yang rencana akan berpindah ke Kalimantan Timur diharapkan mampu memperkokoh tonggak nasionalisme masyarakat Indonesia, karena letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, sehingga dapat menjadi simbol kebersamaan dan keadilan. Akan tetapi ada banyak aspek yang perlu menjadi pertimbangan oleh pemerintah pada perencanaan pemindahan ibu kota ini.

Dilihat dari perspektif pertahanan dan keamanan, pemindahan ibukota haruslah mempertimbangkan aspek corak sosial serta budaya masyarakat penduduk calon ibu kota baru, sehingga tidak memiliki resistensi serta potensi konflik terhadap dinamika perpindahan ibu kota. Indikator terkait, di antaranya : Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Kerukunan Beragama, Indeks Pembangunan Manusia (Kementrian PPN, 2019)

Dari segi lingkungan dan infrastruktur, pemindahan ibu kota baru tentu memerlukan lahan yang luas dan pasti hal itu akan berdampak pada lingkungan. Kalimantan Timur adalah daerah yang masih banyak wilayah hutan dan sumber daya alam lainnya. Adanya ibu kota baru tentunya akan memerlukan banyak alih fungsi lahan. Kegiatan alih fungsi lahan tentunya juga akan berpengaruh pada kerentanan suatu kawasan terhadap datangnya suatu bencana. Upaya pembukaan lahan yang nantinya akan dilakukan diharapkan

tidak merusak sumber daya alam yang ada di Kalimantan Timur. Pemerintah juga harus memperhatikan status lahan yang akan dipakai, tidak hanya soal ganti rugi, melainkan harus juga mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut.

Masyarakat harus benar-benar siap akan perubahan drastis yang akan terjadi. Warga lokal yang mayoritas Suku Dayak mau tidak mau harus menerima masuknya budaya luar apabila pemindahan Ibu Kota sudah benar-benar terlaksana. Sedikit-demi sedikit identitas masyarakat adat akan tergerus oleh banyaknya orang-orang yang akan datang ke Ibu Kota baru. Kearifan lokal masyarakat Kalimantan Timur harus bisa dilestarikan, jangan sampai adanya pemindahan Ibu Kota ini menimbulkan gesekan di masyarakat. Pemetaan oleh pemerintah juga harus dilakukan dengan jeli mengingat daerah yang akan menjadi calon Ibu Kota masih banyak dihuni oleh masyarakat adat sehingga perlu adanya pemindahan yang benar-benar dilakukan dengan baik, jangan sampai masyarakat adat keberadaannya tersingkir oleh para pendatang. Pemerintah harus berkomunikasi dengan masyarakat setempat terkait rencana pemindahan Ibu Kota yang akan dilaksanakan, hal ini untuk memberikan kepastian terhadap keberadaan dan status kepemilikan tanah mereka. Diperlukan sosialisasi yang terus menerus kepada masyarakat dan perlu adanya dialog antara pemerintah dengan masyarakat. Keterlibatan akademisi, tokoh masyarakat, ahli bidang pembangunan dan masyarakat umum juga sangat penting dalam perencanaan dan proses pembangunan Ibu Kota baru. Pemerintah harus memetakan dan memberikan kepastian kepada masyarakat adat dan memetakan segala urusan hak masyarakat adat..

Disamping itu, aspek yang tidak kalah penting yang berkaitan dengan masyarakat adalah pemerintah harus mampu mengontrol arus urbanisasi dan memangkas kesenjangan sosial yang akan terjadi dan menimpa masyarakat. Penduduk lokal yang tinggal di calon Ibu Kota baru rata-rata bermatapencaharian sebagai pekerja di perusahaan sawit dan industri pertambangan yang kondisi

penghasilannya tidak menentu. Apabila Ibu Kota telah resmi berpindah, maka hal ini akan memungkinkan terjadinya ketimpangan sosial dari segi pendapatan antara Aparatur Sipil Negara yang baru saja berpindah,, dibandingkan dengan warga lokal yang memang tinggal di daerah tersebut, hal itu bisa menyebabkan ketimpangan rasio gini. Yang dikhawatirkan dari adanya ketimpangan adalah meningkatnya kasus kriminalitas.

#### **D. Studi Kasus**

Pada awalnya, keputusan Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada 1960 bisa dikatakan sebagai mimpi 138 tahun yang menjadi kenyataan. Melalui karya ilmiah karangan Erik Illmann dari Charles University bertema *Reasons for Relocating Capital Cities and Their Implications* menyebutkan ada lima tujuan alasan pemindahan ibu kota negara, yaitu pembangunan bangsa, penyebaran pembangunan regional, masalah ibu kota sebelumnya, mitigasi ancaman pemberontak, dan keputusan pemimpin. Kelima hal tersebut tercermin dari Brasil yang memindahkan ibu kotanya. (Erik, 2015)

Brasil sudah berencana memindahkan ibu kotanya sejak 1822. Kala itu, konstitusi dalam negeri Brasil memungkinkan peralihan ibu kota ke wilayah yang jauh dari Rio de Janeiro. Dalam Konstitusi 1946, dijelaskan lebih spesifik calon ibu kota harus berada di dataran tinggi. Mimpi satu abad itu baru terealisasi ketika Juscelino Kubitschek de Oliveira menjadi presiden 1956-1961. Ada tiga alasan utama pemindahan ibu kota harus dilakukan. Pertama, tuntutan pemerataan ekonomi. Atas pertimbangan inilah kota yang dipilih harus jauh dari Rio de Janeiro, jaraknya dengan Brasilia sekitar 1.200 kilometer. Kedua, Kubitschek ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Brasil memiliki identitasnya sendiri. Dia ingin membangun suatu kawasan yang futuristik, tidak menyiratkan sejarah kolonial Brasil, sekaligus menunjukkan kepada dunia, Brasil siap tampil sebagai super power. Tokoh yang berjasa dalam

pembangunan ibu kota baru ini adalah Oscar Niemeyer dan Lucio Costa sebagai arsitek. Rancangan tata kotanya serupa pesawat, apabila dilihat dari langit. Alasan ketiga, ibu kota yang lama sudah padat penduduk. Rio de Janeiro adalah kota yang besar dengan segudang masalah, mulai dari infrastruktur hingga transportasinya.

Brasil harus mempersiapkan uang US\$83 miliar (konversi jumlah sekarang) ketika hendak memindahkan ibu kotanya. Jika dikonversi ke mata uang Indonesia yaitu Rp. 1.168.008.370.000 yang hampir tiga kali lipat anggaran pemindahan ibu kota Indonesia. (Vanny, 2019)

Pembangunan ibu kota Indonesia yang baru juga terdapat banyak tantangan dan masukan dari Duta Besar Brasil yaitu negaranya butuh waktu lima tahun untuk membangun infrastruktur dasar di Brasilia, hingga akhirnya institusi pemerintahan dapat dipindahkan dari Rio de Janeiro pada 1960. Dimulai pada 1956, biaya pembangunan Brasilia sebagai ibu kota baru rupanya membengkak hingga menyebabkan inflasi. Namun, Barbosa mengatakan pemerintah di bawah Presiden Juscelino Kubitschek tetap meneruskannya karena percaya pada dampak positif yang menanti saat proyek itu selesai. Mengingat pertumbuhan penduduk Rio de Janeiro yang sangat cepat, kota itu sangat padat tanpa mampu diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata. Sama seperti yang dialami Jakarta dalam 20 tahun terakhir.

Terlebih lagi, berbeda dari wacana yang dipaparkan pemerintah Indonesia yang mensyaratkan kandidat ibu kota baru harus sudah berkembang dan memiliki fasilitas dasar--seperti jalan raya dan bandara, Brasil saat itu harus "babat alas" di wilayah kosong tak berpenghuni berjarak 1.200 km dari Rio. Perlu waktu sekitar 3,5 tahun untuk melihat wilayah yang kini menjadi ibu kota Brasil itu dipenuhi bangunan dan fasilitas publik untuk menampung 1 juta orang yang sebagian besar adalah pegawai pemerintahan dan keluarga mereka. "Benar-benar operasi besar-besaran.... Awalnya untuk mengakomodasi 1 juta penduduk, sekarang sudah 3,3 juta

orang," kata Barbosa. Seiring berjalannya waktu, Brasilia pun tumbuh menjadi kota terbesar keempat di Brasil setelah Rio de Janeiro, Sao Paolo, dan Salvador. Kota Rio pun kini konsisten menjadi pusat bisnis dan ekonomi di Brazil, sementara kota-kota lainnya berkembang menjadi daerah industri dan pariwisata. (Fira, 2019)

## E. Penutup

Jakarta yang menjadi ibu kota negara juga menjadi berbagai pusat pengembangan ekonomi, pusat pemerintahan, pusat perdagangan berdampak adanya kompleksitas permasalahan di Jakarta. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa khususnya dominasi di Jakarta, menyebabkan adanya ketimpangan ekonomi yang tinggi antara Jakarta dengan wilayah lain di luar Jawa. Sekarang berkembang isu yang mendukung adanya perpindahan ibukota ke Kalimantan Timur dengan berbagai alasan. Rencana pemindahan Ibukota ini kemudian disetujui oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya pembenahan kondisi tatanan geografi, ekonomi dan sosial Ibukota Republik Indonesia, yang nantinya akan dibangun di sekitar wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Wilayah Kalimantan Timur berada di tengah – tengah wilayah Indonesia, sehingga akan mudah dijangkau dari Sabang – Merauke. Lokasi strategis tersebut memungkinkan adanya perkembangan ekonomi baru. Melalui penempatan yang strategis tersebut maka akan diupayakan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Secara sederhana dapat diartikan bahwa dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dilakukan untuk membuka pusat pertumbuhan baru yang akan mendorong bangkitnya sektor – sektor lain yang memiliki dampak peningkatan ekonomi baik secara individu maupun dalam lingkup pendapatan daerah. Namun disisi lain Jakarta yang ditinggalkan tidak begitu saja di tinggalkan. Sebab Jakarta masih bisa dikembangkan sebagai pusat ekonomi di pulau Jawa. Sehingga dapat dilakukan integrasi antar



wilayah dalam mengembangkan aktivitas perekonomian wilayah. Sehingga pemerataan atau distribusi kesenjangan dapat ditekan seminimal mungkin. Membangun sebuah wilayah baru dimulai dari membangun sistem perekonomian yang ada di wilayah tersebut. Karena sistem perekonomian yang baik akan mendorong keberlangsungan pembangunan suatu wilayah.

Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang benar-benar matang. Jangan sampai lengahnya manajemen Kota Jakarta dan berbagai macam permasalahan yang sedemikian berat terulang di Ibukota baru yang akan datang. Diperlukan kejelian dan ketelitian dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diterapkan. Kebijakan tidak boleh hanya terfokus dari segi infrastruktur, melainkan harus juga ada mempertimbangkan dampak sosial yang terjadi. Adaptasi kultur, sosial, dan budaya sebaiknya dilakukan dengan baik guna menghindari konflik-konflik yang akan terjadi di masa yang akan datang, interaksi dibangun dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bimo, P. H. (2019, Mei 5). *5 Pro Kontra Rencana Pemindahan Ibu Kota Presiden Jokowi*. <https://www.merdeka.com/uang/5-pro-dan-kontra-rencana-pemindahan-ibu-kota-presiden-jokowi.html>. Diakses pada 22 Oktober 2019.
- CNN. (2019). *Pendapat Warga terkait Pemindahan Ibu Kota* [Motion Picture]. Diakses pada 23 Oktober 2019.
- Erik, I. (2015). *Reasons for Relocating Capital Cities and Their Implications*. Prague.
- Fira, N. (2019, Juli 31). *Sejarah Panjang Pemindahan Ibu Kota di Sejumlah Negara Dunia*. <https://www.ayobandung.com/read/2019/07/31/59224/sejarah-panjang-pemindahan-ibu-kota-di-sejumlah-negara-dunia>. Diakses pada 7 November 2019.
- Hudson, B. M. (1979). *Comparison of Current Planning Theories : Counterparts and Contradictions*. *APA Journal*, 387-398.
- Kumparan. (2019). *Babat Hutan Demi Ibu Kota Baru*. [Motion Picture].

- Diakses pada 24 Oktober 2019.
- Kurniawan. (2018). Implementasi Model Simulasi Sistem Dinamis terhadap Analisis Kemacetan Lalu Lintas di Kawasan Pintu Masuk Pelabuhan Tanjung Priok. *Jurnal Penelitian TRansportasi Darat* Volume 20 Nomor 1
- Rozi, S. (2019). *MEMPERTIMBANGKAN OPSI PERGILIRAN IBU KOTA*. <http://lipi.go.id/publikasi/naskah-akademis-na-mempertimbangkan-opsi-pergiliran-ibu-kota/28600>. Diakses pada 25 Oktober 2019.
- Sutikno. (2007). *Perpindahan Ibu Kota suatu Keharusan atau Wacana*. Yogyakarta: Pusat Studi Bencana, Universitas Gadjah Mada. Diakses pada 25 Oktober 2019.
- Tanner, J. M. (1983). A History of the Study of Human Growth. *Journal of Social Policy*, 419-420.
- Terry, G. R. (1975). *Office Management and Control: The Administrative Managing of Information*. London: R.D. Irwin, Inc.
- Vanny, E. R. (2019, Agustus 27). *Kisah di balik pemindahan ibukota di berbagai negara*. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/vanny-rahman/kisah-di-balik-pemindahan-ibu-kota-di-berbagai-negara/full>. Diakses pada 6 November 2019.



# TEORI PERENCANAAN WILAYAH KOTA YOGYAKARTA MELALUI RPJMD (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH)

Disusun oleh:

Endah Suryanti	(17/409882/SP/27727)
Oktaviana Farrah	(16/399363/SP/27496)
Syarief Faizal Bachri	(17/414915/SP/28042)
	(17/409892/SP/27737)

## A. Latar Belakang

Terminologi perencanaan telah dipergunakan dalam berbagai bidang, skala spasial serta tingkat operasionalisasinya. Aktivitas perencanaan pada dasarnya dilakukan oleh sektor privat maupun sektor publik. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu; Cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif; Penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa (Tjokroamidjojo, 1977). Terminologi perencanaan pun terbagi menjadi beberapa klasifikasi, salah satunya adalah berdasarkan hirarki atau skala spasial dimana aktivitas perencanaan tersebut dilakukan. Misalnya perencanaan pembangunan nasional, perencanaan wilayah atau regional, dan perencanaan lokal (kabupaten/kota). Klasifikasi ini dapat juga dilakukan dalam perencanaan fisik/spasial, seperti yang berlaku di Indonesia yaitu perencanaan tata ruang: wilayah nasional,

wilayah propinsi, dan wilayah kabupaten/kota; yang menghasilkan produk rencana tata ruang secara hirarkis: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, dan Kabupaten/Kota(Kustiwan 2014).

Perencanaan wilayah sendiri merupakan penetapan langkah-langkah yang digunakan untuk wilayah tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Nandi, 2009). Lebih lanjut dijelaskan oleh Nandi dan Djakaria sebagai pakar geografis, langkah-langkah tersebut antara lain mengetahui menetapkan tujuan, meramalkan suatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, memperkirakan berbagai masalah yang muncul, dan menerapkan lokasi atau wilayah yang dijadikan tempat untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam definisi yang lebih sosiologis, Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003). Dimana perencanaan wilayah tersebut memiliki tujuan untuk menciptakan suatu kehidupan yang aman, nyaman, efisien dan lestari sehingga diharapkan kesejahteraan manusia dapat lebih terwujud.

Perencanaan wilayah dilakukan biasanya karena terdapat berbagai faktor, Faktor yang dijelaskan oleh Nandi dan Djakaria (2009) salah satu yang terpenting yakni berdasarkan potensi wilayah. Potensi pada setiap wilayah pastinya berbeda-beda, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ada wilayah yang memiliki potensi sumber daya melimpah, namun ada pula yang minim. Perbedaan tersebut pun memerlukan perencanaan yang berbeda-beda. Potensi wilayah berupa pemberian alam maupun hasil karya manusia di masa lalu merupakan aset yang harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Kedua,

yakni terdapatnya perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga mempengaruhi perubahan dalam dinamika kehidupan manusia. Faktor yang ketiga yaitu adanya kesalahan perencanaan di masa lalu yang tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali, misalnya masyarakat yang sudah membangun rumah di jalur hijau atau yang terkena banjir tahunan. Oleh karena itu, memerlukan perencanaan berikutnya agar lebih terarah. Dan yang terakhir, terdapatnya kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang cepat.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang memerlukan adanya perencanaan di daerah tersebut. Permasalahan yang terjadi di Kota Yogyakarta antara lainnya yaitu pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya dengan jumlah yang cukup tinggi. Di sisi lain, penduduk di Kota Yogyakarta tidak hanya berisi penduduk asli, . ditambah lagi dengan penambahan penduduk yang bersifat temporer, seperti mahasiswa, pekerja, maupun wisatawan. Dimana dengan adanya penambahan penduduk tersebut menyebabkan terjadinya kemacetan. Jumlah jalan yang tidak bertambah, berbanding terbalik dengan pertumbuhan kendaraan yang beredar di jalanan Kota Yogyakarta Permasalahan berikutnya adalah perumahan. Ketersediaan lahan yang semakin menipis memaksa harga properti menjadi tinggi. Saat ini, begitu susah mencari rumah dengan harga terjangkau. Di sisi berikutnya, kebutuhan air bersih pun perlu diperhatikan. Karena semakin banyaknya alih fungsi lahan di Kota Yogyakarta menjadi bangunan, resapan air pun semakin berkurang (Hakim, 2017). Selain itu kepadatan penduduk yang terjadi dapat menyebabkan menurunnya kualitas fasilitas publik.

Dalam hal ini, perencanaan menjadi penting dalam proses pembangunan dalam suatu wilayah. Tentu saja perencanaan wilayah dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan suatu wilayah, baik dari segi ekonomi, sosial maupun fisik. Dalam konteks ini wilayah atau region adalah ruang/permukaan bumi yang pengertian, batasan

dan perwatakannya didasarkan pada ciri-ciri geografis atau suatu unit geografis yang berada pada skala sub-nasional (Kustiwan, 2014). Oleh sebab itu perencanaan wilayah dapat dilakukan dalam skala spasial yang disesuaikan dengan batas administrasi (Daerah) Kabupaten/Kota dan Provinsi, atau secara fungsional/ekoregion misalnya: Daerah Aliran Sungai (DAS), pulau/kepulauan. Untuk itu, selanjutnya pendekatan-pendekatan dari para ahli perihal perencanaan wilayah juga penting dalam mendukung pembangunan wilayah.

## **B. Pendekatan Teori perencanaan**

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai aktor, baik umum, swasta dan pemerintah serta kelompok masyarakat lainnya yang ada pada tingkatan berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan baik aspek fisik, sosial, ekonomi dan aspek lingkungan lainnya dengan cara:

- Terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.
- Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah dan melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.

Daniele Archibugi adalah seorang ekonom dan seorang ahli teori politik Italia. Ia menulis beberapa buku mengenai ekonomi, kebijakan inovasi dan perubahan teknologi, serta globalisasi politik dan teknologi dan lain-lain. Bersama David Held, ia menjadi tokoh utama kosmopolitanisme kemudian ia dikenal atas upayanya untuk menerapkan sejumlah norma dan nilai demokrasi pada politik global. Pada tahun 2008 Archibugi memberikan pendapatnya mengenai

perencanaan yang berdasarkan pada teori perencanaan wilayah yang terdiri dari empat komponen yaitu :

1. *Physical Planning* atau Perencanaan fisik. Perencanaan yang perlu dilakukan untuk merencanakan secara fisik pengembangan wilayah. Muatan perencanaan ini lebih diarahkan kepada pengaturan tentang bentuk fisik kota dengan jaringan infrastruktur kota yang menghubungkan antara beberapa titik simpul aktivitas. Teori perencanaan ini telah membahas tentang kota dan sub bagian kota secara komprehensif. Dalam perkembangannya teori ini telah memasukkan kajian tentang aspek lingkungan.
2. *Macro-Economic Planning* atau Perencanaan Ekonomi Makro. Dalam perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan ekonomi wilayah. Mengingat ekonomi wilayah menggunakan teori yang digunakan sama dengan teori ekonomi makro yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan, distribusi pendapatan, tenaga kerja, produktivitas, perdagangan, konsumsi dan investasi. Perencanaan ekonomi makro wilayah adalah dengan membuat kebijakan ekonomi wilayah guna merangsang pertumbuhan ekonomi wilayah. Sehingga, perencanaan pembangunan di Kota Yogyakarta sangat diperlukan dimana kota ini memiliki penduduk tambahan yang sering keluar masuk.
3. *Social Planning* atau Perencanaan Sosial. Perencanaan sosial membahas mengenai pendidikan, kesehatan, integritas sosial, kondisi tempat tinggal dan tempat kerja, wanita, anak-anak dan masalah kriminal. Perencanaan sosial diarahkan untuk membuat perencanaan yang menjadi dasar program pembangunan sosial di daerah.
4. *Development Planning* atau Perencanaan Pembangunan. Perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan program pembangunan secara komprehensif guna mencapai pengembangan wilayah.



Larz T. Anderson menerangkan pula proses merencanakan kota dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) **Mengidentifikasi masalah dan pilihan-pilihan**

Pada langkah ini tidak hanya sekedar menggal masalah kontemporer yang berkaitan dengan tempat tinggal, pekerja, pemilik lahan, dan pelaku bisnis saja, tetapi termasuk pula masalah-masalah yang akan muncul pada masa mendatang. Masalah-masalah ini merupakan hasil cerminan dari adanya pertimbangan pada hal-hal yang dapat terjadi sebagai akibat dari keputusan-keputusan lokal dan bukan yang bersifat regional, propinsi, dan lingkup global. Kemudian untuk pilihan-pilihan pembangunan harus terbuka kepada masyarakat dengan langsung mengidentifikasikannya pada saat itu juga. Pilihan-pilihan apa saja yang akan dibuat oleh masyarakat tersebut.

2) **Menyatakan tujuan dan sasaran serta mengidentifikasi prioritas-prioritas penanganan**

Pada tahap ini tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan harus tepat untuk siapa sesungguhnya perencanaan itu harus dimasukkan ke dalam rencana. Untuk konteks masyarakat yang beragam kita harus mengetahui ada berapa kelompok masyarakat (termasuk yang minoritas). Seringkali kesepakatan dapat diambil hanya untuk tujuan yang sifatnya umum, sedangkan tujuan spesifik dan prioritas penanganan baru dapat diambil setelah melalui tahapan negosiasi dan kompromi. Sehingga, tahapan ini membutuhkan komunikasi yang intensif antara staf perencanaan dan masyarakat lokal.

3) **Mengumpulkan dan menginterpretasikan data**

Makin banyak data yang tersedia, maka biaya yang dibutuhkan akan makin murah. Selain itu, pada tahapan ini pula dibutuhkan informasi-informasi pendukung untuk

mendeskripsikan dan menganalisis struktur ekonomi, sosial, dan politik dari wilayah perencanaan, baik yang berkaitan dengan wilayah terbangun ataupun lingkungan alami.

4) **Mempersiapkan rencana-rencana**

Subyek dari rencana terdiri dari topik-topik perencanaan yang sangat terkait kepada masyarakat penghuni di wilayah perencanaan. Biasanya untuk memunculkan elemen-elemen utama harus berdasarkan kepada diskusi-diskusi berkaitan dengan aspek kependudukan, aktivitas ekonomi, tata guna lahan, dan sirkulasi.

5) **Membuat draft program-program untuk implementasi rencana**

Pada umumnya masyarakat ingin mengetahui program-program apa saja yang akan digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang diusulkan, berapa biaya dari program tersebut, dan apakah dengan diimplementasikannya program tersebut tujuan masyarakat dapat tercapai? Oleh sebab itu, para perencana harus mengembangkan informasi dari topik-topik yang merupakan masalah yang sebelumnya mengadopsi dari *urban general plans*. Dalam hal ini terdapat lima kategori yang berkaitan dengan rencana program implementasi:

- a. Penyusunan aturan dan administrasi dari Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan tata guna lahan dan pengembangan lahan (misalnya zoning codes, subdivision codes, building codes, housing codes, grading ordinance).
- b. Review proyek (misalnya mereview dampak-dampak pembangunan).
- c. Program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah lokal dalam penyediaan pelayanan publik (misalnya

- program rekreasi masyarakat).
- d. Program-program konstruksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah lokal (misalnya konstruksi dari instalasi pengolahan air limbah).
  - e. Program-program konstruksi yang dilaksanakan oleh individu atau perusahaan (misalnya pembagian lahan baru, pusat kerja baru).
- 6) **Mengevaluasi dampak-dampak potensial dari rencana-rencana dan program-program implementasi serta memodifikasi rencana-rencana tersebut sesuai dengan dampak-dampak yang mungkin akan timbul.**
- Dalam mengevaluasi dampak dari rencana dan implementasi program ini harus meliputi analisis:
- a. Dampak lingkungan yang sangat mungkin terjadi.
  - b. Dampak potensial terhadap ekonomi lokal (perubahan dari tenaga kerja, penjualan eceran, dan sebagainya).
  - c. Dampak potensial bagi pembiayaan Pemerintah lokal (biaya penyediaan pelayanan, pajak pendapatan, rates pajak, dan sebagainya).
  - d. Konsekuensi sosial yang sangat mungkin terjadi.
- 7) **Mereview dan mengadopsi rencana-rencana**
- Tahapan ini biasanya termasuk pula program-program penyampaian informasi kepada publik, diikuti dengan public hearing, untuk kemudian diambil rencana yang telah disetujui. Dengan demikian, pihak-pihak yang telah mengadopsi rencana yang telah disetujui tersebut haruslah paham akan kebijaksanaan dari rencana tersebut beserta implikasinya.
- 8) **Mereview dan mengadopsi program-program implementasi**
- Tahapan ini meliputi siapa saja yang akan dipengaruhi oleh program-program implementasi akan menyadari

terhadap kandungan dan implikasi dari program-program tersebut, sebelum mereka mengadopsinya. Setelah itu baru diikuti dengan public hearing dan adopsi rencana secara resmi.

9) **Mengadministrasikan program-program rencana yang akan diimplementasikan, memantau dampak-dampaknya, serta mengamandemen rencana-rencana sebagai tanggapan dari umpan balik yang masuk**

Administrasi dari rencana dan implementasi program merupakan tahapan dari proses perencanaan yang sangat kelihatan di mata publik. Hal ini juga membutuhkan pula pembagian waktu dan dana dari staf perencanaan. Umpan balik dari mereka yang terpengaruhi oleh program-program tersebut kepada staf perencanaan, komisi perencanaan, dan badan legislatif, merupakan bagian mendasar dari proses ini.

## **C. Permasalahan Pembangunan**

### **1. Kesenjangan Ekonomi**

Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah ketimpangan distribusi pendapatan sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan. Jika dilihat tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta tergolong relatif baik. Selama kurun waktu 2012 - 2016, PDRB per kapita Kota Yogyakarta meningkat dari Rp 48.702.000,- di tahun 2012 menjadi Rp 56.346.000,- di tahun 2016. Besaran PDRB per kapita Kota Yogyakarta ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB per kapita DIY. Walaupun begitu, peningkatan kesejahteraan ini tidak diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata.

**Tabel 4.1.1.1****PDRB Per Kapita dan Pemerataan Pendapatan Kota Yogyakarta**

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB perkapita (Rp)	48.702.000	50.262.000	53.207.000	54.259.000	56.346.000
Pemerataan Pendapatan					
Antar Penduduk:					
a. Bagian PDRB yang diterima 40 persen Penduduk Berpendapatan Terendah (persen)	17,97	15,57	15,18	14,01	13,09
b. Rasio Gini	0,3603	0,4366	0,3959	0,4431	0,42
Pemerataan Pendapatan					
Antar Kecamatan:					
Indeks Williamson	0,506	0,513	0,517	0,505	NA

Sumber:

1. PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2017, BPS Kota Yogyakarta
2. Gini Rasio Kota Yogyakarta Tahun 2012- 2016, BPS Kota Yogyakarta
3. Hasil Olahan 2017

Kesenjangan pendapatan dan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat pada dampak yang dihasilkan. Kemiskinan di Kota Yogyakarta menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan DIY. Kemiskinan yang terjadi dipengaruhi oleh kepemilikan aset, tingkat pendidikan, mata pencaharian yang dimiliki, kondisi lingkungan dan perilaku (sikap mental) keluarga miskin. Kemiskinan di perkotaan erat kaitannya dengan terbatasnya peluang kerja yang produktif. Kota menjadi magnet bagi pendatang untuk harapan mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Penduduk maupun pendatang sama-sama bersaing untuk memanfaatkan kehidupan kota. Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki program-program bantuan untuk masyarakat miskin terutama bagi mereka yang tidak tercover bantuan pemerintah pusat, antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan, selain program-program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat tentunya.

## 2. Pengembangan Ekonomi Kreatif yang Belum Optimal

Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang digerakkan oleh kreatifitas yang berasal dari pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mencari solusi inovasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Secara kronologis kebijakan ekonomi kreatif dimulai oleh pernyataan presiden untuk meningkatkan industri kerajinan dan kreativitas bangsa yang pada akhirnya pada Perpres Nomor 92 tahun 2011 menjadi dasar hukum terbentuknya Badan baru yang mengurus ekonomi kreatif (Bekraf) yang merupakan bagian dari kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Dalam konteks Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, kegiatan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata dapat saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik.

## 3. Upaya Peningkatan Kualitas Kesehatan Belum Optimal

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa aspek, salah satunya dari aspek kesehatan. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat tersebut, antara lain angka kematian ibu, bayi, balita, prevalensi gizi buruk, dan usia harapan hidup.

Banyak program kesehatan yang dicanangkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, namun berdasarkan data masih terdapat kasus gizi buruk dan kematian pada balita. Kedua indikator ini saling berkaitan. Peran gizi di masa pertumbuhan sangatlah penting. Anak yang tidak mendapat asupan gizi yang tepat dan cukup akan menjadikan dirinya rentan terhadap penyakit. Pihak Dinas Kesehatan berharap, tidak hanya mencapai target namun sebisa mungkin kasus gizi buruk bisa ditekan hingga 0 persen. Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain kualitas kehamilan yang buruk, kehamilan risiko tinggi dan Berat Bayi

Lahir Rendah. Gizi buruk pada balita juga dapat disebabkan adanya penyakit penyerta misalnya jantung.

Kesadaran masyarakat untuk imunisasi saat ini juga mengalami penurunan, karena adanya isu berkaitan agama dan kekhawatiran terkena efek samping dari vaksin, sehingga anak lebih rentan terkena penyakit dan berat badan rendah, bahkan kematian.

#### 4. **Belum Optimalnya Terkait Kebencanaan**

Masalah optimalisasi pelayanan kebencanaan perlu diperluas hingga menjangkau masalah bencana secara umum. Pencapaian yang sudah diperoleh dalam pelayanan kebencanaan antara lain meliputi bencana kebakaran, gempa bumi, puting beliung, banjir lahar dingin akibat erupsi Gunung Merapi, dan bencana abu vulkanik akibat erupsi Gunung Kelud. Pemasalahan kebencanaan ini dirumuskan berdasarkan analisis data sekunder, wawancara, *focus group discussion* dan dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh dari perangkat daerah yang bersangkutan. Kompetensi sumber daya yang ada masih sebatas pada kejadian bencana, namun belum mengakomodasi kebencanaan secara luas. Hal ini perlu diperhatikan sebab semua wilayah termasuk jalan memiliki potensi kebakaran.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu mekanisme yang bisa dimanfaatkan sebagai bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Kerjasama ini dapat dilaksanakan dalam berbagai bidang, salah satunya dalam penanganan bencana. Hingga saat ini mekanisme CSR dari swasta yang dapat dikerjasamakan dengan BPBD belum terlaksana. Kedepannya mekanisme CSR kebencanaan dapat menjadi pilihan dalam penanganan kebencanaan yang lebih optimal.

#### **D. Solusi Perencanaan Aplikatif**

Segala bentuk administrasi di dalam suatu institusi dan atau kelembagaan tidak terlepas dari yang namanya perencanaan. Perencanaan dalam suatu institusi diterapkan secara aplikatif agar segala aspek kegiatannya teroganisir hingga mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap Institusi tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, dalam hal ini tentu saja perencanaan yang dibuat akan berbeda pula. Namun, pada dasarnya suatu perencanaan dilakukan dalam suatu institusi dilakukan untuk mengantisipasi segala perubahan yang akan terjadi.

Salah satunya adalah institusi pemerintahan, yaitu Bappeda. Bappeda adalah lembaga pemerintahan teknis yang berada di daerah yang setiap harinya menggeluti perencanaan pembangunan daerah dan penelitian. Bappeda memiliki kepanjangan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jogjakarta sendiri memiliki kantor Bappeda yang terletak di Kepatihan, Jl. Malioboro, Suryatmajan, Kec. Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bappeda tentu saja mengaplikasikan perencanaan sebagai contoh dari perencanaan secara aplikatif yang tertuang pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang biasa disingkat RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Penyusunan Rancangan Pembangunan biasanya bersamaan dengan bergantinya walikota Yogyakarta, dalam hal ini rencana pembangunan menjadi penjabaran visi dan misi Walikota yang terpilih ke dalam perencanaan strategik yaitu penjabaran lebih lanjut kedalam rumusan tujuan, sasaran, strategi, arahan kebijakan dan progam pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Didalam peraturan ini tertera dokumen Rerencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Yang selanjutnya terdapat Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya



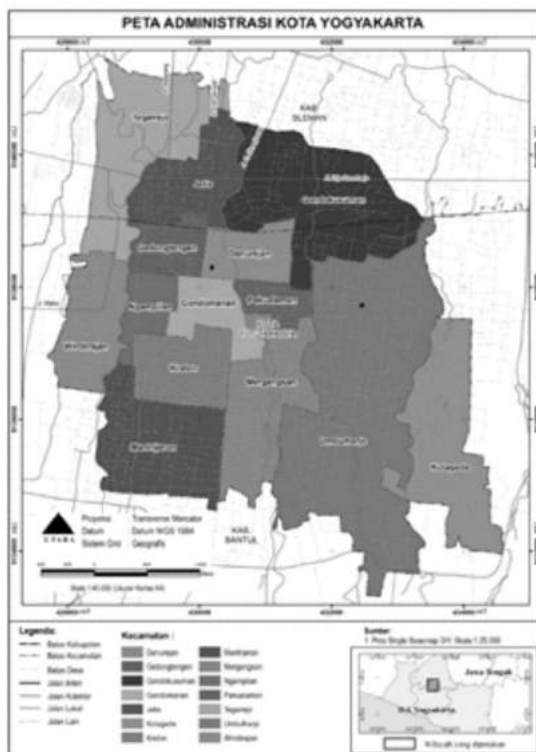
disingkat RPJMD DIY adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017-2022. Didalm Teori Perencanaan itu sendiri perencanaan dibagi berdasar jangka waktu yaitu Rencana jangka panjang 10-25 Tahun (*Long Term Planning*), lalu jangka menengah 5-7 tahun (*Medium Range Planning*), dan yang terakhir jangka Pendek 1 tahun (*Short Range Planning*).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat (Pemkot Yogyakarta, 2017).

Latar belakang adanya RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 tidak lain adalah RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 telah habis masa berlakunya kemudian pemerintah kota Yogyakarta yakni Bappeda perlu meregulasi atau menyusun ulang RPJMD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 dan 261 menyatakan bahwa proses penyusunan ulang perencanaan pembangunan daerah disinergikan, dikoordinasikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang ahli atau membidangi perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, hingga pendekatan politis, serta menggunakan pendekatan yang berusaha mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Sehingga, Kajian akademis merupakan salah satu dari

bentuk pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratis dalam hal ini menggunakan metode dan kerangka berpikir secara ilmiah untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan daerah.

Didalam perencanaan pembangunan wilayah terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yakni Aspek Geografi dan Demografi, Kondisi Topografi, Kondisi Geologi, Kondisi Hidrologi, Kondisi Klimatologi, Penggunaan Lahan, Potensi Pengembangan Wilayah, hingga Potensi Wilayah Rawan Bencana



Sumber Gambar RPMD Kota Yogyakarta 2017-2022 diakses melalui <https://umum.jogjakota.go.id/resources/instansi/def/files/rpjmd-2017-2022-2257.pdf>

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 kelurahan, 616 Rukun Warga (RW), dan 2.532 Rukun Tetangga (RT). Kota Yogyakarta memiliki luas 32,50 km<sup>2</sup> atau 1,02 persen dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan unit kecamatan, luas paling besar yaitu Kecamatan Umbulharjo (8,12 km<sup>2</sup> atau 24,98 persen). Sementara itu, luas wilayah kecamatan paling kecil yaitu Kecamatan Pakualaman (0,63 km<sup>2</sup> atau 1,94 persen).

Di dalam aspek pengembangan wilayah, potensi wilayah pengembangan sistem perkotaan dapat dilihat melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2010-2029 antara lain, pengembangan struktur ruang kota yang meliputi Peningkatan fungsi kawasan pusat kota di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondomanan., pengembangan wisata budaya di Kecamatan Kraton, Kecamatan Pakualaman, dan Kecamatan Kotagede, hingga pengembangan kawasan prioritas di Kecamatan Umbulrejo.

Sedangkan rencana Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota meliputi pengembangan Sistem pusat-pusat pelayanan kota di Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedontengen, dan Kecamatan Gondomanan, pengembangan sub pusat kota tersebar di masing-masing kecamatan, dan pengembangan Pusat pelayanan lingkungan di seluruh kelurahan dan sekitar kawasan permukiman. Tidak lupa juga dengan pengembangan beberapa aspek seperti sistem jaringan transportasi, pengembangan sistem jaringan jalan yang meliputi jaringan arteri primer contohnya adalah Jalan Ring Road. Pengembangan jalan arteri sekunder, hingga pengembangan jembatan.

Selanjutnya adalah Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana (Sarpras) yang meliputi perbaikan dan rehabilitasi jaringan transmisi listrik yang berada diseluruh Kota Yogyakarta. Kemudian terdapat pengembangan sistem Telekomunikasi yang meliputi rehabilitasi jaringan terestrial hingga pengembangan jaringan terestrial diseluruh wilayah Kota Yogyakarta, hingga pengembangan sistem drainase, jaringan persampahan dan limbah, hingga pengembangan Sumber

Daya Alam (SDA) yang meliputi Konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, yang berlokasi di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Yang selanjutnya dari beberapa aspek di atas dilakukan sebuah strategi atau upaya untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah direncanakan dalam perencanaan pembangunan wilayah Kota Yogyakarta sebagai kota yang Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang berdaya Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan. Dari Tujuan tersebut disusunlah Sasaran dengan beberapa strategi yang pada akhirnya membuahkan sebuah arah kebijakan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan wilayah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan.

## **E. Analisis teori**

Sesuai apa yang telah dipaparkan di atas, bahwa permasalahan wilayah yang muncul di kota Yogyakarta terjadi karena perencanaan pembangunan wilayah yang kurang tanggap sehingga muncul permasalahan seperti ketimpangan pendapatan dan tata guna lahan yang tidak tepat. RPJMD merupakan perencanaan pembangunan wilayah yang tepat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melihat dari pola-pola penerapannya RPJMD dapat dianalisis menggunakan teori lokasi dan aglomerasi.

## **Teori lokasi dan aglomerasi serta Teori Tata Guna Lahan.**

Teori Lokasi memberikan kerangka analisa yang baik dan sistematis mengenai pemilihan lokasi kegiatan ekonomi dan sosial, serta analisa interaksi antar wilayah. Teori Lokasi menjadi penting dalam analisa ekonomi karena pemilihan lokasi yang baik akan dapat memberikan penghematan yang sangat besar untuk ongkos angkut sehingga mendorong terjadinya efisiensi baik dalam bidang produksi maupun pemasaran.

Aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktifitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat dari perusahaan yang letaknya saling berdekatan (Kuncoro 2002).

Tujuan dasar dari aglomerasi atau teori konsentrik adalah untuk mengintegrasikan kelompok-kelompok usaha, sehingga dalam lokasi tersebut diharapkan mampu menarik sekaligus memunculkan usaha-usaha lain.

Selain itu teori kota dan rencana tata guna lahan juga diterapkan di wilayah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan RPJMD. Pembangunan pusat-pusat pelayanan agar daerah disekitarnya juga dapat ikut meningkat.

Penjelasan di atas memberikan pemahaman kepada kita untuk mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman huni maka perlu terdapat perencanaan wilayah yang tepat seperti tata guna lahan dan juga pembangunan aktivitas perekonomian yang tepat agar segala pelayanan dan fasilitas dapat digunakan secara tepat sasaran dan tepat guna. Teori lokasi dan aglomerasi memberikan solusi bagi ketimpangan baik pendapatan maupun pelayanan sosial di Kota Yogyakarta. Dengan membangun pusat perekonomian dan pelayanan di pusat-pusat kota dengan secara berdekatan maka permasalahan sosial dan ekonomi dapat dikurangi. Seperti yang di paparkan diatas bahwa Kota Yogyakarta telah membangun melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta tahun 2010-2029 dengan pengembangan struktur ruang kota yang meliputi Peningkatan fungsi kawasan pusat kota di beberapa kecamatan seperti

Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondomanan., pengembangan wisata budaya di Kecamatan Kraton, Kecamatan Pakualaman, dan Kecamatan Kotagede, hingga pengembangan kawasan prioritas di Kecamatan Umbulrejo.

Sedangkan rencana Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota meliputi pengembangan Sistem pusat-pusat pelayanan kota di Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedontengen, dan Kecamatan Gondomanan, pengembangan sub pusat kota tersebar di masing-masing kecamatan, dan pengembangan Pusat pelayanan lingkungan di seluruh kelurahan dan sekitar kawasan permukiman. Tidak lupa juga dengan pengembangan beberapa aspek seperti sistem jaringan transportasi, pengembangan sistem jaringan jalan yang meliputi jaringan arteri primer contohnya adalah Jalan Ring Road. Pengembangan jalan arteri sekunder, hingga pengembangan jembatan.

Diharapkan dengan membangun pusat-pusat pengembangan dan pelayanan di titik-titik kota secara berjarangan mengefisienkan waktu dan juga biaya dalam pelaksanaannya.

## **F. Penutup**

### **a) Kesimpulan**

Melakukan perencanaan pembangunan daerah berbeda dengan melakukan perencanaan proyek atau perencanaan-perencanaan kegiatan yang bersifat lebih spesifik dan mikro. Proses perencanaan pembangunan daerah jauh lebih kompleks dan rumit, karena menyangkut perencanaan pembangunan bagi suatu wilayah dengan berbagai komunitas, lingkungan dan kondisi sosial yang ada didalamnya. Apalagi bila mencakup wilayah pembangunan yang luas, kultur sosialnya amat heterogen, dengan tingkat kepentingan yang berbeda.

Dalam penerapannya, Kota Yogyakarta mengalami permasalahan terkait pembangunan, diantaranya permasalahan kesenjangan ekonomi sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan,

pengembangan ekonomi kreatif yang belum optimal, upaya peningkatan kualitas kesehatan belum optimal serta belum optimalnya pelayanan terkait kebencanaan. Oleh karena itu, Kota Yogyakarta melakukan solusi perencanaan aplikatif yaitu dengan membuat institusi pemerintahan Bappeda. Bappeda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga pemerintahan teknis yang berada di daerah yang bertugas dalam perencanaan dan pembangunan daerah dan penelitian. Sebagai contoh dari perencanaan secara aplikatif yang tertuang pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang biasa disingkat RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Latar belakang adanya RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 tidak lain adalah RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2012-2016 telah habis masa berlakunya kemudian pemerintah kota Yogyakarta yakni Bappeda perlu meregulasi atau menyusun ulang RPJMD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 dan 261 menyatakan bahwa proses penyusunan ulang perencanaan pembangunan daerah disinergikan, dikoordinasikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang ahli atau membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, hingga pendekatan politis, serta menggunakan pendekatan yang berusaha mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Sehingga, Kajian akademis merupakan salah satu dari bentuk pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratis dalam hal ini menggunakan metode dan kerangka berpikir secara ilmiah untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan daerah.

Tidak semua perencanaan adalah merupakan perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan disebut sebagai perencanaan

pembangunan apabila dipenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Ciri suatu perencanaan pembangunan (agent of development) oleh karena perencanaan pembangunan sendiri merupakan bagian dari administrasi pembangunan yang menjadi bagian kewenangan pemerintah.

Bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah memerlukan Koordinasi dari semua unsur yang terlibat dalam rangka menghasilkan sebuah program dan kegiatan yang holistik dan komprehensif, selain itu Perencanaan Pembangunan Daerah harus mampu menentukan prioritas program dan kegiatan berdasarkan fakta dan data dari potensi daerahnya, serta harus mempunyai sumberdaya yang mempunyai kemampuan yang baik secara interdisipliner, sehingga koordinasi sekali lagi sangat diperlukan dalam pembuatan sebuah perencanaan pembangunan yang terintegrasi, tersinkronisasi, dan menyeluruh.

Perencanaan Pembangunan suatu wilayah harus dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan dan berbagai teori agar tidak mengalami kegagalan. Perlu banyak pertimbangan dan melalui proses panjang agar hasil yang didapat dapat sesuai dengan yang diharapkan. Menyelesaikan permasalahan dengan solusi pembangunan yang baik dan tepat.

## **b) Saran**

Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan diatas meja, tanpa melihat realita dilapangan. Data-data real lapangan sebagai data primer merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material)



maupun non fisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Oleh karena itu perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan di wilayah tersebut di masa yang akan datang. Perencanaan haruslah dirancang dengan matang agar dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan dimana lokasi seperti itu tersebut masih diizinkan sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan. Perencanaan wilayah harus menjadi landasan bagi rencana-rencana lainnya yang lebih sempit tapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana. Perencanaan dapat memudahkan dalam penyusunan dan penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu sehingga harapan daripada pembangunan yaitu memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat, dapat dicapai secara optimal dari lokasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous. 2017. Perspektif Tentang Kota dan Perencanaan Kota. Diakses online melalui <http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-954-perspektif-tentang-kota-dan-perencanaan-kota.html##ixzz63VQe1KbK>. Diakses tanggal 25 Oktober 2019.
- Anonimous. Universitas Sumatra Utara. Diakses online Disertasi melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/28086/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Diakses tanggal 25 Oktober 2019.
- Djunaedi, A., 2014. *Pengantar perencanaan wilayah dan kota*. Gadjah Mada University Press.

- Hakim, A. 2017. PR Kota Yogyakarta Agar Benar-benar Berhati Nyaman. Diakses online melalui <https://www.kompasiana.com/ariflukman/59d8f488e3f7bc2d48130c92/pr-kota-yogyakarta-agar-benar-benar-berhati-nyaman?page=all> Diakses pada tanggal 15 November 2019
- Kuncoro, M. 2002. Analisis Spasial dan Regional : Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia. Jogjakarta : UPP AMP YKPN.
- Kustiwan, I. 2014. *Pengertian Dasar, Unsur-Unsur, dan Karakteristik Perencanaan, serta Lingkup Perencanaan Wilayah dan Kota*. Available at <http://repository.ut.ac.id/4276/1/PWKLA201-M1.pdf>. Diakses tanggal 25 Oktober 2019.
- Nandi dan Nur, D. 2009. *Pengantar Perencanaan Wilayah*. Jurusan Pendidikan Geografis UPI
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 diakses online melalui <https://umum.jogjakota.go.id/resources/instansi/def/files/rpjmd-2017-2022-2257.pdf>. Diakses tanggal 26 Oktober 2019
- Rustiadi, E., 2018. *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tjokaromidjojo, B. 1997. *Perencanaan pembangunan*. Jakarta : Gunung Agung, 1977.

